DISCLAIMER
This is an unofficial translation of the report 'Social justice at bay into Bahasa Indonesia. The Dutch role in Jakarta's coastal defence and land reclamation', published by SOMO, TNI and Both ENDS in April 2017. The report discusses the National Capital Integrated Coastal Development programme (NCICD), a multi-billion infrastructure project that is meant to protect the city of Jakarta against future flooding. The Master Plan for this project was drawn up by a consortium of Dutch engineering and consultancy companies. The Dutch government, through its development aid budget, has supported the design phase and is likely to remain closely involved with this prestigious project. The Dutch involvement is a prime example of the shift in Dutch development policies as laid down in the New Agenda for Aid, Trade and Investment. Research by SOMO, Both ENDS and TNI shows that the NCICD and related projects in Jakarta Bay are likely to damage the environment and could threaten the livelihoods of tens of thousands of people who rely on the local fishing industry. Local civil society organisations are deeply concerned that they have not been involved in the planning and design of this large-scale infrastructure and real estate project. In 2014, they joined forces with other affected groups and formed the 'Save the Jakarta Bay Coalition'. The report formulates a number of recommendations to the Dutch and Indonesian government to ensure the social and environmental rights are protected, including the option to abandon the planned Giant Seawall and land reclamations that are expected to destroy local livelihoods.

You can find the official documents on the websites of Both ENDs, TNI and SOMO

Keadilan Sosial di Pesisir: Peran Belanda dalam Proyek Pertahanan Pesisir

Catatan Produksi

Keadilan sosial di pesisir, peran Belanda dalam proyek pertahanan pesisir dan reklamasi. Januari 2017
Penulis: Maarten Bakker (SOMO), Satoko Kishimoto (TNI), Christa Nooy (Both ENDS) Penyunting bahasa: Vicky Anning
Sampul dan tata letak: Margo Vlamings
Foto sampul: Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta
ISBN: 978-94-6207-115-5

Publikasi ini dibuat dengan dukungan finansial dari Kementerian Luar Negeri Belanda. Isi dari publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Both ENDS dan Transnational Institute (TNI) dan tidak dapat dikutip untuk mencerminkan pandangan dari Kementerian Luar Negeri Belanda.

UCAPAN TERIMA KASIH:

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi penelitian antara SOMO, Both ENDS dan TNI. Terima kasih kepada orang-orang berikut yang telah mengkaji dan memberikan komentar: Ahmad Marthin Hadiwinata (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia - KNTI), Nila Ardhianie (Amrta Institute), Niels Hazekamp & Giacomo Galli (Both ENDS), Roos van Os (SOMO), Bart Teeuwen (Ahli Hukum Dan Kelembagaan Sumber Daya Air), Bosman Batubara & Michelle Kooy (Departemen Sistem Air Terpadu & Pengaturan, UNESCO-IHE Institute for Water Education) dan Santy Kouwagam (pengacara di Indonesia dan peneliti di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society).

Dokumen ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 lisensi International*. Anda dapat menyalin dan menyebarluaskan dokumen, baik secara keseluruhan ataupun mengutip terpisah satu bab yang utuh, asalkan menyebutkan penulis dan organisasi yang menerbitkan, mengutip sumber asli untuk publikasi pada website mereka, dan digunakan untuk kepentingan non-komersil, pendidikan ataupun kebijakan publik.

Daftar Isi

1.	**Pendahuluan**	
1.1.	Latar Belakang	
1.2.	Tujuan	
1.3.	Metode	
1.3.1.	Pengumpulan Data	
1.3.2.	Ulasan Sejawat	
1.3.3.	Ulasan Perusahaan	
1.3.4.	Pedoman Normatif untuk komitmen Belanda terhadap Hak Asasi Manusia	
1.4.	Struktur	
2.	**Teluk Jakarta – Analisis Situasi**	
2.1.	Pendahuluan	
2.2.	Reklamasi Pesisir dan Perlawanan	
2.2.1.	Gugatan hukum oleh nelayan dan hilangnya sumber pendapatan nelayan serta dugaan korupsi	
2.3.	Ancaman banjir	
2.3.1.	Amblasan tanah	

2.3.2.	Penyebab penyedotan air tanah	
2.3.3.	Privatisasi pasokan air	
2.3.4.	Pembebanan dari gedung dan pembangunan	
3	**Keterlibatan Belanda di Teluk Jakarta**	
3.1.	*Master Plan* NCICD	
3.1.1.	Perhitungan biaya finansial	
3.1.2.	Pembiayaan melalui penjualan pemukiman mewah kepada pihak swasta	
3.2.	Keterlibatan bisnis Belanda dalam reklamasi pesisir di Teluk Jakarta	
3.3.	Keterlibatan Belanda di pelabuhan Jakarta	
4.	**Mempromosikan Sektor Perairan Belanda**	
4.1.	Sektor perairan unggulan	
4.1.1.	Lembaga kredit ekspor	
4.1.2.	Diplomasi ekonomi	
4.1.3.	Kerjasama pembangunan	
4.2.	Sektor perairan Belanda di Indonesia	
4.2.1.	Pembiayaan pemerintah Belanda	
4.3.	Kerjasama Maritim	
4.3.1.	Otoritas pelabuhan Rotterdam	
5	**Kekhawatiran kritis tentang NCICD**	
5.1.	NCICD tidak menawarkan solusi tenggelamnya Jakarta	
5.1.1.	Mengakhiri penyedotan air tanah dan masalah privatisasi	
5.2.	Keuntungan swasta dan kerugian publik	
5.2.1.	Kerugian sosial dan ketimpangan ekonomi	
5.2.2.	Kerugian lingkungan	
5.3.	Risiko keuangan	
5.3.1.	Investor yang kontroversial	
5.4.	Pelanggaran prinsip pembiayaan pembangunan berkelanjutan	
6	**Tantangan tata kelola air publik di Indonesia**	
6.1.	Pengelolaan sumber daya air terpadu di Indonesia dan Belanda	
6.1.1.	Tiadanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang rinci	
6.2.	Tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia	
6.2.1.	Kerangka hukum dan kelembagaan	
6.2.2.	Tumpang tindih mandat, kebijakan dan peraturan	
6.2.3.	Kurangnya akses terhadap data yang layak dan terpercaya	
6.2.4.	Lemahnya penegakkan hukum	
6.2.5.	Kurangnya keterlibatan masyarakat	
7	**Kesimpulan dan rekomendasi**	
7.1.	Ringkasan kekhawatiran kritis	
7.2.	Rekomendasi oleh masyarakat sipil di Indonesia	
7.3.	Merekomendasikan pendekatan terpadu bagi pemerintah Belanda dan pemangku kepentingan di NCICD	

Catatan Bab 1	
Catatan Bab 2	
Catatan Bab 3	
Catatan Bab 4	
Catatan Bab 5	
Catatan Bab 6	

Catatan Bab 7	

Tabel 1: Kerugian pendapatan nelayan akibat reklamasi pesisir	
Tabel 2: % faktor penyebab amblasan tanah di wilayah Jakarta	
Tabel 3: Perbandingan rata-rata tarif air di kota-kota di Indonesia (2012)	
Tabel 4: Biaya NCICD yang diusulkan	
Tabel 5: Kasus bisnis NCICD: biaya dan pendapatan yang diajukan	
Tabel 6: Kasus bisnis NCICD: perkiraan umum pendapatan dari pemukiman mewah	
Tabel 7: Pembiayaan pemerintah Belanda untuk sektor perairan	

Gambar 1: Teluk Jakarta	
Gambar 2: 17 pulau buatan yang direncanakan di Teluk Jakarta, dari A sampai Q	
Gambar 3: Garuda Megah	
Gambar 4: 3 fase dari rencana NCICD	
Gambar 5: Logo NCICD dengan gedung pencakar langit	
Gambar 6: Peningkatan ekspor dari sektor perairan sejak 1994	
Gambar 7: Ekspor Belanda di sektor perairan ke negara berkembang dalam persentase omset	

Kotak 1: Pendekatan delta komprehensif Belanda	
Kotak 2: Undang-Undang Sumber Daya Air Indonesia – privatisasi dan tata kelola	

Daftar Singkatan

AS	:	Amerika Serikat
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DHI	:	Institut for Vand og Miljø [Perusahaan internasional konsultan teknik yang berkantor pusat di Denmark dan mempunyai spesialisasi dalam hal permodelan hidrolik dan hidrologi]
ECA	:	Export Credit Agency [Lembaga Kredit Ekspor]
EIA	:	Environmental Impact Assessment [Kajian Lingkungan Hidup Strategis]
EKOSOB	:	Ekonomi, Sosial dan Budaya
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HLP	:	High Level Panel on Water [Panel Tingkat Tinggi tentang Air]
ICESCR	:	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya]
ITB	:	Institut Teknologi Bandung
IWRM	:	Integrated Water Resources Management [Pengelolaan Sumberdaya Air

		Terpadu]
JCDS	:	Jakarta Coastal Development Strategy [Strategi Pembangunan Pertahanan Pesisir]
KNTI	:	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MoU	:	Memorandum of Understanding [Nota Kesepahaman]
NCICD	:	National Capital Integrated Coastal Development [Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)]
NGO	:	Non-governmental organization
NWP	:	Netherlands Water Partnership
ODA	:	Official Development Aid [Bantuan Pembangunan Resmi]
OECD	:	Organisation for Economic Cooperation and Development
PAM Jaya	:	Perusahaan Air Minum Jakarta Raya
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMU	:	Program Management Unit, established for the development and design of NCICD
PPP	:	Public-private partnership
RVO	:	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Netherlands Enterprise Agency)
SDG	:	Sustainable Development Goal
SEA	:	Strategic Environmental Assessment
SME	:	Small- and medium-sized enterprise
SOMO	:	Centre for Research on Multinational Organisations
TKPSDA	:	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
TNI	:	Transnational Institute
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
UN	:	United Nations
UNGP	:	UN Guiding Principles on Business and Human Rights
UNICEF	:	United Nations Children's Fund
UNDP	:	United Nations Development Programme
WHO	:	World Health Organization

Bab 1
Pendahuluan

Ibukota negara Indonesia, Jakarta menghadapi risiko banjir parah yang mengancam lebih dari 10 juta penduduk. Hal ini sangat jelas telihat pada tahun 2007 ketika banjir yang disebabkan oleh hujan lebat menyebabkan hilangnya 80 jiwa. Pemerintah Belanda dan sektor pengelolaan air telah memenuhi permintaan dari pemerintah Indonesia untuk merumuskan rencana peningkatan pertahanan banjir Jakarta. Upaya ini menghasilkan rencana strategis yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development programme (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang mengusulkan mega proyek infrastruktur bernilai mencapai 40 miliar dollar AS, mencakup pembangunan tanggul laut luar serta pengembangan pemukiman mewah di

pulau buatan sekitar tanggul laut. Proyek ikonik ini diposisikan sebagai contoh utama pengakuan seluruh dunia akan keahlian pengelolaan air pemerintah Belanda dan operasionalisasi agenda 'bantuan dan perdagangan' pemerintah Belanda, yang berusaha untuk menggabungkan antara bantuan pembangunan dengan dukungan terhadap kepentingan bisnis Belanda.

Organisasi-organisasi Belanda Both ENDS, SOMO dan TNI memiliki kontak dekat dengan organisasi di Indonesia yang mewakili orang-orang yang sumber kehidupannya terkena dampak langsung oleh proyek, khususnya nelayan, perempuan dan kelompok miskin kota yang tidak mendapatkan layanan air perpipaan. Organisasi-organisasi tersebut sangat prihatin akan terbatasnya partisipasi dari kelompok kepentingan setempat dalam proses perencanaan yang menghasilkan rancangan dan pelaksanaan NCICD. Hal ini tentunya bermasalah, mengingat potensi dampak negatif yang mengancam sumber kehidupan dan kesejahteraan penduduk di Teluk Jakarta. Lebih lanjut, organisasi lokal meragukan bahwa NCICD akan mengatasi akibat banjir Jakarta yang paling mengancam: tenggelamnya kota Jakarta. Laporan ini didasarkan pada studi mengenai NCICD yang dilakukan oleh organisasi penulis, berdasarkan keprihatinan yang dinyatakan oleh mitra lokal.

Salah satu target yang ingin dicapai oleh laporan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang yang memastikan keterlibatan dan partisipasi dari kelompok lokal dalam menyelesaikan permasalahan air di Jakarta dengan cara yang betul-betul berkelanjutan. Belanda memiliki kriteria yang ketat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan: pemangku kepentingan lokal harus dilibatkan di semua fase perencanaan dan pengambilan keputusan, selain itu rencana yang diajukan harus dibandingkan dengan peluang alternatif investasi. Di Belanda, tanggungjawab perusahaan disebut sebagai kunci dalam memeriksa pengembangan dan pelaksanaan proyek. Perusahaan Belanda dan otoritas yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan NCICD tidak boleh berbeda aksinya di luar negeri: mereka harus memastikan bahwa standar tinggi yang mereka miliki juga diaplikasikan dalam proyek Teluk Jakarta.

1.1. LATAR BELAKANG

Faktor utama yang berkontribusi terhadap risiko banjir Jakarta adalah amblasan tanah yang cepat terjadi. Jakarta akan tenggelam dengan cepat, paling tidak karena penyedotan air tanah dalam volume besar untuk air minum. Hal ini menjadikan kota rentan akan banjir baik dari laut maupun sungai pedalaman. Secara umum, dipahami bersama bahwa infrastruktur air dan sanitasi beserta pengaturannya membutuhkan perbaikan serius sehingga dapat menghentikan penyedotan air tanah. Rencana NCICD yang telah disusun oleh konsorsium perusahaan teknik Belanda dan dibiayai oleh pemerintah Belanda menyimpulkan bahwa amblasan tanah lambat laun tidak dapat dihentikan. Fase A dari proyek, mempertinggi dan memperkuat tanggul darat yang ada di pesisir Teluk Jakarta dimulai di tahun 2014. Fase B melibatkan pembangunan tanggul laut luar barat dan pulau buatan baru, Garuda Megah, yang akan mulai dibangun dalam beberapa tahun dari sekarang. Fase C diperkirakan akan membangun tanggul laut di wilayah timur. Ada beberapa kekhawatiran mengenai dampak proyek terhadap mutu air di Teluk Jakarta jika prasyarat membersihkan ke-13 sungai yang bermuara ke Teluk dan mengalami pencemaran berat, tidak terpenuhi. Rencana pembangunan, seperti pembangunan tanggul laut luar akan mengubah arus sungai tersebut ke teluk Jakarta dan laut lepas yang kemungkinan akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada kualitas air di teluk.

Berkaitan erat dengan proyek NCICD adalah proyek reklamasi pesisir yang sudah dalam proses pembuatan 17 pulau buatan di sepanjang pantai di Teluk Jakarta. Proyek-proyek ini dibawah kendali perusahan pengembang properti. Sejak tahun 1995, membutuhkan waktu lebih dari satu dekade dan beberapa gugatan hukum sebelum rencana ini akhirnya diloloskan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2011. Meskipun secara teknis merupakan proyek yang berbeda, ke-17 pulau dan

NCICD adalah dua rencana yang jika dipraktikkan akan merusak wilayah tangkap perikanan dan budidaya serta membatasi akses terhadap laut lepas untuk nelayan. Organisasi di Indonesia memperkirakan bahwa proyek ini mengancam kehidupan puluhan ribu orang yang bergantung pada usaha perikanan di Teluk Jakarta. Dengan potensi dampak yang sama yang ditimbulkan oleh reklamasi pesisir yang telah berjalan, beserta reklamasi pesisir yang telah direncanakan dan tanggul laut luar pada NCICD, organisasi Indonesia khawatir dengan proses pembangunan di Teluk Jakarta yang tengah berjalan dan melihat keduanya sebagai proyek yang terkait satu sama lain dan tidak terisolasi. Perusahaan Belanda telah disubkontrakkan oleh perusahaan pengembang properti untuk rancangan dan pembangunan 4 buah pulau.[1] Media lokal melaporkan bahwa sebuah kapal dari perusahaan Belgia yang bernama Jan De Nul telah terlibat dalam aktivitas penambangan pasir ilegal di luar Teluk Jakarta untuk pembangunan salah satu pulau. Meskipun klaim ini belum diverifikasi oleh perusahaan atau melalui investigasi resmi, hal ini menunjukkan adanya potensi konflik dengan masyarakat lokal dan proyek reklamasi pesisir yang demikian besar seperti pembuatan Garuda Megah sebagai bagian dari Fase B proyek NCICD sangat berisiko terhadap standar perlindungan lingkungan. Adapun yang dikhawatirkan oleh sejumlah organisasi di Indonesia dengan pembangunan di Teluk Jakarta, bahwa proyek NCICD tidak membahas persoalan-persoanal inti yang menjadi pokok ancaman terhadap kota ini. Menghentikan kota dari ancaman tenggelam harus menjadi prioritas saat ini; Jakarta harus mengurangi ketergantungan pada air tanah sebagai sumber utama air minum. Organisasi lokal yakin bahwa pasokan air minum di wilayah termiskin dari kota Jakarta dapat diperbaiki dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Selain itu juga ada kebutuhan untuk mengatasi masalah pencemaran di hulu 13 sungai; menanggulangi pencemaran oleh limbah industri dan rumah tangga adalah memungkinkan jika tersedia layanan pengelolaan air limbah yang memadai. Namun semua prioritas ini berikut langkah-langkah yang diperlukan tidak menjadi fokus utama dari proyek NCICD pada tahapan ini.

Laporan ini mengungkap secara kritis proyek NCICD dan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Apa potensi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari proyek NCICD?
- Apakah proyek NCICD cukup menjawab masalah banjir yang sedang dihadapi di Jakarta?
- Apakah proyek NCICD memenuhi tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, khususnya yang terkait dengan partisipasi pemangku kepentingan lokal dalam pembangunan skala besar dan proyek-proyek infrastruktur?
- Apakah risiko finansial mega proyek ini bagi Indonesia?
- Adakah alternatif dari NCICD yang telah dipertimbangkan secara layak?

1.2. TUJUAN

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan kontribusi informasi bagi perdebatan yang terjadi saat ini mengenai cara terbaik untuk mengatas masalah banjir Jakarta secara berkelanjutan dan efektif. Hal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah Belanda tentang bagaimana mengurangi potensi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan dari proyek NCICD. Termasuk di dalamnya meninjau kembali desain rencana, atas dasar kajian dampak sosial dan lingkungan yang menyeluruh. Selanjutnya, laporan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Belanda dalam menaati kewajiban hak asasi manusia dalam instrumen hukum internasional dan standar yang tinggi terkait dengan tata kelola air yang baik. Rekomendasi ini secara khusus ditujukan pada Kementerian Luar Negeri, yang dijalankan oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan serta Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan.

Laporan ini juga bertujuan untuk menyoroti implikasi bergabungnya agenda perdagangan dan

bantuan. Dukungan terhadap kepentingan bisnis dan sektor keahlian Belanda dapat menimbulkan konflik dengan tujuan pembangunan jika tidak ada analisis yang memadai tentang kontekstual kompleksitas dan keseimbangan antara kepentingan privat dan publik. Laporan ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya menaati kriteria penilaian standar keamanan kepentingan publik untuk memastikan bahwa akibat yang diidentifikasi pada awal proyek dapat ditangani dengan sesuai.

Terakhir tapi tidak kalah penting, penelitian yang dilakukan dalam laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk mendukung mereka dalam advokasi yang dilakukan untuk memperjuangkan keadilan sosial –khususnya perlindungan terhadap sumber kehidupan nelayan setempat dan masyarakat sekitar yang tergantung pada usaha perikanan- serta seluruh warga Jakarta, yang memiliki hak yang setara dan akses yang terjangkau atas air bersih. Mereka telah merumuskan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia yang juga dituliskan dalam laporan ini.

1.3. METODE

1.3.1. Pengumpulan Data

Sumber informasi utama untuk menilai reklamasi pesisir yang tengah berlangsung di Teluk Jakarta dan potensi dampak dari proyek NCICD adalah *Master Plan* NCICD, dokumen latar belakang untuk tender yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda untuk menyiapkan pelaksanaan Fase B dari *Master Plan*, sumber laporan media di Indonesia tentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dua keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengenai reklamasi pesisir, dan dua laporan latar belakang yang diterbitkan oleh perusahaan konsultas Denmark DHI Water & Environment [Air & Lingkungan] yang ditugaskan oleh pemerintah Denmark dalam rangka program dukungan lingkungan. Yaitu *Rapid Environmental Assessment for Coastal Development* [Kajian Singkat Lingkungan untuk Pembangunan Pesisir] di Teluk Jakarta sejak tahun 2011 dan Kertas Rekomendasi Teluk Jakarta di tahun 2012. Sumber-sumber tersebut dirujuk lebih rinci di seluruh laporan ini.

Analisis mengenai amblasan tanah dan persoalan pengelolaan air di Jakarta berdasarkan wawancara dengan ahli pengelolaan air dari lembaga penelitian Belanda Deltares dan UNESCO-IHE Institute for Water Education beserta peneliti dari Institut Teknologi Bandung. Informasi yang juga disediakan oleh Netherlands Commission for Environmental Assessment (MER Commission) [Komisi Kajian untuk Lingkungan Belanda]. Informasi mengenai dampak proyek reklamasi di Teluk Jakarta diberikan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang memiliki 5000 orang anggota dengan 23 pengurus wilayah di Indonesia. Sementara di wilayah Jakarta, KNTI memiliki 500 anggota pada saat Both ENDS berkunjung di bulan April 2016. Both ENDS juga melakukan wawancara tambahan dengan 10 orang nelayan di Muara Angke dan Kali Adem (23 April 2016) dan 5 orang nelayan di Pulau Pari (24 April 2016). Akses kepada nelayan tersebut dibantu oleh KNTI; dan beberapa wawancara dilakukan tanpa dihadiri oleh perwakilan dari KNTI.

Untuk penilaian proyek NCICD, wawancara dilakukan dengan perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda. Sedangkan pertanyaan terkait dengan pembiayaan proyek NCICD ditujukan pada Kementerian Luar Negeri. Konsep laporan ini disampaikan kepada kedua kementerian tersebut dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta sebelum dipublikasikan untuk mendapatkan komentar. Komentar diterima dari Kementerian Luar Negeri, dan adapun yang terkait telah dimasukkan dalam laporan.

1.3.2. Ulasan Sejawat

Mitra lokal penulis –KNTI dan Amrta Institute for Water Literacy- memberikan informasi dan penelitian untuk laporan ini serta telah bersama-sama menyusun rekomendasi untuk pemerintah Indonesia yang disampaikan di Bab 7. Mereka juga menelaah beberapa bagian dari laporan yang terkait dengan dampak lokal dari proyek NCICD dan sistem pengelolaan air serta persoalan terkait pemerintah daerah.

Versi draft dari laporan ini menjadi bahan untuk ulasan sejawat oleh Bart Teeuwen (Ahli Hukum dan Kelembagaan untuk Sumber Daya Air), Bosman Batubara dan Michelle Kooy (Department of Integrated Water Systems & Governance, UNESCO-IHE Institute for Water Education) dan Santy Kouwagam (Pengacara Indonesia dan peneliti pada Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society).

1.3.3. Ulasan Perusahaan

Beberapa bagian dari versi draft yang terkait dengan keterlibatan perusahaan dalam reklamasi pesisir dan pengembangan properti di Teluk Jakarta telah dikirimkan kepada Grup Royal BAM, perusahaan pengerukan Boskalis, Van Oord, dan Jan De Nul, serta perusahaan pengembang properti Indonesia PT Agung Podomoro Land[2] dan Agung Sedayu Grup.[3] Informasi dalam draf laporan tentang potensi finansial dari proyek NCICD dikirim ke Grup Artha Graha, Indofood (Grup Salim) dan PT Agung Podomoro Land. Perusahaan konsultan dan teknik Royal Haskoning DHV dan Wutteveen+Bos, yang berkoordinasi dengan konsorsium Belanda yang mengembangkan *Master Plan* NCICD juga diberikan kesempatan untuk menelaah draf laporan, seperti Deltares yang menyediakan keahlian spesifik untuk *Master Plan* NCICD dan sudah melakukan penelitian tentang amblasan tanah di Jakarta. Deltares juga menyelenggarakan pertemuan dengan para ahli internasional di bidang air pada tahun 2015 di Jakarta.

Beberapa perusahaan tersebut, antara lain Jan De Nul, Grup Agung Sedayu, Indofood (Grup Salim) dan Grup Arta Graha tidak merespon permintaan untuk melakukan telaah. Witteveen+Bos bereaksi dengan detil terhadap draf laporan. Adapun komentar yang relevan telah dituliskan dalam laporan. Royal BAM Grup mengklarifikasi keterlibatan mereka dalam aktivitas di Teluk Jakarta terbatas pada partisipasi dalam workshop yang dilakukan untuk memberikan input terhadap kajian tentang Pulau O, P dan Q.

Van Oord dan Boskalis membentuk konsorsium yang melakukan kegiatan reklamasi untuk pulau G di Teluk Jakarta. Reklamasi pesisir yang membuat 17 pulau di Teluk Jakarta telah dimulai sejak tahun 2011 yang awalnya terpisah dari proyek NCICD, namun akan diintegrasikan dalam desainnya. Perusahaan bereaksi dalam respon umum untuk draft laporan, menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembangunan ataupun eksekusi dari rencana NCICD, dan bahwa semua aktivitas mereka telah disetujui oleh otoritas di Indonesia. Terkait dengan protes yang dilakukan oleh komunitas nelayan setempat yang menentang aktivitas reklamasi untuk pulau G, dimana nelayan mengklaim bahwa aktivitas tersebut telah merusak wilayah tangkap mereka, respon perusahaan adalah mereka peduli akan protes itu. Mereka menyatakan bahwa selama fase tender proyek, mereka telah sepakat bahwa pengembang properti bertanggungjawab untuk kegiatan –ia juga harus menjadi titik kontak pertama untuk komunitas nelayan.

Semua pengulas memberikan komentar yang berharga, koreksi dan saran untuk draf pertama. Semua yang relevan telah dimasukkan ke dalam versi final. Tak diragukan lagi, penilaian proyek NCICD dan kemungkinan akan ketidakakuratan sepenuhnya dari penulis.

1.3.4. Pedoman Normatif untuk komitmen Belanda terhadap Hak Asasi Manusia

Pedoman normatif digunakan untuk mengevaluasi dukungan Belanda terhadap proyek NCICD dan perusahaan-perusahaan Belanda yang secara internasional mengakui serangkaian standar pembangunan berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ada banyak standar yang telah menjadi komitmen pemerintah Belanda. Adapun yang relevan dengan laporan ini adalah kewajiban negara terkait dengan dampak terhadap HAM yang ekstrateritorial atas bantuan dan kerjasama internasional melalui Official Development Aid (ODA) [Bantuan Pembangunan Resmi] atau sebaliknya.

Contohnya, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) di mana Belanda merupakan negara pihak yang berkewajiban untuk: dalam Pasal 2(1): "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif".[4] Belanda juga memiliki kewajiban tidak hanya menghormati hak asasi manusia dalam kerjasama dan bantuan internasional, namun juga untuk melindungi hak asasi manusia dengan meregulasi kuasa yang dimiliki aktor non-Negara, dalam hal ini bisnis Belanda yang terkait dengan proyek NCICD.[5] Prinsip-prinsip yang juga dibingkai dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* [Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia][6] dan UN Guidelines on Extreme Poverty and Human Rights [Panduan PBB tentang Kemiskinan Ekstrim dan Hak Asasi Manusia].[7] Adapun yang terakhir menyebutkan secara eksplisit kewajiban Negara pihak terkait dengan koherensi kebijakan serta bantuan dan kerjasama internasional: "Sebagai bagian dari bantuan dan kerjasama, Negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia, yang mencakup di dalamnya adalah menghindari tindakan yang akan menciptakan satu potensi risiko yang melanggar hak asasi manusia dari orang-orang miskin yang tinggal di luar wilayah teritorinya, serta melakukan penilaian dampak terhadap hukum, kebijakan dan praktik yang ekstrateritorial." Hak-hak yang diakui oleh Kovenan EKOSOB termasuk di dalamnya hak atas pekerjaan, "terrmasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini." (Pasal 6 (1), penekanan ditambahkan). Pasal 1(2) dari Kovenan Ekosob juga menegaskan: "Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri."

Berkenaan dengan prinsip-prinsip ODA, pemerintah Belanda baru-baru ini menyatakan dalam Memorandumnya kepada *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) [Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan] pada kebijakan pembangunan Belanda[8] yang "fokus pada kemiskinan dan kelompok yang dipinggirkan" sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan saat ini: "Kebanyakan instrumen kebijakan saat ini ditujukan baik untuk negara terbelakang maupun negara-negara berpenghasilan menengah yang secara khusus ditujukan untuk menguntungkan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Petani, buruh dengan upah yang murah, pemilik usaha kecil, perempuan tanpa akses kredit yang layak, dan masyarakat tanpa akses terhadap air minum yang aman, sanitasi ataupun energy merupakan karakteristik penerima upaya pembangunan Belanda (…).[9]

Selanjutnya, laporan ini mengacu pada kerangka normatif yang digariskan dalam prinsip-prinsip pengelolaan air yang baik, seperti *International Water Ambition* [Sasaran Air Internasional] pemerintah Belanda (*Integrated Water Resource Managementi/*IWRM [Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu] dan prinsip-prinsip pendekatan delta yang komprehensif). OECD juga telah menggariskan sejumlah prinsip tata kelola air yang baik.[10] Pemerintah juga diwakili dalah *High Level Panel on Water*

(HLPW) [Panel Tingkat Tinggi tentang Air] yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia, yang bertujuan untuk meastikan ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua, SDG 6.[11] Komitmen yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan air secara rinci digambarkan dalam Bab 6.

Penelitian untuk laporan ini belum terfokus pada kewajiban sektor swasta berkenaan dengan standar HAM internasional. Sejauh regulasi tentang perusahaan yang telah disebutkan, bagaimanapun, kerangka normatif yang menjadi bisa menjadi penilaian adalah Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM serta Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional yang telah diintegrasikan dengan UNGP.

1.4. STRUKTUR

Bab 2 membahas masalah utama yang saat ini dihadapi oleh Jakarta dan teluknya. Sejak tahun 2011, proyek reklamasi di pesisir yang dilakukan oleh pengembang properti telah membuat area pesisir Jakarta diperebutkan. Pembuatan pulau palsu di dekat garis pantai Jakarta, yang mendahului proyek NCICD namun akan diintegrasikan dalam desain yang ada saat ini, telah mencegah akses nelayan setempat ke wilayah tangkap perikanannya, sehingga mengancam mata pencaharian mereka. Akibatnya, pembuatan pulau palsu sangat ditentang dan telah menghadapi sejumlah gugatan di pengadilan. Selain itu, kota Jakarta menghadapi ancaman banjir yang serius karena amblasan tanah yang akibat ekstraksi air tanah dan menjadi semakin rentan terhadap gelombang tinggi dari laut. Hal ini diperburuk dengan kurangnya sistem pengelolaan air yang cukup dan privatisasi pasokan air di Indonesia sejak tahun 1997, yang telah meningkatkan harga air bagi warga Jakarta sedangkan pemerintah telah gagal untuk memberikan pasokan air bersih yang memadai bagi masyarakat.

Bab 3 menguraikan kerjasama bilateral Belanda-Indonesia dalam isu air dan keterlibatan sektor perairan Belanda di dalamnya. Setelah banjir pada tahun 2007, pemerintah Indonesia meminta Belanda untuk merancang rencana di Teluk Jakarta untuk mengatasi masalah banjir di ibukota. Akhirnya ini mendorong diluncurkannya rencana *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) pada tahun 2014, dikenal sebagai upaya untuk memperkuat tanggul, membangun tanggul laut luar barat dan timur serta proyek pembuatan pulau-pulau menjadi Garuda Megah, yang biayanya diharapkan dari pembiayaan infrastruktur pertahanan pesisir. Bab ini menjelaskan fitur utama dari rencana tersebut, termasuk kasus bisnis NCICD dikembangkan oleh konsorsium bisnis dari Belanda. Hal ini juga menguraikan keterlibatan bisnis Belanda dalam pembangunan pulau-pulau buatan yang kontroversial di Teluk Jakarta, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Keterlibatan Belanda di teluk Jakarta bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah Belanda untuk menciptakan peluang ekspor komersial untuk sektor perairan dan sektor usaha air lainnya yang menjanjikan ke luar negeri. Bab 4 menyoroti berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengerukan Belanda, perusahaan perekayasa air, konsultan teknologi delta dan bisnis maritim yang didukung oleh pemerintah Belanda. Hal ini menjelaskan lebih jauh keterlibatan sektor perairan Belanda di Indonesia dan upaya diplomatik pejabat Belanda untuk mempromosikan industri mereka kepada rekan-rekan mereka di Indonesia.

Bab 5 menguraikan persoalan kritis yang telah disuarakan tentang reklamasi pesisir dan proyek NCICD oleh organisasi masyarakat lokal dan para ahli air. Pertama, akan memperlihatkan dampak dari pembangunan Teluk Jakarta terhadap lingungan dan sumber kehidupan, khususnya masyarakat nelayan. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat membuat pilihan selama fase perencanaan NCICD. Mengatasi amblasan tanah, yang merupakan penyebab utama ancaman banjir Jakarta, kelihatan tidak menjadi prioritas, sementera preferensi yang dipilih adalah

pembangunan infrastruktur skala besar dan pemukiman mewah untuk melindungi kota. Pilihan ini diselaraskan dengan kepentingan bisnis dari sektor perairan Belanda, namun, laporan ini menunjukkan bahwa pilihan ini telah menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang serius. Selanjutnya, bab ini akan melihat lebih dekat pada implimasi dari mega proyek ini, baik dari segi risiko finansial untuk pemerintah Indonesia, serta karakter investor dari pihak swasta yang mungkin tertarik dengan proyek ini.

Bab 6 membahas konteks kebijakan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Ada sejumlah tantangan pemerintahan untuk memenuhi dua prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan NCICD, seperti kebutuhan untuk penilaian dampak lingkungan dan sosial yang mandiri. Pada saat yang sama, ada dua isu yang benar-benar akan menguntungkan penduduk Jakarta: yaitu, berakhirnya amblasan tanah di Jakarta Utara dengan menghentikan penyedotan air tanah dan menciptakan pasokan air yang dapat diandalkan dan terjangkau, serta memperbaiki pengolahan air di Jakarta. Tantangannya berkisar pada tumpang tindihnya kewenangan administrasi dan kurangnya akses terhadap data yang dapat diandalkan hingga penegakan hukum yang lemah serta kurangnya pengembangan kebijakan yang konsultatif dan partisipatif. Untuk memahami beberapa tantangan ini, bab ini menguraikan kerangka kerja IWRM kerangka kerja yang menetapkan prinsip-prinsip manajemen air yang baik yang harus menjadi panduan bagi proyek air internasional seperti NCICD.

Bab 7 merangkum temuan bab-bab sebelumnya dan membuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Belanda, serta menguraikan tuntutan masyarakat sipil Indonesia berkaitan terhadap pemerintahnya.

Bab 2
Teluk Jakarta – Analisis Situasi

2.1. PENDAHULUAN

Teluk Jakarta membentang di sepanjang garis pantai di sisi barat laut pulau Jawa di Indonesia (lihat Gambar 1). Teluk membentuk tepi laut untuk ibukota Indonesia, Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Ibukota Indonesia dan daerah di sekitarnya berada di jantung pembangunan ekonomi yang pesat yang dialami Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merupakan provinsi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Indonesia.[12] Industri finansial dan bisnis jasa di Indonesia terkonsentrai di pusat kota. Garis pantai di Jakarta yang digunakan untuk pengiriman,

berbagai industri, pembangkit listrik, penangkapan ikan dan kegiatan rekreasi.

Gambar 1. Teluk Jakarta
Sumber: DHI Water & Environment, 2011. Area yang hijau menunjukkan hutan yang dilindungi dan yang merah menunjukkan suaka margasatwa Muara Angke

Ledakan ekonomi di Jakarta telah mengakibatkan dampak negatif terhad ap ekosistem di Teluk Jakarta. Perairannya tercemar dengan logam berat dan bahan kimia.[13] Teluk Jakarta yang sebelumnya dikelilingi dengan hutan bakau, namun karena "konversi skala besar hutan bakau untuk budidaya, pertanian dan reklamasi pantai, saat ini hutan bakau yang tersisa di sepanjang Teluk Jakarta hanya tinggal di Muara Angke".[14] Hutan bakau menjaga keanekaragaman hayati, menjadi habitat penting bagi perikanan pesisir dan bekerja sebagai perisai alami terhadap ancaman badai dan tsunami, serta merupakan penyerap karbon yang besar (mereka menyerap karbon lebih banyak daripada yang dilepaskan). Menurut proyek Restorasi Bakau Indonesia, sekitar 90 persen dari hutan pesisir di Teluk Jakarta telah menghilang.[15] *Master Plan* NCICD, akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab berikut ini, menuliskan bahwa "bakau (di Teluk Jakarta) saat ini mengalami beberapa ancaman eksternal, termasuk mutu air yang rendah, limbah padat, pemotongan ilegal, dan terutama amblasan." Hal yang sama terjadi pada terumbu karang yang ada di teluk. Seorang peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi Indonesia (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI) memperkirakan saat ini hanya satu persen dari terumbu karang di Teluk Jakarta akibat pencemaran limbah dari kota Jakarta.[16]

Wilayah Teluk Jakarta juga mengadapi tekanan populasi yang akut sebagai akibat dari perkembangan ekonomi yang pesat ini. Pada tahun 2011, wilayah metropolitan ini menjadi rumah bagi sekitar 28 juta orang. Antara tahun 2000 dan 2015, populasi Jakarta tumbuh dari 8,4 juta menjadi lebih dari 10 juta penduduk. Diperkirakan 16 juta orang akan tinggal di ibukota pada tahun 2020.[17]

2.2. REKLAMASI PESISIR DAN PERLAWANAN

Teluk Jakarta ditandai dengan pemukiman kumuh dan masyarakat nelayan, yang memiliki karakteristik pendapatan rendah, kemiskinan dan marjinalisasi.[18] Untuk mencari nafkah, masyarakat nelayan setempat menjadikan Teluk Jakarta sebagai wilayah penangkapan ikan, atau sebagai jalan lintasan untuk menangkap ikan ke laut yang lebih jauh. Pengembang proyek, bagaimanapun, menganggap tepi laut di Jakarta Utara sebagai lokasi yang menguntungkan untuk properti pemukiman mewah kelas atas

yang akan mengakomodasi warga kelas menengah ke atas di Indonesia yang mendapat keuntungan dari pembangunan ekonomi kota yang demikian cepat. Konflik kepentingan ini telah menghasilkan sejumlah kasus di pengadilan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 2. Pulau buatan yang direncanakan di Teluk Jakarta, dari A hingga Q
Sumber: SHNET/IST[19]

Pada tahun 1995, proposal pertama untuk reklamasi pesisir di Teluk Jakarta diluncurkan oleh Presiden Soeharti melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Rencana itu kemudian dihentikan selama bertahun-tahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, yang atas dasar penilaian dampak lingkungan mengkhawatirkan dampak negatif reklamasi terhadap ekosistem. Pada tahun 2003, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan No. 14 yang menyatakan bahwa reklamasi akan meningkatkan risiko banjir, khususnya di wilayah utara, merusak ekosistem laut dan mengurangi pendapatan rumah tangga nelayan. Proyek ini juga akan membutuhkan sekitar 330 juta meter kubik pasir (untuk wilayah seluas 2.700 hektar) dan diperkirakan akan mengganggu pembangkit listrik Muara Karang di Jakarta Utara. Keputusan tersebut yang kenudian digugat oleh pengembang properti dan pada akhirnya menang di Mahkamah Agung pada tahun 2011. Pemerintah Provinsi Jakarta kemudian mulai mengeluarkan izin untuk pembangunan 17 pulau buatan dalam waktu yang dekat di sepanjang pantai utara Jakarta, mulai dari A hingga Q (lihat gambar 2).[20] Pada tahun 2012, perusahaan pengembang proyek Indonesia PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari Agung Sedayu Grup memulai pembangunan pulau C dan D. Kemudian pada tahun 2014, pengembang proyek PT Muara Wisesa Samudra memperoleh izin untuk pembangunan Pulau G.

PT Kapuk Naga Indah merencanakan pembangunan wilayah pemukiman yang diberi nama *Golf City* sebagai perpanjangan dari pemukiman dengan sistem keamanan ketat di tepi pantai.[21] Selama pembangunan, pulau C dan pulau D dikembangkan menjadi satu pulau yang lebih besar. PT Muara Wisesa Samudra ingin membangun kota gaya baru a la Dubai yang dikenal dengan Pluit City dengan luasan lahan pulau G mencapai sekitar 160 hektar.[22] Selain untuk wilayah pemukiman, di pulau tersebut juga akan dibangun sekolah, kawasan perkantoran dan komersial.

Reklamasi akan diintegrasikan ke dalam desain proyek NCICD. Pembangunan tanggul laut luar di Fase

B dari proyek NCICD (dijelaskan lebih rinci dalam bab berikutnya) akan dikombinasikan dengan pembangunan pulau buatan dalam bentuk Garuda (sebuah burung dalam mitologi), lambang negara Indonesia, di atas sederetan pulau-pulau buatan di sepanjang pesisir Teluk Jakarta. Rancangan saat ini memperkirakan sebuah wilayah dengan luas 1.250 hektar dan rencana pembangunan sebuah kota tepi-laut baru, yang akan dikenal dengan Garuda Megah.

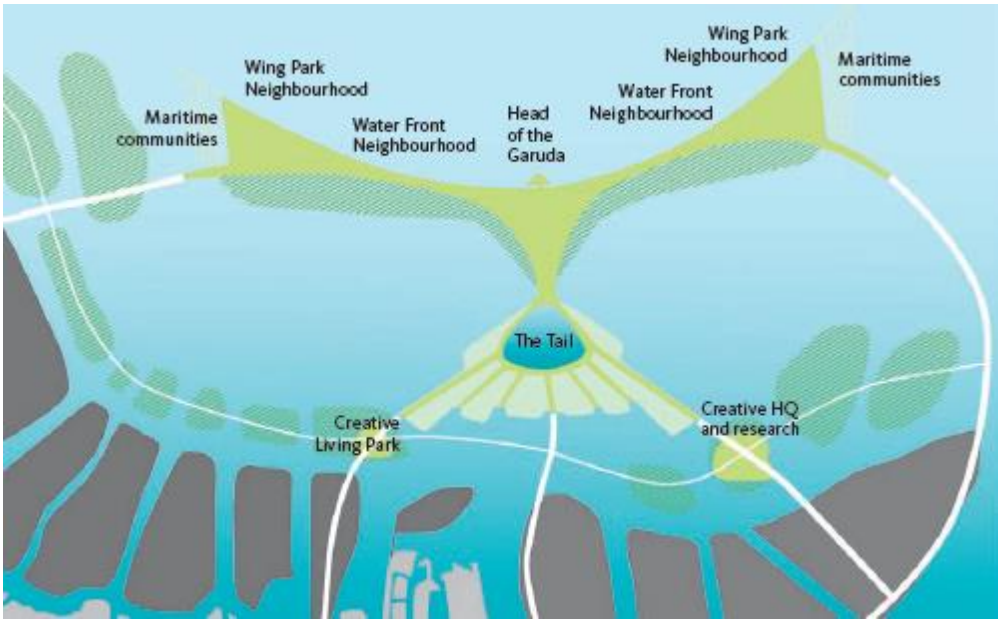

Gambar 3. Garuda Megah
Sumber: PINTEREST[23]

2.2.1. Gugatan hukum oleh nelayan dan hilangnya sumber pendapatan nelayan serta dugaan korupsi

Masyarakat nelayan setempat memulai proses hukum melawan reklamasi pesisir yang direncanakan di Teluk Jakara pada tahun 2015. Nelayan berpendapat bahwa pengembang proyek telah merampas akses mereka ke wilayah tangkap di pesisr dan laut lepas. Nelayan harus berlayar ke jarak yang lebih jauh karena pulau-pulau baru akan menghalangi jalur lintasan mereka, membuat usaha mereka hampir tidak mendapatkan hasil. Kajian cepat yang dilakukan oleh perusahaan konsultan Denmark DHI Water & Environment yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2012, menunjukkan bahwa taksiran kerugian seluas 586,3 hektar wilayah tangkap akan menyebabkan kerugian sebesar 1,36 juta dollar AS (1,06 juta Euro) penghasilan per tahun.[24] Namun, sebuah pusat penelitian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia pada September 2016 memperkirakan bahwa kehancuran ekonomi yang dialami oleh masyarakat nelayan di Jakarta hampir sepuluh kali lipat, sebesar jumlah kerugian tahunan Indonesia yaitu Rp. 137,5 miliar (9,4 juta Euro).[25] Nelayan yang terdampak akibat reklamasi pesisir yang tengah berjalan kehilangan lebih dari ¾ pendapatan bulanan rata-rata mereka, yang menurun dari Rp. 9.609.515 (653 Euro) menjadi Rp. 2.267.655 (154 Euro). Hal ini dikonfirmasi dalam wawancara yang dilakukan oleh Both ENDS bersama dengan nelayan dari kampung Muara Angke di Jakarta, yang melaporkan pendapatan kotor mereka sehari-hari telah menurun dari sekitar Rp. 300.000 (20 Euro) menjadi Rp. 50.000 (3 Euro).[26]

KERUGIAN PENDAPATAN HARIAN (WAWANCARA BOTH ENDS, 2016)				
Mata Uang	Sebelum	Sesudah	% Perubahan	Pecahan

Rupiah	300.000	50.000	-83%	¾
Euro	20,4	3,4		
KERUGIAN PENDAPATAN BULANAN (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2016)				
Mata Uang	Sebelum	Sesudah	% Perubahan	Pecahan
Rupiah	9.609.515	2.267.655	-76%	¾
Euro	653	154		
PERKIRAAN TOTAL KERUGIAN TAHUNAN (DHI WATER, 2012)				
Mata Uang				
Dollar AS (jutaan)	1,36			
Euro (jutaan)	1,06			
PERKIRAAN TOTAL KERUGIAN TAHUNAN (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2016)				
Mata Uang				
Dollar AS (jutaan)	137,5			
Euro (jutaan)	9,4			

TABEL 1: KERUGIAN PENDAPATAN NELAYAN AKIBAT REKLAMASI PESISIR
SUMBER: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DHI WATER, BOTH ENDS

Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia Walhi, yang merupakan bagian dari koalisi masyarakat sipil yang berkampanye untuk menghentikan reklamasi pesisir dan proyek NCICD (Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta), mengkhawatirkan bahwa pasir tambahan yang dibutuhkan untuk pembangunan baru di Teluk Jakarta akan lebih lanjut merusak ekosistem di wilayah lain di Indonesia (lihat Bab 5.2.2.). Pada April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan seorang politisi Jakarta yang diduga telah menyuap Ariesman Widjaja, mantan Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk, induk perusahaan PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan pengembang pulau G.[27] Beberapa minggu kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangguhkan pembangunan pulau C, D dan G karena protes yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dan pendukungnya.[28] Kementerian juga menyimpulkan bahwa analisis dampak pembangunan pulau G dilakukan di atas obyek vital interkoneksi pipa gas bawah laut dan di antara jalur pelayaran, lingkungan yang dilakukan oleh pengembang tidak mempertimbangkan semua dampak.[29] Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak jelas dimana asal mula pasir yang digunakan untuk pembangunan pulau-pulau; untuk pembangunan pulau C dan D pasir yang dibutuhkan lebih dari izin yang diberikan.[30] Pengembang pulau G telah menjawab penulis laporan ini dan mengklarifikasi sumber pasir yang digunakan untuk pembangunan pulau ini kepada kementerian.

Pada April 2016, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia "setuju untuk menunda sementara proyek pembangunan reklamasi pesisir di Jakarta Utara dengan mempertimbangkan tujuh pelanggaran hukum Indonesia yang terjadi sepanjang proses".[31] Pada bulan Mei 2016, pengadilan di Jakarta juga membuat putusan yang mendukung masyarakat nelayan setempat. Putusan ini menyatakan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk pembangunan pulau G harus dibatalkan. Pengadilan mempertimbangkan bahwa, di antara banyak hal lainnya, masyarakat nelayan tidak dilibatkan secara layak dalam proses pengambilan keputusan, padahal pembangunan pulau dapat merusak sumber kehidupannya.[32]

Setelah masyarakat nelayan melakukan protes selanjutnya di jalan Jakarta terhadap rencana reklamasi, Kementerian Koordinator Bidang Maritim mengumumkan pada Juni 2016 bahwa pembangunan pulau G dibatalkan secara permanen. Pembangunan pulau G diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap regulasi dan ancaman bahaya terhadap lingkungan. Menurut

Menteri Koordinator Bidang Maritim, namun ini ditentang oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat.[33] PT Muara Wisesa Samudra menyatakan bahwa perusahaannya selalu mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Koordinator Maritim juga menyatakan bahwa pembangunan pulau C dan D yang dilakukan oleh PT Kapuk Naga Indah juga melanggar peraturan. Pengembang proyek harus mengembalikan pemisahan antara dua pulau dengan membuat kanal yang akan berfungsi sebagai jalur pelayaran dan jalur arus laut. Perusahaan rekayasa Belanda Witteveen+Bos, yang terlibat dalam pembangunan kedua pulau tersebut merespon penulis laporan ini dengan mengklarifikasi bahwa penggabungan kedua pulau tersebut selalu dimaksudkan sebagai syarat sementara. Menteri Koordinator menyimpulkan lebih lanjut, bahwa pembangunan pulau N yang merupakan bagian dari pelabuhan Jakarta juga dilakukan secara tidak layak.

Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli kemudian diganti. Penerusnya cenderung untuk melanjutkan pembangunan ke-17 pulau di Teluk Jakarta.[34] Nelayan juga mengalami kekalahan di Pengadilan Tinggi pada proses banding,[35] namun telah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Selanjutnya, nelayan juga telah memulai proses gugatan di pengadilan untuk pulau F, I dan K.[36]

2.3. ANCAMAN BANJIR

Bersamaan dengan rencana reklamasi pesisir, ancaman banjir merupakan persoalan lain yang menjadi perhatian di wilayah Teluk Jakarta. Wilayah ini rawan banjir karena posisinya di dataran yang lebih rendah dari permukaan laut. Di kota Jakarta sendiri, ke-13 sungai bermuara dan dilepaskan ke laut. Di musim hujan, sungai pun meluap dengan jumlah air yang banyak yang harus dikosongkan ke laut. Pada Februari 2007, 30 hingga 70 persen Jakarta dilaporkan tenggelam karena hujan lebat.[37] Bendungan sungai jebol karena tidak bisa lagi membawa massa air. Ratusan ribu orang meninggalkan rumahnya, mencari perlindungan dari banjir setinggi empat meter di atas permukaan laut. Korban tewas diperkirakan sebanyak 79 orang. Kerugian finansial diperkirakan sejumlah 878 juta dolar berdasarkan laporan dari *Connecting Delta Cities* [Menghubungkan Kota-Kota Delta], suatu sub-jaringan dari C40 *Cities Climate Leadership Group*. Pada tahun 2013, banjir lainnya melanda ibukota Indonesia dan mengakibatkan hilangnya 26 nyawa. Musibah ini membuat kota mengalami kerusakan dengan estimasi senilai 3 miliar dolar.[38]

Banjir di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh aliran sungai, namun juga oleh laut. Masyarakat nelayan di Jakarta seringkali menghadapi pasang laut.[39] Penduduk kampung telah terbiasa hidup dengan kaki yangg terendam air. Pada November 2017, pun, kota Jakarta dilanda banjir rob yang serius. Karena air pasang, tanggul laut diserbu oleh air laut yang menggenangi jalan-jalan selama beberapa hari hingga mencapai puncak 1,5 meter.

Berbagai penyebab yang disebut sebagai faktor meningkatnya ancaman banjir Jakarta dihadapi. Karena serapan air di daratan telah digantikan menjadi wilayah pemukiman, kapasitas penyerapan air pun mengalami penurunan. Pemukiman di tepi sungai juga menghambat aliran air. Saluran air juga dihalangi oleh limbah, sampah dan lumpur. Kondisi yang buruk dari tanggul laut di sekitar Teluk Jalarta membuat kota menjadi lebih rentan terhadap gelombang pasang dari laut. Perubahan iklim meningkatkan ancaman ini. Permukaan laut di Teluk Jakarta diperkirakan akan meningkat sebanyak 0,5 cm per tahun sebagai akibat perubahan iklim.[40]

2.2.1. Amblasan tanah

Faktor terbesar yang berkontribusi terhadap ancaman banjir, bagaimanapun, adalah amblasan tanah di Teluk Jakarta. Ibukota Indonesia akan tenggelam dengan rata-rata amblasan tanah yang terjadi mencapai 7,5 cm[41] per tahun, di beberapa tempat hingga mencapai 17 cm. Salah seorang ahli hidrologi

di Indonesia akhir-akhir ini bahkan memperkirakan bahwa Jakarta semakin menurun rata-rata 10-11 cm per tahun.[42] Amblasan tanah merupakan penyebab utama dari meningkatnya ancaman banjir di teluk. Selama lebih dari 3 dekade Jakarta telah jeblok hingga 4 meter. Konsekuensinya, 40 persen dari ibukota saat ini ada di bawah permukaan laut.[43]

Jakarta Utara khususnya telah menjadi sangat rentan terhadap banjir akibat amblasan tanah, bukan hanya karena air pasang yang datang dari laut tapi juga karena curah hujan yang mengalir ke area yang terendah di Jakarta. Debit sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta juga merupakan masalah yang terus berkembang, seperti sungai-sungai yang tenggelam di bawah permukaan laut bersama dengan tanah. Di beberapa titik sungai, air yang dibawa sudah harus dipompa ke teluk.[44]

Ada empat faktor yang berkontribusi terhadap amblasan tanah di Jakarta, antara lain:

- Penyedotan air tanah yang berlebihan;
- Teknanan dari bangunan dan gedung-gedung;
- Konsolidasi tanah alluvium yang terjadi secara alami
- Kegiatan tektonik

Persentase dari faktor-faktor tersebut bervariasi berdasarkan berbagai macam studi yang berbeda. Pada tahun 2007, Dinas Pertambangan Jakarta memperhitungkan bahwa 80 persen dari amblasan tanah yang terjadi di kota disebabkan oleh pembangunan gedung yang berisiko tinggi, 17 persen oleh ekstraksi air tanah dan 3 persen disebabkan oleh alam.[45] Laporan lainnya oleh Dinas Pertambangan Jakarta juga menunjukkan bahwa pembangunan gedung pencakar langit di Jakarta dalam beberapa dekade terakhir telah berkontribusi terhadap amblasan tanah.[46]

Sebagian besar literatur akademik, pun, mengidentifikasi penyedotan air tanah sebagai penyebab utama dari amblasan tanah. Peneliti dari Institut Teknologi Bandung, yang telah meneliti amblasan tanah di Jakarta selama lebih dari satu dekade, menampilkan analisis teknis dalam diskusi kelompok terpadu yang diselenggarakan oleh Deltares di tahun 2015,[47] mmenyebutkan sejauh mana faktor-faktor yang berbeda tersebut berkontribusi terhadap terjadinya amblasan tanah. Temuan ini dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan analisis mereka, faktor terpenting yang berkontribusi terhadap amblasan tanah adalah pembebanan air tanah (nyaris 50 persen) dan pembebanan yang disebabkan oleh bangunan dan gedung (31 persen, berjudul Efek Pembebanan di tabel 2).

	EFEK PEMBEBANAN BANGUNAN	EFEK TEKTONIS	EFEK TAK DIKENAL	EFEK PENARIKAN AIR TANAH BERLEBIH
Muara Baru **total amblasan 15,0 cm/tahun**	2,5 cm (16%)	0,0 cm (0%)	2,5 cm (16%)	10,0 cm (68%)
Cengkareng Barat **total amblasan 8,7 cm/tahun**	2,0 cm (23%)	0,0 cm (0%)	2,0 cm (23%)	4,7 cm (54%)
Ancol **total amblasan 5,4 cm/tahun**	2,0 cm (37%)	0,0 cm (0%)	1,5 cm (27%)	1,9 cm (36%)
Jakarta Pusat **total amblasan 2,9 cm/tahun**	1,0 cm (34%)	0,0 cm (0%)	0,5 cm (17%)	1,4 cm (49%)
Kelapa Gading	1,5 cm (25%)	0,0 cm (0%)	1,0 cm (17%)	3,4 cm (58%)

total amblasan 5,9 cm/tahun				
Cibubur **total amblasan 1,8 cm/tahun**	1,5 cm (55%)	0,0 cm (55%)	0,5 cm (27%)	0,3 cm (18%)

TABEL 2: % FAKTOR PENYEBAB AMBLASAN TANAH DI WILAYAH JAKARTA
RATA-RATA EFEK DARI AIR TANAH = 47%, SUMBER: ANDREAS 2013, (DIKUTIP DARI ANDREAS ET AL., 2015, LIHAT FOOTNOTE 51)

2.3.2. Penyebab penyedotan air tanah

Di Indonesia, penduduk dan sektor usaha lebih memilih menggunakan air tanah ketimbang sumber lain yang berkelanjutan, seperti air perpipaan atau air yang dipermukaan untuk waktu yang lama dengan sejumlah alasan. Termasuk didalamnya adalah tidak mencukupinya layanan air perpipaan, dan fakta bahwa air tanah lebih murah karena tidak cukup diregulasi. Berdasarkan World Health Organization (WHO)/UN Children's Fund (UNICEF) Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation, sebanyak 67 persen dari penduduk kota Jakarta bergantung pada air tanah dan hanya 26 persen yang menggunakan air ledeng.[48] Privatisasi pasokan air terlah menjadikan harga air meningkat, seiring dengan kurangnya pasokan air perpipaan, telah menjadikan ketergantungan terhadap air tanah terus berlanjut, memperburuk masalah amblasan tanah. PAM Jaya – perusahaan layanan air yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jakarta yang bertanggungjawab untuk memproses air permukaan, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta. Di atas kertas, cakupan layanan air di Jakarta adalah 59,09 persen. Namun, pada kenyataannya lebih rendah ketika dibandingkan antara produksi air minum dan kebutuhan akan air. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi Indonesia Amrta Institute for Water Literacy, dengan penduduk sebanyak lebih dari 10 juta dan 3 juta lainnya adalah penglaju, kebutuhan air di ibukota sangatlah tinggi. Di tahun 2015 sendiri, kota Jakarta membutuhkan setidaknya 950 juta meter kubik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, usaha dan komersil. Layanan air perpipaan yang menggunakan air permukaan yang bersumber dari PAM Jaya dan operatornya hanya mampu menyediakan 331 juta meter kubik, atau sekitar 35 persen dari total kebutuhan, sementara 65 persen sisanya diambil dari air tanah karena sungai dan sumber air lainnya di Jakarta tidak bisa digunakan langsung untuk menyediakan kebutuhan air bersih penduduk Jakarta.[49] Peningkatan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi dan industri akan meningkatkan kebutuhan akan air, dan bersamaan dengan ketidakmampuan perusahaan layanan air untuk menyediakan pasokan untuk kebutuhan air yang mencukupi telah membuat eksploitasi air tanah yang luar biasa besar.

2.3.3. Privatisasi Pasokan Air

Pasokan air minum Jakarta selama 18 tahun terakhir telah diprivatisasi. Pada tahun 1997, kontrak konsesi antara PAM Jaya dan dua operator swasta ditandatangani. Masing-masing operator diberikan kendali setengah bagian dari kota: bagian barat dilayani oleh (Suez) Palyja dan bagian timur oleh (Thames) Aetra. Menurut aktivis air di Jakarta,[50] perusahaan itu gagal untuk memenuhi kewajibannya memperluas dan meningkatkan pasokan air bagi penduduk Jakarta, memasang tarif yang mahal dan menjebak otoritas publik dalam utang yang sangat besar, sementara perusahaan sangat diuntungkan. Meskipun layanannya sangat buruk, warga Jakarta harus membayar tarif air yang sangat mahal. Pada saat awal konsesi di tahun 1997, rata-rata tarif air di Jakarta adalah Rp. 1.700/m^3. Terus meningkat dengan cepat dan rata-rata tarif air di tahun 2012 adalah Rp. 7.020/m^3; meningkat secara signifikan jika dibandingan dengan kota besar lainnya di Indonesia (lihat Tabel 3).[51] Dalam praktik konsesi, tarif terdiri dari sistem penarifan berganda yang seringkali dikenal sebagai system tarif yang bertautan. Tarif aktual dikenakan kepada pengguna air setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, dan biaya yang lebih tinggi untuk penyediaan layanan dibayar oleh PAM Jaya kepada perusahaan. Biaya ini mencakup angka pengembalian investasi yang dijamin dan biaya pengelolaan, serta merupakan gabungan sumber keuntungan bagi swasta pemegang konsesi, terlepas dari kinerja mereka sistem

pengisian ini membuat air perpipaan di Jakarta lebih mahal dibandinkan dengan kota-kota lain di Indonesia.

KOTA	TARIF (PER M^3)
Jakarta	Rp. 7,020
Surabaya	Rp. 2.600
Medan	Rp. 2.294
Bekasi	Rp. 2.300
Makassar	Rp. 2.000
Semarang	Rp. 2.600

TABEL 3: PERBANDINGAN RATA-RATA TARIF AIR DI KOTA-KOTA DI INDONESIA (2012)

SUMBER: 1,2,4: TRIBUNNEWS (31.1.2012); 3: BISNIS INDONESIA (24.9.2012); 5: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM; 6: OKE ZONE (10.52012); DIOLAH DARI ZAMZAMI & ARDHIANIE, 2015.

2.3.3. Pembebanan dari Gedung dan Pembangunan

Faktor sentral lainnya yang berkontribusi terhadap amblasan tanah Jakarta adalah pembebanan dari gedung-gedung, khususnya yang menjulang tinggi. Sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pertambangan Jakarta telah mengidentifikasi hal ini sebagai masalah yang signifikan untuk Jakarta dan peneliti dari Jakarta mengkalkulasi bahwa pembebanan telah mendorong terjadinya amblasan antara 1 hingga 2 cm per tahun (lihat tabel 2). Persoalan pembebanan cenderung meningkat di tahun-tahun mendatang, mengingat Jakarta sedang menghadapi urbanisasi dan sentralisasi modal serta penduduk.[52] United Nations Development Programme (UNDP) melaporkan bahwa, antara tahun 1980 dan 2015, persentase penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan telah meningkat dari 22,1 persen menjadi 53,7 persen.[53] Kegiatan bisnis dan pengembangan infrastruktur bersama dengan pemukiman mewah sangat terkonsentrasi di Indonesia,[54] meskipun ada upaya desentralisasi.[55] Bab berikutnya menjelaskan rencana yang dikembangkan oleh konsorsium bisnis Belanda untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam. Konsorsium ini mengusulkan untuk membangun sebuah tanggul laut besar di Teluk Jakarta yang akan melindungu ibukota dari ancaman banjir, dan pemukiman mewah di pulau buatan yang akan meningkatkan kawasan bisnis Jakarta. Di bab 5 kita akan melihat bahwa rencana tersebut tidak menawarkan solusi terhadap masalah amblasan tanah, karena akan menambah beban di Jakarta dan karena tidak mengatasi penyebabnya, yaitu penyedotan air tanah dan pasokan air yang buruk.

Bab 3
Keterlibatan Belanda di Teluk Jakarta

3.1. *MASTER PLAN* NCICD

Pada tahun 2001, pemerintah Belanda menandatangani Nota Kesepahaman dengan Indonesia dalam hal persoalan air, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2012 dan 2015.[56] Setelah banjir parah pada tahun 2007 di Jakarta, pemerintah Indonesia, dalam kerangka kerjasama yang erat ini terkait persoalan air, meminta Belanda untuk lebih jauh lagi membantu dalam mengatasi ancaman banjir. Pemerintah Belanda memutuskan untuk membiayai rancangan dan pengembangan *Master Plan National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD). Setelah sejumlah kajian strategis, yang berjudul *Jakarta Coastal Defense* (kemudian ditambahkan

Development) *Strategy* [Strategi (Pembangunan) Pertahanan Pesisir Jakarta].[57] Sebuah konsorsium yang terdiri dari perusahaan teknik dan konsultan[58] menyajikan rencana NCICD. Di tahun 2014, pemerintah Indonesia mengadopsi Fase A NCICD. Di tahun 2015, pemerintah Korea Selatan bergabung dalam proyek ini sebagai mitra ketiga, menghasilkan kerjasama tiga pihak dalam proyek. Kemudian di tahun 2016, Indonesia, Belanda dan Korea Selatan menandatangani *Letter of Intent*, yang menyepakati kerjasama dengan pendekataan yang terkoordinasi untuk implementasi *Master Plan* NCICD.[59]

Seperti yang akan dijelaskan di Bab 5, *Master Plan* disusun berdasarkan asumsi bahwa tenggelamnya Jakarta tidak bisa dihentikan segera untuk melindungi kota dari ancaman banjir. Sehingga rencana ini hanya mempertimbangkan 3 prinsip solusi jangka panjang: menelantarkan Jakarta Utara; solusi di darat dengan penguatan tanggul; dan solusi lepas pantai. Ketiga ini adalah pilihan drastis dalam hal perencanaan kota dan dampak sosial ekonomi. Penelantaran Jakarta Utara akan melibatkan relokasi sejumlah 4,5 juta orang dan dengan demikian pilihan ini tidak dieksplorasi secara serius. Penguatan tanggul di darat dianggap tidak layak karena kebutuhan relokasi penduduk yang sangat besar dan retensi waduk, sehingga pada dasarnya rencana ini menyajikan solusi lepas pantai sebagai yang paling memungkinkan: "Solusi lepas pantai merupakan solusi yang paling kuat. Selain itu, solusi ini menawarkan banyak kemungkinan untuk menciptakan nilai tambah bagi kota dan sumber pendanaan melalui reklamasi pesisir."[60]

Pilihan ini dipilih meskipun ada sejumlah tantangan serius untuk membuatnya berhasil, seperti peningkatan mutu air secara drastis, kebutuhan investasi finansial yang besar, serta penanggulangan amblasan tanah, tantangan yang diuraikan secara rinci seperti berikut: "Solusi lepas-pantai ini terdiri atas tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta yang menciptakan danau pemompaan yang sangat luas (waduk raksasa) yang terletak di lepas pantai. Dengan menggabungkan tanggu laut dengan reklamasi lahan, pertahanan laut yang tangguh dan tidak bisa dibobol dapat dibuat. Danau penahan yang ada di belakang tanggul ini akan memiliki muka air yang lebih rendah yang akan mempermudah aliran alami sungai-sungai yang membelah Jakarta. Instalasi pemompaan akan mempertahankan muka air di danau retensi ini cukup redah. Akan tetapi, alternatif ini menimbulkan tantang baru. Untuk mewujdukan mutu air yang diizinkan di dalam waduk raksasa ini, polusi pada sungai harus dikurangi kira-kira sebesar 75 persen. Pembuatan pengumpul air selokan dan sistem pengolahannya di wilayah pesisir Jakarta harus lebih dipercepat.[61] Proyek NCICD adalah proyek 'raksasa' dalam semua aspek. Tidak hanya tanggul laut 'raksasa' yang perlu dibangun (dengan panjang lebih dari 35 km di perairan dengan kedalaman lebih dari 15 meter), tetapi juga sanitasi air yang perlu diperbaiki di daerah metropolitan yang terus berjuang menghadapi urbanisasi yang cepat dalam skala besar. Dalam jangka pendek ribuan rumah tangga di sekitar tanggul laut dan tanggul sungai yang berdekatan perlu dipindahkan demi memungkinkan untuk pembangunan pertahanan banjir dalam waktu dekat. Hal itu bukan tugas yang mudah di sebuah kota yang telah mengalami kelebihan penduduk. Selain itu ada berbagai macam isu yang harus ditangani, seperti masa depan masyarakat nelayan dan pelabuhan perikanan, pelabuhan utama Tanjung Priok (pelabuhan terbesar di Indonesia), tiga pembangkit listrik di pesisir yang ada saat ini dan situs mangrove yang dilindungi.[62] Dalam bagian lain di dokumen ini, dinyatakan bahwa: "dalam setiap skenario adalah penting untuk menghentikan penyebab meningkatnya risiko banjir dan mengurangi amblasan tanah"[63] NCICD dibagi menjadi tiga fase yang berbeda (lihat Gambar 4):[64]

Fase A: Perlindungan pantai yang ada saat ini di sepanjang Teluk Jakarta diperkuat dan ditinggikan. Penguatan ini direncanakan untuk melindungi Jakarta terhadap pasang dari laut sampai dengan tahun 2030. Realisasinya direncanakan untuk tahun 2018.

Fase B: Terletak di bagian barat Teluk Jakarta, sebuah tanggul laut luar akan dibangun bersama dengan sebuah kota tepi-laut yang baru. Rencana ini akan direalisasikan pada tahun 2025.

Fase C: Pembangunan tanggul laut luar di wilayah timur Teluk Jakarta. Realisasinya direncanakan pada tahun 2040. Tanggul laut luar akan memiliki panjang total 24 meter di bagian terdalam teluk. Tanggul akan mencapai 7,7 meter di atas permukaan laut.[65] Rencana NCICD menjamin bahwa tanggul laut raksasa akan melindungi Jakarta hingga tahun 2080 dari ancaman banjir rob.[66]

Antara tanggul laut dan pantai, satu atau dua waduk air besar akan dibuat di Teluk Jakarta. Mereka akan digunakan untuk penyimpanan curah hujan yang berlebihan dan aliran air dari sungai. Air di waduk retensi ini akan disimpan pada tingkat yang rendah, sehingga tidak akan ada masalah dengan aliran sungai ke Teluk Jakarta. Dari danau, air akan dipompa ke laut. Presiden Joko Widodo mengumumkan di bulan April 2016 bahwa proyek reklamasi pesisir yang digambarkan pada Bab 2.2. akan diintegrasikan dengan rencana NCICD.[67] Dalam pertemuan dengan masyarakat sipil Indonesia yang menolak NCICD (di tengah misi perdagangan Belanda di Indonesia pada November 2016), Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda mengindikasikan bahwa Belanda akan meneruskan keterlibatannya dalam proyek NCICD.[68]

GAMBAR 4: TIGA FASE RENCANA NCICD
*A: tanggul, B: tanggul laut barat dan kota tepi laut, C: tanggul laut timur
SUMBER: PEMERINTAH BELANDA, TENDER NCICD

3.1.1. Perhitungan Biaya Finansial

Saat *Master Plan* NCICD dipublikasikan pada Desember 2014, total biaya yang diperkirakan sejumlah setidaknya 26,5 juta miliar dollar AS (lihat Tabel 4). Witteveen+Bos yang mengkoordinasikan proyek NCICD untuk konsorsium bisnis Belanda, menyatakan bahwa implementasi dari rencana ini diperkirakan senilai sekitar 10-40 miliar dollar.[69]

AREA	NOMINAL BIAYA	NOMINAL BIAYA PERAWATAN

	PEMBANGUNAN	
Perlindungan banjir	6.736.590.331	2.345.026.691
Transportasi	5.039.992.267	1.159.198.221
Reklamasi pesisir	8.929.487.585	1.026.855.310
Pelabuhan	829.400.000	99.528.000
Khusus (operasionalisasi laguna)		292.195.200
TOTAL	21.535.370.183	4.922.803.422

TABEL 4: PROPOSAL BIAYA NCICD
SUMBER: MASTER PLAN NCICD, H. 64

Dari bacaan kami terhadap *Master Plan,* kami berkesimpulan bahwa perhitungan ini tidak mencakup:

- Biaya untuk memenuhi pra kondisi untuk keberhasilan NCICD (pengolahan air dan pasokan air perpipaan untuk mengakhiri ekstraksi air tanah)
- Biaya finansial sebagai kompensasi terhadap nelayan untuk kehilangan wilayah tangkap dan akses melaut
- Biaya perawatan tahunan yang muncul setelah tahun 2050.

3.1.2. Pembiayaan melalui penjualan pemukiman mewah kepada pihak swasta

"Pembiayaan perlindungan banjir denan pembangunan perkotaan dan sumber pendapatan, sebaiknya dikembangkan oleh perusahaan swasta, merupakan salah satu dari prinsip proyek."[70] Usulan itu sendiri berisikan kasus bisnis, di mana penjualan tanah dalam bentuk pulau baru akan menutupi biaya pembangunan proyek, termasuk langkah-langkah untuk mengamankan dari banjir. *Master Plan* juga merencanakan wilayah rekreasi dan sebuah pelabuhan baru. Kasus bisnis memperkirakan bahwa, selain penjualan pemukiman mewah, pendapatan juga akan dihasilkan dari pembangunan jalan tol dan operasi di pelabuhan baru (lihat Tabel 5 untuk gambaran dari pendapatan yang diusulkan dan Tabel 6 untuk spesifikasi pendapatan yang diusulkan dari pemukiman mewah).

	Area	Nilai nominal biaya pengembangan	Nilai nominal biaya pemeliharaan	Nilai nominal pendapatan	Hasil NPV
1	Perlindungan banjir	(6.736.490.331)	(2.345.026.691)	-	(10.303.118.244)
2	Transportasi	(5.039.992.267)	(1.159.198.221)	4.407.087.360	(968.518.230)
3	Reklamasi lahan	(8.929.487.585)	(1.026.855.310)	22.633.635.995	13.495.418.969
4	Pelabuhan	(829.400.000)	(99.528.000)	2.369.600.000	1.357.007.500
5	Spesial (operasional laguna)		(292.195.200)	-	(222.626.363)
	Total	*(21.535.370.183)*	*(4.922.803.422)*	*29.410.323.355*	*3.358.163.631*

TABEL 5: KASUS BISNIS NCICD: BIAYA DAN PENDAPATAN DALAM PROPOSAL
SUMBER: MASTER PLAN NCICD, H. 64.

Sebagaimana disebutkan pada Bab 2.2, sebagai bentuk pemasukan umum, pembangunan dari tanggul laut luar barat akan dikombinasikan dengan pembangunan pulau buatan baru melalui reklamasi pesisir. Pulau tersebut memiliki area seluas 1.250 hektar dan cukup luas untuk pembangunan kota tepi-laut baru, yang disebut sebagai Garuda Megah (lihat Gambar 2 di Bab 2.2), yang mana 45 persen (23,7 juta meter persegi) akan digunakan untuk pemukiman mewah.[71, 72] Pemukiman mewah mencakup perumahan bagi kelompok dengan pendapatan yang berbeda dan pusat kawasan bisnis yang akan mencakup 44 persen area yang siap dibangun dan diharapkan

menghasilkan pendapatan.[73] Logo yang dikembangkan untuk NCICD (lihat Gambar 5) menunjukkan pentingnya pengembangan pemukiman mewah dalam *Master Plan*. Ketimbang menampilkan tanggul laut atau referensi untuk perlindungan banjir, rencana ini berfokus pada bangunan bertingkat tinggi.

GAMBAR 5: LOGO NCICD DENGAN GEDUNG-GEDUNG TINGGI MENJULANG
SUMBER: HALAMAN WEB NCICD

Garuda Megah direncanakan akan terhubung dengan daratan utama dengan jalur kereta, jaringan jalan utama dan jalan bebas hambatan, hal ini dianggap dapat meringankan kemacetan lalu lintas Jakarta yang sangat terkenal.

Reklamasi lahan	1.080	ha
Yang dapat dibangun	**45,0%**	
Total ground floor	4.860.000	sqm

Real estat	Lahan yang dapat dibangun	Relatif	Harga lahan / m2	Total pendapatan
Perumahan		**69,3%**		**7.207.100.945**
1 Perumahan (CBD)	425.250	8,8%	12.215	5.194.343.700
2 Perumahan (Kelas atas)	243.000	5,0%	2.791	678.174.120
3 Perumahan (kelas menengah)	1.727.325	35,5%	720	1.243.907.189
4 Perumahan (kelas bawah)	972.000	20,0%	93	90.675.936
Perkantoran		**14,8%**		**11.393.565.300**
5 Perkantoran (CBD)	425.250	8,8%	24.570	10.448.392.500
6 Perkantoran (Kelas atas)	291.600	6,0%	3.241	945.172.800
Ritel		**4,0%**		**3.869.673.750**
7 Ritel (Premium)	70.875	1,5%	47.210	3.346.008.750
8 Ritel (Kelas atas)	121.500	2,5%	4.310	523.665.000
Industri		**12,0%**		**163.296.000**
9 IIndustri	583.200	12,0%	280	163.296.000
10 ...	0	0,0%		0
Total	**4.860.000**	**100,000%**	**4.657**	**22.633.635.995**

TABEL 6: KASUS BISNIS NCICD: PERKIRAAN PENDAPATAN DARI KOMPLEKS PEMUKIMAN SECARA UMUM
SUMBER: MASTER PLAN NCICD, H. 62.

Pemerintah Belanda mengklaim bahwa sebuah "konsep unik" akan dikembangkan. Rencana ini bertujuan untuk mencapai saham dari sektor swasta lebih dari 70 persen. Sehingga investor dari Indonesia dan luar negeri akan berusaha untuk menaruh uang mereka dalam pembangunan pemukiman mewah, jalan tol dan perluasan pelabuhan untuk membiayai langkah-langkah keamanan banjir. Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, "dalam posisi memimpin, menjaga tanggungjawab utama dan akuntabel kepada para pembangku kepentingan".[74] Konsorsium bisnis Belanda yang mengembangkan NCICD menyatakan bahwa pembiayaan swasta adalah harapan yang berbeda dari Kementerian Negara Perencanaan Nasional.[75] Di Bab 7 kita akan mendiskusikan risiko yang akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia.

3.2. Keterlibatan bisnis Belanda dalam reklamasi pesisir di Teluk Jakarta

Bisnis Belanda yang mengambil bagian dalam konsorsium yang mengembangkan NCICD juga

terlibat dalam konstruksi reklamasi pesisir di Teluk Jakarta dalam jarak yang pendek dari pinggir pantai, yang diloloskan oleh Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2011, dan akan diintegrasikan dengan rancangan NCICD. Witteveen+Bos dan Royal HaskoningDHV merupakan perusahaan yang dikontrak untuk memberikan saran teknik oleh PT Kapuk Naga Indah, pengembang pulau C dan D. Sebagaimana disebutkan dalam Bab 2.2.1, pembangunan kedua pulau ini dihentikan pada April 2016 untuk beberapa bulan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konsultan Royal Haskoning DHV dibayar oleh pengembang properti PT Muara Wisesa Samudra untuk jasanya terkait dengan pembangunan pulau G.[76] Sebagaimana disebutkan dalam Bab 2.2.1, reklamasi pulau G juga dihentikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta putusan pengadilan. Witteveen+Bos dan Royal Haskoning merespon dengan meninjau laporan ini dan menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam prosedur atau pasokan pasir untuk konstruksi pulau C, D, dan G, namun hanya menyediakan supervisi dan asistensi teknis untuk konstruksi pulau-pulau tersebut.[77]

Di awal tahun 2015, PT Muara Wisesa Samudra memenangkan kontrak atas dua perusahaan pengerukan Boskalis dan Van Oord untuk merancang dan membangun pulau buatan untuk Pluit City (pulau G). Kontrak senikai 350 juta Euro (setiap mitra berbagi sebanyak 50 persen) dan akan melibatkan "reklamasi sekitar 160 hektar lahan baru yang membutuhkan lebih dari 20 juta meter kubik pasir yang dikeruk. Dua kapal keruk jumbo pengangkut pasir akan dikerahkan untuk mengeruk dan aktivitas pengerukan pasir reklamasi dari wilayah sewaan".[78] Pada tahun 2015, Deltares, sebuah lembaga dari Belanda yang melakukan penelitian lapangan tentang air dan di bawah permukaan, memenangkan tender melalui konsorsium Van Oord-Boskalis untuk menilai dan menyempurnakan pertahanan pesisir melalui pengujian model fisik.

Perusahaan pengerukan Van Oord juga terlibat dalam proyek reklamasi pesisir melalui perusahaan pengembang properti Indonesia PT Kapuk Naga Indah (pulau C dan D). Di tahun 2012, perusahaan Indonesia memberikan Van Oord sebuah kontrak pembangunan pulau D senilai 100 juta Euro.[79]

Pada April 2015, Boskalis menerima jaminan ekspor kredit dari lembaga ekspor kredit Atradius, senilai hingga 209,4 juta Euro dan mencakup risiko finansial non-pembayaran.[80] Karena kontrak antara pemerintah Belanda dan para eksportir tidak dipublikasikan, maka tidak jelas apakah jaminan yang diberikan juga mencakup risiko untuk Van Oord.

Penting untuk dicatat bahwa aktivitas pengerukan telah menjadi hal yang dikritik di Indonesia: media di Indonesia melaporkan bahwa kapal *Queen of the Netherland*, yang dimiliki oleh perusahaan pengeruk Boskalis, diduga tidak memiliki izin yang benar ketika mengeruk pasir untuk pembangunan pulau G di Teluk Jakarta yang dilakukan di pantai di provinsi tetanga Jakarta, yaitu Banten. Berdasarkan laporan media, kapal itu disewa oleh pengeruk lokal.[81]

Boskalis dan Van Oord menjawab versi draf laporan ini dan mengklaim bahwa semua aktivitas yang mereka lakukan telah mendapatkan izin. Sebagaimana digambarkan pada Bab 5.2., pembuatan pulau palsu C dan D di Teluk Jakarta telah menimbulkan keberatan dari Kepulauan Seribu, sebuah kawasan perairan yang dilindungi dekat dengan Teluk Jakarta, telah rusak akibat penambangan pasir ilegal.[82] Sebuah kapal pengerukan bernama Cristobal Colon, yang dimiliki oleh perusahaan Belgia Jan De Nul dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk pengerukan oleh polisi dan nelayan setempat, berdasarkan investigasi yang diterbitkan oleh majalah TEMPO.[83] Jan De Nul tidak menjawab permintaan untuk meninjau laporan ini.

3.3. Keterlibatan Belanda di pelabuhan Jakarta

Bisnis Belanda juga terlibat dalam perluasan Tanjung Priok, sebuah pelabuhan di Jakarta. Perusahaan pengeruk Van Oord telah dikontrak oleh badan usaha milik negara Indonesia yang merupakan operator pelabuhan, Pelindo untuk pembangunan pulau N di Teluk Jakarta. Proyek ini bertujuan untuk memperluas pelabuhan hingga tiga kali lipat. Selanjutnya Pelindo menentukan Royal HaskoningDHV sebagai konsultan yang memimpin untuk mengawasi tahapan pertama dari proyek ini.[84] Pada Juli 2016, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Republik Indonesia menyimpulkan bahwa pulau ini dibangun secara tidak layak karena tidak sesuai dengan rancangan awal.[85]

Pada Oktober 2015, pejabat Indonesia dan delegasi Belanda bertemu di Jakarta untuk merancang kasus bisnis untuk lokasi pelabuhan baru di Teluk Jakarta.[86] Mereka merencanakan fasilitas pelabuhan baru dan zona industri pada 3 dari 7 pulau buatan di pesisir, yaitu pulau O, P, dan Q. Kasus bisnis yang disebut sebagai *Port of Jakarta* inisiatif yang dikembangkan dengan kehadiran pejabat pemerintah Belanda, dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkgungan Hidup beserta beberapa lembaga pemerintahan Belanda.[87] Masukan dari Belanda juga datang dari perusahaan teknik Royal Haskoning DHV, Witteveen+Bos dan Arcadis, dari perusahaan konstruksi Strukton dan BAM, dari perusahaan pengerukan Boskalis dan Van Oord serta dari Rabobank.

Bab 4
Mempromosikan sektor perairan Belanda

4.1. Sektor perairan unggulan

Situs resmi dari sektor perairan Belanda menginformasikan kita bahwa “Sejak abad pertengahan dan setelahnya, kami telah mereklamasi dan mempertahankan tanah dari lautan”.[88] Sektor ini menggunakan bentuk pengetahuan Belanda yang bersejerah dalam hal isu air untuk mempromosikan bisnisnya ke luar negeri. Hal ini pun berhasil meningkatkan ekspornya sejak tahun 1994 banyak sekali (lihat Gambar 6).

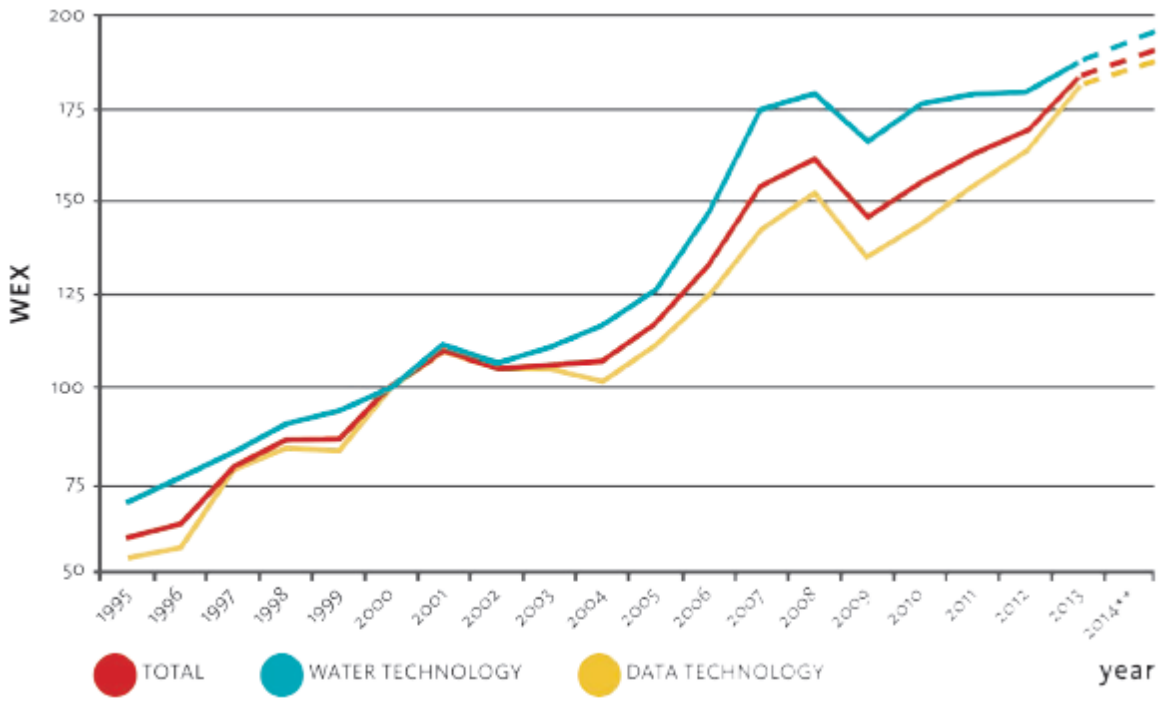

Gambar 6: Peningkatan Ekspor dalam Sektor Perairan Belanda sejak tahun 1994 (2000=100)
Sumber: PANTEIA, 2015,[89] WEX: WATER SECTOR EXPORT INDEX

Pemerintah menganggap industri sebagai salah satu pokok yang penting dalam inovasi komersil, dan sektor perairan didefinisikan sebagai salah satu dari sembilan sektor unggulan yang dipromosikan dalam diplomasi ekonomi pemerintah serta agenda pembangunan dan bantuan. Secara langsung ataupun tidak langung, pemerintah Belanda mengalokasikan 118 juta Euro untuk penelitian dan pembangunan di sektor perairan antara 2016 dan 2017.[90] Pemerintah juga berpartisipasi dalam *Netherlands Water Partnership* (NWP) [Kerjasama Air Belanda], yang melibatkan lembaga pengetahuan, perusahaan privat dan organisasi masyarakat sipil. Mewakili 3 kementerian Belanda, kerjasama pemerintah-swasta ini mengelola sebuah program yang berjudul "*Partners for Water*" ["Kemitraan untuk Air"], yang menyediakan dana tambahan untuk proyek-proyek internasional yang diinisiasi oleh sektor perairan Belanda.[91] Sejak tahun 2016 hingga 2021, kementerian menghabiskan dana sejumlah 51 juta Euro pada inisiatif yang membantu wilayah delta perkotaan di luar negeri terhadap ancaman banjir, penurunan, sanitasi dan pasokan air bersih. Sebuah prasyarat untuk pembiayaan dari pemerintah Belanda adalah bahwa proyek yang diajukan juga menawarkan prospek untuk "perdagangan, investasi dan kerjasama".[92]

BIAYA/PROGRAM	ANGGARAN DALAM JUTAAN EURO	SEKTOR	PENERIMA MANFAAT
Top Sectro Water	118,4 (2016-2017)	Air	Perusahaan Belanda, lembaga pengetahuan
Partners for Water	51 (2016 – 2021)	Air	Perusahaan Belanda dan Asing, Organisasi Masyarakat Sipil
DRIVE	120 tahunan	Air, Infrastruktur	Perusahaan Belanda dan Asing
Dutch Global Growth Fund	50 tahunan	Air dan lainnya	Belanda dan UKM asing
DHI	4-5 (2016)	Air dan lainnya	UKM Belanda
Partners for International Business	8 tahunan	Air dan lainnya	Kerjasama Belanda (publik dan privat)
Design 2 Build	10 (2015-2016)	Air dan lainnya	Pemerintah asing
Sutainable Water Fund	30 (2016)	Air	Belanda dan kerjasama asing

Tabel 7: Pembiayaan Pemerintah Belanda untuk Sektor perairan

SUMBER: RVO.NL DAN RIJKSOVERHEID.NL

Tabel 7 merangkum program dan pembiayaan Belanda untuk proyek air di luar negeri. Dalam dokumen kebijakan "*International Water Ambitions*" [Sasaran Air Internasional], pengaturan finansial disatukan sebagai program pemerintah Belanda terpadu yang berkontribusi atas realisasi tujuan UN Sustainable Development Goals (SDGs) [Tujuan Pembangunan Berkelanjutan]. Namun, mereka juga harus mendorong ekspor Belanda.[93]

4.1.1. Lembaga kredit ekspor

Dukungan pemerintah bisa menjadi sangat penting untuk bisnis di sektor perairan, khususnya untuk industri pengerukan. Ini adalah industri yang sangat padat modal.[94] Perluasan armada dengan kapal baru membutuhkan investasi yang tinggi dan perawatan harian dari kapal-kapal ini sangatlah mahal. Jika perusahaan pengerukan telah memenangkan sebuah kontrak, mereka tetap akan menghadapi risiko keuangan. Biaya proyek bisa melebihi nilai kontrak, mengubah margin keuntungan menjadi kerugian yang signifikan. Selain itu selalu ada kemungkinan bahwa klien tidak bersedia atau tidak mampu membayar.

Banyak negara yang memiliki *Export Credit Agencies* (ECAs) [lembaga kredit ekspor] dengan dukungan pemerintah, yang mana perusahaan dapat menjaminkan perusahaannya terhadap risiko finansial dalam asuransi, jaminan ataupun kredit ekspor. Bahkan ECA adalah sumber terbesar dukungan finansial publik untuk proyek-proyek di negara berkembang. ECA Belanda adalah Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) – sebuah anak perusahaan dari perusahaan asuransi swasta Spanyol Atradius Grup yang hanya beroperasi sebagai agen untuk pemerintah Belanda dan berada di bawah tanggungjawab Kementerian Keuangan.

Perusahaan pengerukan Belanda Boskalis dan Van Oord adalah dua di antara yang terbesar di dunia. Untuk menutupi risiko keuangan dari operasinya, kedua perusahaan tersebut seringkali didukung oleh Atradius DSB, juga terkait dengan proyek reklamasi pesisir di Teluk Jakarta. Sebagaimana telah disebutkan, di tahun 2015, Boskalis mendapatkan jaminan ekspor kredit untuk jumlah maksimum mendekat 210 juta Euro untuk pembangunan Pluit City (pulau G).[95] Parlemen Belanda ingin meningkatkan kemungkinan bagi sektor perairan untuk mendapatkan ECA lebih jauh.[96] Saat ini 75 persen dari ECAs Belanda diberikan kepada bisnis Belanda di sektor perairan.[97] Tapi ECAs juga kontroversial karena mereka seringkali mendukung proyek berisiko yang ditandai dengan perlawanan dari masyarakat setempat dan berdampak negatif terhadap hak asasi manusia.[98] Operasi perusahaan pengerukan Belanda yang kontroversial diantaranya di Brasil dan Mesir, misalnya, juga mendapatkan dukungan melalui Atradius DSB.[99]

4.1.2. Diplomasi ekonomi

Dukungan pemerintah untuk sektor perairan tidak hanya dibutuhkan untuk menutupi risiko finansial dari operasi di pasar internasional, namun juga diperlukan untuk memenangkan kontrak. Proyek di sektor ini seringkali melalui tender oleh pemerintah nasional atau lokal dan bukan oleh sektor swasra. Untuk mendapatkan akses kepada pengambil keputusan dalam birokrasi asing, bisnis bergantung pada bantuan dari administrasinya sendiri. Saluran diplomatik dapat membuka pintu untuk sektor perairan, jika tidak akan tetap tertutup.

Di tahun 2001, Belanda dan Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman tentang isu air, yang telah diperbaharui pada tahun 2012 dan 2015. Kesepakatan tersebut ditawarkan oleh pejabat tingkat tinggi pemerintah Belanda dalam sebuah forum, Komite Pengarah Bersama, di mana

mereka bisa berbicara dengan rekan-rekan mereka dari Indonesia tentang proyek tentang pasokan air, sanitasi, pertahanan pesisir, penurunan muka tanah, dll. Menurut NWP, pertemuan rutin ini menghasilkan "peluang bisnis baru".[100]

Anggota kabinet Belanda juga seringkali bertemu dengan rekan-rekan mereka dari Indonesia untuk membahas masalah air. Pada November 2013, Perdana Menteri Mark Rutte, sebagai Ketua delegasi perdagangan Belanda mempresentasikan draf pertama dari *Master Plan* NCICD di Jakarta.[101] Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengadopsi fase pertama dari NCICD, setelah Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda juga datang ke Jakarta untuk mempromosikan rencana tersebut. Pada tahun 2016, Perdana Menteri Rutte memimpin sebuah misi perdagangan untuk Indonesia yang kedua kalinya, dengan dua orang Menteri, seorang wakil Menteri dan sekitar 110 kelompok bisnis dan organisasi Belanda. Di antara mereka ada 50 perusahaan di sektor perairan.[102] Kunjungan para anggota kabinet menggambarkan konsep diplomasi ekonomi pemerintah Belanda yang secara resmi dipromosikan melalui kebijakan luar negerinya sejak tahun 2010.

4.1.3. Kerjasama pembangunan

Sejak bergabungnya agenda pembangunan dan bantuan pemerintah di tahun 2013,[103] sektor perairan telah menjadi fokus kebijakan kerjasama pembangunan pemerintah Belanda sebagaimana: "Pengelolaan air adalah salah satu tema prioritas kebijakan kerjasama pembangunan Belanda." Fokus program pembangunan terkait air antara lain:[104]

1. Air minum yang bersih dan aman, peningkatan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi untuk 25 juta orang;
2. Pengelolaan air, perbaikan pengelolaan daerah aliran sungai dan menyelamatkan delta;
3. Meningkatkan produktivitas air dalam pertanian sebesar 25 persen.

4.2. SEKTOR PERAIRAN BELANDA DI INDONESIA

Sektor perairan Belanda telah menjalin hubungan dengan hampir semua pihak di seluruh bagian dunia. Contohnya, perusahaan teknik Royal Haskoning DHV mempekerjakan 6.000 orang di 150 negara.[105] Perusahaan pengerukan Boskalis beroperasi di 59 negara. Di antara negara-negara yang menerima bantuan pembangunan dari Belanda, Indonesia adalah klien yang paling penting bagi sektor perairan Belanda, menurut survey yang dilakukan oleh Aidenvironment.[106] NWP memperhitungkan ada 90 proyek air Belanda di Indonesia pada Desember 2015, yang hampir setengahnya dilakukan oleh pihak swasta.[107]

Hubungan antara sektor perairan Belanda dan Indonesia semakin intensif setelah Jakarta mengalami beberapa kali banjir di tahun 2007. Pada tahun 2008, Kementerian Luar Negeri menginisiasi proyek pengerukan Jakarta, yang bertujuan untuk menguras saluran air kota. Hal ini menyebabkan peningkatan pembiayaan dari anggaran pembangunan dan pemerintahan kota Jakarta serta diimplementasikan oleh perusahaan Belanda.[108] *Flood Hazard Mapping* [Pemetaan Banjir Parah] inisiatif juga diluncurkan. Para ahli dari Belanda merancang sebuah model komputer yang memprediksi terjadinya banjir di Jakarta.[109]

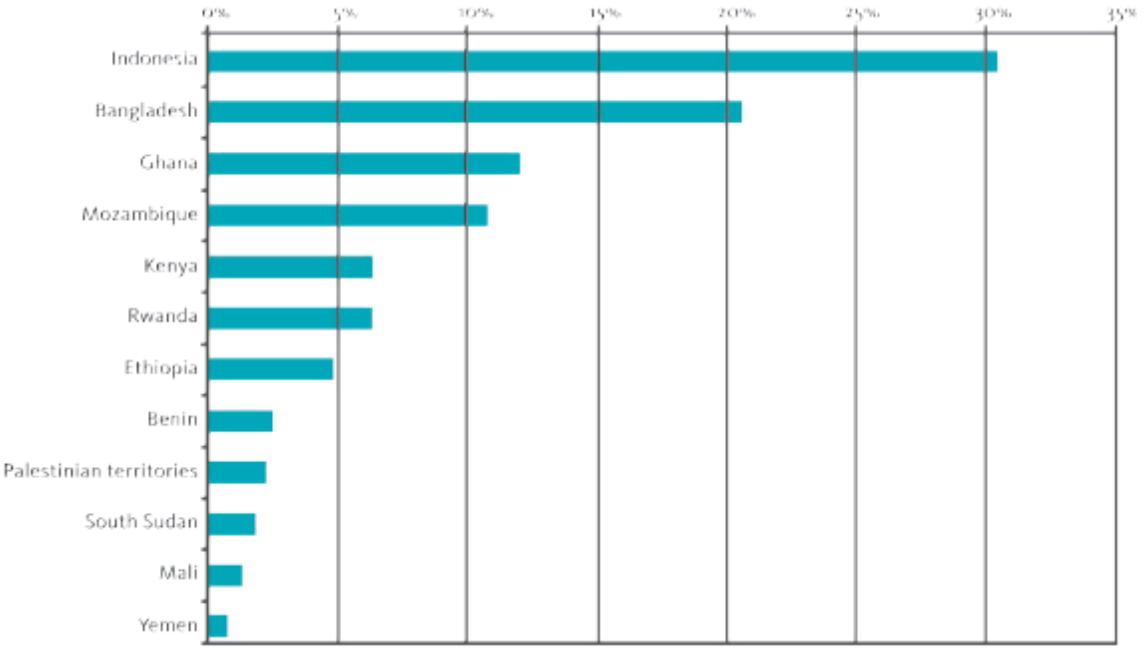

Gambar 7: NILAI OMSET EKSPOR BELANDA DALAM SEKTOR PERAIRAN DI NEGARA BERKEMBANG DALAM %
SUMBER: AIDENVIRONMENT, 2015, P.15 (N=60)

Pada tahun 2009, kelompok bisnis Belanda memulai untuk merancang sebuat rencana strategis dengan pembiayaan pemerintah Belanda sebagai bagian dari bantuan yang "penting dan mendesak" karena pertahanan laut di Teluk Jakarta telah runtuh. Rencana ini disebut sebagai *Jakarta Coastal Development Strategy* (JCDS) [Strategi Pengembangan Pertahanan Pesisir].[110] Salah satu pilihan strategis mencakup solusi lepas-pantai untuk menangkal ancaman banjir yang meningkat akibat amblasan tanah yang berkelanjutan. Opsi ini pun menghasilkan *Master Plan* NCICD.

4.2.1. Pembiayaan pemerintah Belanda

Pemerintah Belanda menggunakan programnya '*Partners for Water*' [Kemitraan untuk Air] (yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Belanda (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO)) dalam bekerjasama dengan NWP untuk membiayai beberapa inisiatif yang disebut sebelumnya untuk mengatasi masalah banjir Jakarta. Selain itu, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta membayar sejumlah 2,5 juta Euro. Kontribusi ditujukan untuk pilot proyek pengerukan di Jakarta.[111]

Pemerintah Belanda juga membiayai pengembangan *Master Plan* NCICD melalui anggaran ODA resminya. Di tahun 2011, kemudian Sekretaris Negara untuk Kerjasama Pembangunan mengumumkan, selama ada di Jakarta, dia bisa menyumbangkan sejumlah 4 juta Euro. Pengembangan pertahanan pesisir Jakarta tidak hanya menguntungkan "yang paling rentan"di kota, ujarnya. Juga akan menawarkan peluang bisnis kepada perusahaan-perusahaan pengerukan dan konstruksi Belanda.[112] Keputusan itu merupakan bagian dari pergeseran keseluruhan kebijakan ODA Belanda. Relasi bantuan dengan negara berpendapatan menengah seperti Indonesia harus bertransformasi secara bertahap menjadi hubungan perdagangan ("dari bantuan menjadi perdagangan"). Bisnis Belanda bisa membangun hubungan perdagangan ini dengan uang dari program pembangunan sektor swasta, yang dibiayai dengan anggaran ODA.

Pada tahun 2016, pemerintah Belanda menyediakan pembiayaan lebih lanjut untuk *Master Plan* NCICD.[113] Sebanyak 7,5 juta Euro dari anggaran ODA dan 500.000 Euro dari '*Partners for Water*' telah dialokasikan untuk proyek dalam jangka waktu maksimum 3 tahun, dimulai pada tahun 2016. Uang yang dialokasikan, antara lain untuk rancangan rinci dari kota tepi-laut yang baru dan tanggul laut Garuda Megah. Selanjutnya, uang ODA ini akan digunakan untuk mengembangkan strategi finansial untuk menarik investor publik dan swasta untuk berpartisipasi dari proyek prestisius senilai 40 miliar dolar.[114]

"Untuk dukungan jangka panjang ini [Pemerintah Belanda] telah menyediakan anggaran dengan total anggaran mencapai 8 juta Euro untuk Konsultasi Umum ditambah dengan penunjukan pejabat pemerintah senior dari Belanda untuk jangka waktu selama 2 – 3 tahun dan komponen terpisah untuk unit Pengelolaan Pengetahuan kelembagaan NCICD. Fokus utama dari dukungan ini akan ada pada keputusan investasi untuk Fase B NCICD yang memperhitungkan perkembangan pada konteks area terdekat dan dihubungkan dengan intervensi lainnya yang mungkin mempengaruhi NCICD atau sebaliknya."

SOMO dan Both ENDS telah mempelajari dari dua sumber yang berbeda, yaitu dari Kementerian Luar Negeri Belanda dan dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda, bahwa yang terakhir memberikan kontribusi sekitar 1,5 juta Euro per tahun untuk proyek NCICD. Namun angka ini belum secara resmi dikonfirmasi.

4.3. KERJASAMA MARITIM

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia dan Belanda juga menandatangai perjanjian kolaborasi maritim yang baru.[115] Pada perjanjian tersebut, Belanda menjanjikan pemerintah Indonesia untuk mendorong ambisinya untuk menjadi pusat maritim dunia. Pemerintah Belanda akan membantu Indonesia di wilayah perikanan, pembuatan kapal dan pembangunan pelabuhan.

Perjanjian baru ini juga membantu Belanda untuk mempromosikan industri maritimnya sendiri ke luar negeri.[116] Pemerintah Belanda telah mengidentifikasi Asia Tenggara, Teluk Meksiko dan Semenanjung Arab sebagai wilayah dengan "potensi pasar" yang jelas. Ini menawarkan pembiayaan tambahan untuk bisnis maritim yang ingin memasuki pasar ini, juga dari program '*Partners for Water'.*

Di tahun 2015, industri maritim Belanda menggambarkan Indonesia dalam laporannya sebagai "titik panas maritim" dengan sejumlah peluang bisnis. Diharapkan bahwa Indonesia akan menginvestasikan 55 miliar dollar dalam beberapa tahun yang akan datang untuk meningkatkan pelabuhan dan memperbaiki transportasi di antara 17.000 pulau-pulaunya.[117] Laporan ini juga merekomendasikan bahwa pemerintah Belanda harus menandatangani perjanjian dengan Indonesia mengenai kerjasama maritim, karena ini "akan membantu untuk mewujudkan inisiatif", sebuah harapan yang diwujudkan setahun kemudian.

4.3.1. Otoritas pelabuhan Rotterdam

Belanda telah terlibat dalam pembangunan Tanjung Priok, pelabuhan di Jakarta, yang terletak di Teluk Jakarta (lihat Babb 3.3). Bank pembangunan Belanda FMO, yang mana 51 persen sahamnya dimiliki oleh negara Belanda, membiayai PT Jakarta Tank Terminal. Perusahaan menyediakan layanan logistik di Tanjung Priok. Ini merupakan kontrak bersama antara PT AKR Corporindo TBK dan Vopak, sebuah operator terminal dari Rotterdam yang telah beroperasi di seluruh dunia.[118]

Pada Oktober 2015, perusahaan dan pejabat pemerintah Belanda bertemu dengan pejabat Indonesia di Jakarta untuk merancang konsep untuk citra pelabuhan baru di Teluk Jakarta pada 3 dari 17 pulau buatan yang direncanakan.[119] Salah satu tujuan dari konsep yang dikenal sebagai *Port of Jakarta* adalah untuk membantu ambisi pemerintah menjadi pusat maritim dunia.[120] Ambisi ini juga akan memperkuat posisi Otoritas Pelabuhan Rotterdam. Salah satu rekomendasi dari rencana tersebut adalah pelabuhan Belanda akan mengambil bagian dalam pengembangan perusahaan untuk pelabuhan baru Jakarta. Selama kunjungan delegasi perdagangan Belanda untuk Indonesia di tahun 2016, Otoritas Pelabuhan Rotterdam menandatangani Nota Kesepahaman dengan badan usaha pengelola pelabuhan milik negara, PT Pelindo II dan perusahaan pengembang lahan PT Jakpro tentang pengembangan lebih lanjut konsep *Port of Jakarta.*

Otoritas Pelabuhan Rotterdam merupakan badan pemerintah, yang tengah mengejar kebijakan luar negerinya.[121] Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang bisnis di seluruh dunia bagi perusahaan-perusahaan Belanda. Otoritas Pelabuhan Rotterdam juga terlibat dalam pengembangan pelabuhan laut dalam yang baru di Kuala Tanjung, di pulau Sumatera – Indonesia. Pada tahun 2016, Otoritas Pelabuhan Rotterdam membuka kantor di Jakarta untuk operasinya di Indonesia.

Bab 5

Kekhawatiran Kritis tentang NCICD

5.1. NCICD TIDAK MENAWARKAN SOLUSI TERHADAP TENGGELAMNYA JAKARTA

"Amblasan tanah, yang sebagian besar, disebabkan oleh penyedotan air tanah, yang harus dihentikan dan digantikan dengan pasokan air perpipaan. Tidak menghentikan amblasan tanah berarti bahwa wilayah pesisir Jakarta akan semakin turun hingga di bawah muka lautm yang membuat solusi untuk masalah banjir menjadi bertambah sulit dan mahal."
Master Plan NCICD, h. 37

Master Plan NCICD dikembangkan dari strategi pertahanan pesisir yang mendesak yang bergantung pada asumsi bahwa tenggelamnya Jakarta tidak cukup cepat ditangani untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir di masa yang akan datang. Rencana tersebut terus mengacu pada pentingnya menghentikan amblasan atau memperlambatnya sebagai prasyarat untuk mengatas ancaman banjir dan dipertimbangkan sebagai solusi yang paling efektif juga. Menghentikan atau memperlambat amblasan, berdasarkan *Master Plan,* merupakan "sangat bermanfaat: penurunan amblasan yang signifikan sebelum tahun 2020 dapat menunda investasi untuk solusi jangka panjang atau membuat rencana ini tidak perlu sama sekali." Namun *Master Plan* ini juga meyakini bahwa "ini mungkin tidak akan layak lagi untuk bagian barat Jakarta, tapi untuk bagian timur".[122] *Master Plan* ini menyajikan sebagai fakta bahwa "proses amblasan akan terus berlanjut dalam laju yang tinggi untuk beberapa tahun lagi. Sekitar tahun 2025, lebih dari 10% Jakarta Barat akan mengalami amblasan tanah hingga di bawah tingkat kritis yakni 2,5 m di bawah muka air laut pasang tertinggi (*the highest high water spring*)."[123]

Seperti yang akan kami sampaikan berikut ini, asumsi ini tidak selalu dibagikan oleh para ahli air. Lebih lanjut, *Master Plan* tidak menyampaikan bukti terhadap asumsi ini, menjadikannya semua lebih mengejutkan bahwa pilihan yang lebih banyak dikaji dalam rencana NCICD adalah asumsi bahwa amblasan tanah tidak akan bisa dihentikan: "Jika amblasan tanah tidak dihentikan segera, solusi tambahan dibutuhkan untuk menawarkan keamanan terhadap ancaman banjir bagi warga Jakarta Utara. Tiga solusi jangka panjang yang telah dipertimbangkan: menelantarkan Jakarta Utara, penguatan tanggul darat dan solusi lepas pantai."[124]

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab 3.1, ini merupakan tiga pilihan drastis dalam hal perencanaan kota serta dampak sosial dan ekonominya yang membutuhkan investasi besar.

Dalam analisis kontekstual, *Master Plan* NCICD membuat sejumlah pengamatan yang didukung oleh para ahli air dan masyarakat sipil. Dalam dokumen tersebut, diakui bahwa "kota Jakarta berjuang untuk memasok air bersih untuk warganya dan perusahaan-perusahaan,[125] serta bahwa "banyak pompa air tanah yang dipasang baik legal maupun illegal, menjadi penyebab utama amblasan tanah.[126] Hal ini ditegaskan beberapa kali dalam *Master Plan*; memang, amblasan disebutkan lebih dari 50 kali. Namun rencana NCICD itu sendiri tidak mencakup mengatasi amblasan tanah dan justru menampilkan pembangunan tanggul laut sebagai suatu kebutuhan.

Bagian berikut ini akan membuat suatu kasus untuk mengatasi amblasan. Bukan berdasarkan pengetahuan yang mendalam, kasus ini didasarkan pada riset tentang amblasan dan air tanah yang independen seperti halnya inisiatif yang mendapatkan dukungan dari pemerintah.[127] Pemerintah Indonesia berambisi untuk memasok seluruh negeri dengan air perpipaan pada tahun 2019.[128] Gubernur Jakarta berambisi untuk menyediakan ibukota dengan cakupan mencapai 100% pada tahun 2018.[129] Cakupan sebesar itu secara drastis akan menurunkan kebutuhan pemompaan air tanah, yang merupakan faktor terbesar atas amblasan tanah.

Deltares menunjukkan bahwa, jika amblasan terus berlanjut, akan menegasikan perlindungan terhadap investasi saat ini dalam langkah-langkah penanganan banjir, ahli hidrologi Belanda Jan Jaap Brinkman menyampaikan pada surat kabar Indonesia Jakarta Post, serta SOMO dan Both Ends, bahwa jika penyedotan air tanah yang dalam betul-betul dihentikan dalam waktu 4 tahun, penutupan Teluk Jakarta dengan tanggul laut luar tidak lagi diperlukan untuk melawan ancaman banjir.[130]

5.1.1. Mengakhiri penyedotan air tanah dan masalah privatisasi

Amblasan tanah adalah masalah umum untuk kota-kota pesisir di seluruh dunia. Pengalaman dari Tokyo menunjukkan, bagaimanapun, laju ancaman tenggelamnya kota akan dapat diturunkan dengan cepat setelah penyedotan air tanah dikurangi. Di Tokyo, amblasan tanah akhirnya dihentikan setelah 10 tahun.[131] Para ahli air memperkirakan bahwa amblasan tanah di Jakarta akan dapat diakhiri dalam waktu 5 hingga 10 tahun, jika langkah-langkah yang efektif dilakukan: "Satu-satunya yang dibutuhkan oleh Jakarta adalah menghentikan penggunaan air tanah yang dalam."[132] Jika masalah amblasan tanah ditangani, tanggul, yang saat ini sedang dibangun di pesisir Teluk Jakarta sebagai bagian dari Fase A rencana NCICD (lihat Bab 3) akan cukup melindungi Jakarta dari ancaman banjir. Tanggul ini dimaksudkan sebagai pertahanan laut hingga tahun 2030, tetapi jika amblasan tanah dihentikan pada waktu yang tepat dan memadai maka tanggul itu juga akan melindungi Jakarta di tahun-tahun berikutnya. Lebih lanjut, ahli hidrologi Belanda Brinkman menyatakan bahwa menghentikan tenggelamnya Jakarta adalah "solusi termudah dan termurah" dalam menghadapi ancaman banjir.[133] Ini merupakan asumsi, apabila, investasi yang besar pada pasokan air, pengolahan dan infrastruktur air limbah dilakukan.

Ilmuwan Indonesia Yus Budiyono dan lainnya menggunakan sebuah model dimana amblasan tanah bisa berhenti di Jakarta pada tahun 2025, dengan syarat bahwa pemerintah Indonesia bisa mewujudkan 100 persen cakupan pasokan air perpipaan di Jakarta pada tahun 2019:[134] "Jika target kebijakan dicapai dalam waktu itu, menjadi harapan bahwa amblasan tanah akan menurun cepat setelah 2019, dan karenanya, asumsi untuk meneruskan penurunan amblasan tanah hingga 2025 dalam model ini." Skenario hipotesis ini, berdasarkan pengalaman di Bangkok dan Tokyo, menunjukkan bahwa tenggelamnya Jakarta bisa mulai berhenti enam tahun setelah penyedotan air tanah dihentikan.

Saat ini layanan air perpipaan menggunakan pasokan air permukaan sekitar 35 persen dari total kebutuhan, sedangkan sisanya 65 persen diambil dari tanah (lihat Bab 2.3.2). Sebagian besar investasi, seperti penghasil air bersih yang baru, sangat jelas diperlukan untuk meningkatkan produski air sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasokan air. Namun demikian, ada hambatan yang serius untuk mewujudkan pasokan air perpipaan yang berfungsi dengan baik di Jakarta. Dalam kontrak konsesi – Perjanjian Kerjasama antara perusahaan operator air milik pemerintah kota PAM Jaya dan dua operator swasta- akses terhadap air yang universal diatur untuk dicapai pada akhir masa konsesi di tahun 2022. Selain itu, kontrak menetapkan bahwa komisaris, yang bukan dari pemerintah, diberikan hak eksklusif untuk menyediakan layanan air, yang mengasumsikan mereka juga dapat mengotorisasi investasi yang diperlukan. Hal ini bermasalah dalam dua hal. Pertama, target tahun 2022 untuk penyediaan secara penuh pasokan air perpipaan terlambat, sehingga tidak bisa menghentikan penyedotan air tanah dan tenggelamnya Jakarta tepat waktu. Kedua, pemerintah pusat, tidak bisa melakukan investasi yang diperlukan untuk membangun instalasi pengolahan air yang baru untuk air permukaan, yang diperkirakan akan menelan biaya hingga mencapai 389 juta dollar.[135] Aktivis hak atas air mengamati bahwa fasilitas pengolahan air belum diperluas di bawah kontrak konsesi selama 18 tahun terakhir. Fasilitas pengolahan air dibuat pada tahun 1980-an, dibiayai oleh dana bantuan pembangunan Jepang,

namun belum diperbarui lagi sejak itu. Dalam kondisi di bawah kontrak saat ini, perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan pasokan air Jakarta tidak dimungkinkan, karenanya kontrak harus dibatalkan.

Terlebih lagi, ada konflik antara niat mengambil keuntungan dari perusahaan swasta memasok layanan air dengan kepentingan publik, yang telah menjadi subyek sejumlah gugatan di Indonesia. Pada tahun 2012, penduduk Jakarta melayangkan gugatan warga negara melawan privatisasi air di Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta di November 2012. Mereka berpendapat bahwa privatisasi layanan air di Jakarta telah gagal memenuhi akses penduduk terhadap air yang aman, karena sejumlah korupsi dan kerugian finansial yang timbul terhadap anggaran publik. Pada tanggal 24 Maret 2015, pengadilan memutuskan untuk mendukung warga, membatalkan perjanjian kontrak dengan Palyja dan Aetra, menemukan bahwa *Public-Private Partnership* (PPP) [Kemitraan Pemerintah-Swasta] telah lalai dalam memenuhi hak atas air untuk warga negara.[136] Putusan ini kemudian ditentang oleh perusahaan swasta dan tergugat lainnya hingga warga pun kalah di Pengadilan Tinggi pada Februari 2016, dan kemudian warga Jakarta memutuskan untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ke Mahkamah Agung.[137] Perjuangan hukum pun jalan terus.

Singkatnya, mengingat keterbatasan yang ditetapkan oleh kontrak dengan operator swasta, pemerintah Jakarta tidak bisa bergantung pada pihak swasta untuk mencapai target kebijakan ambisius untuk memenuhi cakupan air perpipaan secara penuh pada tahun 2019 dan menghentikan amblasan tanah tepat waktu. Pengalaman selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa tidak ada cukup insentif bagi operatir swasta untuk mengurangi ketergantungan penggunaan air tanah dengan berinvestasi pada pasokan air perpipaan yang terjangkau untuk sebagian besar penduduk. Jika kontrak dengan operator swasta tidak dibatalkan untuk investasi yang serius, tujuh tahun berikutnya menuju akhir konsesi di tahun 2022 kemungkinan akan membuang waktu bertahun-tahun dalam mengatasi tenggelamnya Jakarta.

5.2. KEUNTUNGAN SWASTA DAN KERUGIAN NEGARA

Meskipun solusi lain amblasan tanah telah diuji coba, pemerintah Belanda terus fokus pada pelaksanaan NCICD dengan meniadakan alternatif lain yang telah dieksplorasi. Dengan mengabaikan amblasan tanah dalam kerangka kerja NCICD, pemerintah Belanda bahkan telah meruntuhkan analisisnya sendiri dalam menyukseskan rencana NCICD: pada Juli 2016, pemerintah Belanda membuka tender bagi perusahaan konsultan untuk terlibat dalam pengembangan lebih lanjut kota tepi-laut Garuda Megah dan tanggul laut luar, di mana disebutkan bahwa memperlambat amblasan tanah merupakan "suatu syarat untuk menyukseskan NCICD."[138] Pasokan air perpipaan di Jakarta Utara dibutuhkan dalam rangka untuk menghentikan penyedotan air tanah dalam berdasarkan dokumen ini. Langkah ini, bagaimanapun, tidak menjadi bagian yang terintegrasi dari kasus bisnis NCICD.

Dengan gagalnya mempertimbangkan pilihan lain untuk mengatasi permasalahan banjir Jakarta dan mengajukan solusi lepas-pantai yang tinggi investasi sebagai satu-satunya pilihan, pemerintah Belanda tidak terlibat dalam solusi pengelolaan air yang berkelanjutan untuk Jakarta. Menghasilkan sebuah rencana seperti NCICD tentunya adalah "cara untuk membuktikan" posisi industri sektor perairan Belanda terhadap pasar di Indonesia.[139] Bukan hanya perusahaan teknik yang telah terlibat dalam rancangan dan pengembangan NCICD yang akan menguntungkan jika tanggul laut luar dan Garuda Megah pada akhirnya direalisasikan. Perusahaan pengerukan Van Oord dan Boskalis serta perusahaan konstruksi dari Belanda juga telah siap menerima dan mengharapkan permintaan yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, pemerintah Belanda tampaknya lebih mengejar peluang bisnis untuk sektor perairannya sendiri yang belum tentu untuk kepentingan

warga Jakarta. Terlebih, keuntungan privat yang didapatkan melalui proyek ini, bisa mendatangkan kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan. Kerugian yangg dihasilkan oleh proyek infrastruktur dan pemukiman mewah yang belum menjadi kajian dampak yang cermat diuraikan dalam bagian berikut.

5.2.1. Ketimpangan ekonomi dan kerugian sosial

Pembangunan tanggul laut luar dan kota tepi-laut baru di Teluk Jakarta akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat nelayan di Jakarta Utara. Reklamasi 17 pulau yang sedang berlangsung telah berdampak pada sumber kehidupan mereka. Sebuah Kajian Lingkungan Cepat, yang dilakukan oleh *Danish Hydraulic Institute* pada tahun 2012, mengestimasikan bahwa akibat reklamasi saat ini sebanyak 586,3 hektar area budidaya di Jakarta akan hilang.[140] Dalam surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Rutte, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menekankan bahwa, jika NCICD dilakukan, "sepuluh ribu" orang yang terhubung dengan perikanan skala kecil di teluk Jakarta akan kehilangan sumber kehidupannya.[141]

Pusat Penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan bahwa nelayan yang akan terkena dampak dari reklamasi yang tengah berlangsung di Teluk Jakarta telah kehilangan lebih dari ¾ penghasilan bulanannya (lihat Tabel 1 di Bab 2.2.1).[142] Data dari Kementerian juga menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 24.028 orang yang bekerja sebagai nelayan di Teluk Jakarta. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memperkirakan bahwa masyarakat yang bekerja di usaha perikanan sejak pra-produksi hingga paska produksi mencapai lebih dari 50.000 orang.

Penutupan terhadap Teluk Jakarta untuk kegiatan penangkapan ikan dapat mencapai total kerugian produksi hingga sekitar 52,1 juta Euro, berdasarkan pusat penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.[143] Jika tanggul laut luar dan kota tepi-laut direalisasikan, semua wilayah tangkap nelayan di lautan saat ini maupun budidaya perikanan yang dekat dengan pesisir Jakarta Utara akan hilang. Selain itu, jalur kapal menuju laut lepas akan dipotong. *Master Plan* NCICD mengakui bahwa masyarakat nelayan di Jakarta Utara akan terpengaruh terhadap penutupan Teluk Jakarta. "Mengingat pentingnya sektor perikanan terhadap masyarakat yang diyopangnya, upaya-upaya mitigasi pengaruh penutupan teluk ini harus diambil secara seksama." Demikian disebutkan dalam dokumen.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah untuk memindahkan masyarakat nelayan dan aktivitasnya ke ujung luar kota tepi-laut Garuda Megah. Lampiran 10 dari prosedur tender yang diumumkan oleh Belanda menyatakan bahwa rencana NCICD akan dibuat untuk langkah sejauh itu. Namun, dalam kasus bisnis NCICD tidak ada ketentuan yang jelas dibuat untuk rencana ini. Dalam menjawab pertanyaan SOMO, pejabat dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda merespon bahwa relokasi dari masyarakat lokal adalah tanggungjawab utara pemerintah Indonesia.[144] Konsorsium Belanda yang mengembangkan *Master Plan* NCICD menyatakan dalam tinjauan laporan ini bahwa 17 persen dari lahan di Garuda Megah diperuntukkan bagi perumahan sosial untuk kelompok miskin seperti masyarakat nelayan. Namun demikian masih belum jelas dalam kasus bisnis bagaimana biaya relokasi pasar ikan, fasilitas penyimpanan dan pengolaham serta pelabuhan perikanan dapat ditutupi. Kasus bisnis NCICD hanya menyebutkan pembangunan dermaga.

Dalam analisis untung-rugi ekonomi yang terpisah,[145] diakui bahwa "perikanan mungkin akan mengalami penurunan produktivitas atau bahkan tidak dapat menghasilkan sama sekali" jika tanggul laut luar direalisasikan. Dokumen ini, pun, memandang perlu untuk mengukur kerugian

yang akan timbul sebelum benar-benar harus memindahkan masyarakat nelayan ataupun menghentikan usaha mereka.

Kritik atas NCICD takut bahwa konsep perumahan sosial dalam Garuda Megah masih akan terlalu mahal untuk nelayan.[146] Mereka mengatakan bahwa relokasi akan mengakibatkan kehancuran struktur sosial masyarakat dan tradisi mereka. Selain itu mereka menolak penghilangan nelayan tradisional dengan iming-iming menjadi pekerja tak terampil. Masyarakat dari pemukiman nelayan Muara Angke di Jakarta Utara telah menghadapi penggusuran dari rumah mereka karena reklamasi pesisir yang sedang berlangsung di Teluk Jakarta.[147] Rumah baru yang ditawarkan oleh pemerintah kota Jakarta kepada keluarga nelayan jauh dari teluk, yang membuat mereka mustahil untuk melanjutkan profesi mereka sebagai nelayan.

Jika kita melihat dalam gambaran yang lebih luas tentang pembangunan sosial-ekonomi di Jakarta, sungguh mengkhawatirkan bahwa proyek reklamasi dan NCICD dapat berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan di Jakarta, yang menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketimpangan ekonomi di daerah lain di Indonesia jika dibandingkan.[148] Situasi ekonomi mengalami penurunan secara umum, seperti yang ditunjukkan melalui bertambahnya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 3,75 persen dari 368.670 di bulan September 2015 menjadi 384.300 di bulan Maret 2016.[149] Jika masyarakat nelayan lebih dipinggirkan, kesenjangan antara kaya dan miskin akan semakin meluas.

5.2.2. Kerugian lingkungan

Pada bulan Desember 2015, terjadi kematian massal puluhan ribu ikan yang tercatat di Jakarta Utara, karena ledakan ganggang yang menyebabkan penurunan kadar oksigen di perairan.[150] Insiden itu terjadi akibat pembuangan air limbah yang tidak diatasi ke dalam 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Permukaan air yang melintasi Jakarta sangat tercemar air limbah dari rumah tangga dan bangunan komersial, serta pencemaran dari industri, pestisida yang mengalir dan pupuk dari lahan pertanian, limbah padat dan tinja yang meluap atau bocor dari tangki kakus.[151]

Bagian penting dari proyek NCICD adalah pembuatan danau retensi besar di Teluk, antara pesisir dan tanggul laut luar. Sungai-sungai yang melintasi Jakarta akan berakhir pada cekungan besar ini, dimana kemudian akhirnya air akan dipompa keluar melewati tanggul laut luar dan dialirkan ke laut lepas. Diperkirakan bahwa, tanpa langkah penghentian pencemaran air, danau retensi ini akan menjadi limbahan tergenang, dimana semua material beracun akan berkumpul. Teluk Jakarta kemudian akan menjadi “tempat sampah dan toilet terbesar di dunia”, menurut presiden Asosiasi Perencana Indonesia.[152] Tiga orang ahli air lainnya juga mengingatkan bahwa waduk retensi dapat menjadi “comberan raksasa” jika sungai-sungai yang melintasi Jakarta tidak dikelola dengan baik.[153]

Master Plan NCICD mengakui ancaman bahaya ini, terlihat dari “penutupan Teluk menjadikan pembersihan sungai penting.” [154] Biaya untuk langkah-langkah perbaikan kualitas air, bagaimanapun, tidak secara eksplisit dihitung dalam kasus bisnis NCICD. *Master Plan* mengharapkan bahwa NCICD akan “menciptakan momentum yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah sanitasi yang sampai sekarang masih kurang di Jakarta, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada kualitas air”.[155]

Asumsi ini, namun, terlalu jauh optimis. Hanya 4 persen dari penduduk di Jakarta yang memiliki akses terhadap sistem pengolahan dan drainase limbah. Indonesia merupakan negara yang tingkat cakupan sistem pembuangan limbahnya paling rendah di wilayah Asia. Berdasarkan data

World Bank, sanitasi perkotaan setidaknya akan mengatasi dengan baik sebagian besar persoalan kebijakan di Indonesia.[156] Suatu rencana untuk membangun sistem pembuangan limbah telah diperkenalkan sejak 15 tahun yang lalu, namun tidak banyak perkembangan yang telah terjadi sejauh ini. Di tahun 2013, pemerintah kota Jakarta dan pemerintah pusat meluncurkan proposal yang mengharapkan pengelolaan limbah-cair di 15 zona pembuangan limbah akan difinalisasi pada tahun 2050. Proyek ini akan menelan biaya sekitar Rp. 70 triliun (5,91 juta dollar).[157] Namun, baik pemerintah provinsi Jakarta maupun pemerintah pusat telah membuat komitmen yang nyata. Sebaliknya, mereka bergantung pada perusahaan untuk membiayai layanan publik penting.[158] Dalam tender untuk pembangunan NCICD selanjutnya, pemerintah Belanda juga mendefinisikan pengolahan air sebagai prasyarat untuk keberhasilan proyek, seiring dengan penurunan amblasan tanah.[159] Saat ini belum ada tanda-tanda, pun, kedua prasyarat tersebut terpenuhi dalam waktu dekat.

Kualitas air di danau retensi bukan satu-satunya masalah lingkungan NCICD yang akan muncul. Penutupan Teluk Jakarta akan menimbulkan dampak yang mendalam pada flora dan fauna yang ada di teluk saat ini. Ini akan, antara lain, menghabiskan 320 hektar hutan bakau yang masih tersisa di Jakarta Utara. Jika teluk kemudian menjadi bagian ke dalam cekungan air tawar, tidak mungkin bagi tanaman bakau bisa bertahan. Padahal bakau menyediakan ekosistem yang penting, dari potensi penyerapan karbon untuk konservasi keanekaragaman hayati. Bakau merupakan pelindung dari berbagai nutrisi dan menjadi perangkap sedimen serta menstabilkan garis pantai sehingga dapat melindungi garis pantai dan masyarakat pesisir dari ancaman badai tropis, banjir dan erosi. Sebagai kompensasi untuk kerugian dari hutan bakau yang sangat berharga di Teluk Jakarta, proyek NCICD mengusulkan untuk membuat sistem muara bari bagi bakau di ujung barat dari Garuda Megah, di daerah intertidal. Biaya pembangunan laguna seluas 180 hektar ini termasuk dalam kasus bisnis NCICD.[160]

Permasalah lingkungan lain yang disebabkan oleh proyek NCICD adalah pasir dalam jumlah besar (300 juta meter kubik) yang dibutuhkan untuk pembangunan tanggul laut luar dan kota tepi-laut baru. Pasir telah menjadi sumber daya yang langka secara global, akibat urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota besar. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak serius akibat pencurian pasir.[161] Ini telah berpengaruh terhadap, Kepulauan Seribu, sebuah taman suaka laut dekat dengan Teluk Jakarta. Meskipun penurunan lingkungan di taman laut bukan fenomena yang baru, pembuatan pulau palsu C dan D di Teluk Jakarta selaanjutnya berkontribusi terhadap kerusakan taman laut, menurut masyarakat.[162] Sebuah perusahaan pengerukan, Cristobal Colon tang dimiliki oleh perusahaan Belgia bernama Jan de Nul, dianggap oleh polisi setempat dan masyarakat nelayan bertanggungjawab untuk pengerukan pasir, berdasarkan investigasi yang dipiblikasikan di majalah Tempo.[163] Majalah tersebut melaporkan bahwa kemudian Kepala Pengelolaan Air Jakarta, Tri Djoko Sri Margianto, telah mengungkap pencurian pasir yang terjadi di perairan pulau Pari dan Lancang yang digunakan untuk proyek reklamasi pesisirPT Kapuk Naga Indah. Kapal itu diduga beroperasi di Indonesia padahal izin telah berakhir. Jan De Nul disewa oleh pengembang proyek Indonesia PT Kapuk Naga Indah untuk pembangunan pulau C dan pulau D.[164] Jan De Nul tidak merespon permintaan untuk meninjau laporan ini atas tuduhan tersebut. Walhi, sebuah organisasi lingkungan di Indonesia, mengklaim bahwa pasir juga dicuri dari bagian lain di Indonesia untuk reklamasi di Teluk Jakara, tanpa menyebutkan namanya.[165]

Pembuatan tanggul laut luar dan kota tepi-laut baru di Teluk Jakarta juga akan membutuhkan sejumlah besar pasir, dan wilayah asalnya tidak disebutkan. Dengan demikian, proyek NCICD beresiko mendorong penambangan pasir ilegal di Indonesia.

5.3. RISIKO FINANSIAL

Saat ini tidak ada gambaran yang tersedia untuk umum dan ikhtisar yang komprehensif dari biaya keuangan dan risiko finansial terhadap realisasi sepenuhnya proyek NCICD. *Master Plan* NCICD menampilkan kasus bisnis di mana biaya konstruksi dan "pembangunan" untuk perlindungan banjir, sistem transportasi, reklamasi pesisir, pelabuhan dan operasional laguna diperkirakan mencapai 21,5 juta dolar (lihat Bab 3). Namun, perhitungan ini tidak memasukkan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kedua persyaratan untuk proyek sehingga berhasil, yaitu mengakhiri penyedotan air tanah dalam dan pengolahan air limbah. Hal ini juga tidak termasuk total biaya untuk relokasi dan kompensasi usaha perikanan.

Dokumen tender terbaru dari pemerintah Belanda menyebutkan bahwa "tantangan" investasi sebanyak 33 juta dollar untuk pembangunan pemukiman mewah, infrastruktur dan pembangunan pelabuhan. Ini merupakan tambahan dari 7 juta dollar yang dibutuhkan untuk program keamanan bannjir. Dokumen tender menyebutkan bahwa NCICD bertujuan untuk mendapatkan saham dari sektor swasta lebih dari 70 persen. Sebagaimana disebutkan dalam Bab 3.1, *Master Plan* NCICD memperkirakan pendapatan tinggi yang akan dihasilkan dari reklamasi pesisir. Rencana proyek menjanjikan bahwa Garuda Megah "akan menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah yang sangat besar bagi kota Jakarta. Reklamasi pesisir akan memberikan pekerjaan kepada lebih dari 550.000 orang secara struktural. Selama pembangunan Garuda Megah, rata-rata tambahan 4.250 orang yang dipekerjakan sementara per tahun. Nilai tambah dari lapangan pekerjaan ini untuk total perekonomian mencapai 64 jula dollar (!) (dalam hal PV) untuk periode hingga tahun 2040. "Sebagian besar pendapatan tersebut diharapkan didapat dari hasil penjualan tanah baru untuk gedung pencakar langit dan berbagai jenis pembangunan pemukiman mewah.[166]

Namun, sejumlah risiko mengancam potensi pendapatan ini, mulai dari periode pembangunan yang diperpanjang, kurangnya ketersediaan pasir, pengembangan yang lebih tinggi atau pengeluaraan biaya hingga anjloknya harga pemukiman mewah. Dalam rangka mengurangi lebih rendah dari potensi permintaan untuk perkantoran (risiko pasar pemukiman mewah), *Master Plan* menyatakan bahwa, "Jaminan pemerintah untuk perpinadahan kantor pemerintah ke *Central Business District* (CBD) yang baru diperlukan". Selanjutnya, "langkah awal untuk mempersiapkan program pengembangan kualitas air yang terintegrasi harus dilakukan".[167] Strategi mitigasi risiko ini tidak termasuk dalam perhitungan.

Master Plan NCICD mengakui adanya risiko finansial yang melekat pada proyek.[168] Salah satu dari risiko itu adalah biaya pembangunan Garuda Megah dapat secara substantif meningkat karena kenaikan harga pasir. Untuk pembuatan kota tepi-laut baru, pasir diangkut dari jarak yang jauh. Risiko lainnya adalah krisis ekonomi di Indonesia, yang dapat mengakibatkan kemerosotan di pasar pemukiman mewah di Jakarta.

Realisasi NCICD juga bisa mengakibatkan kelebihan pasokan pemukiman mewah di ibukota, khususnya jika ke-17 pulau buatan dibangun juga. Pada tahun 2013, *Program Management Unit* [Unit Pengelolaan Program] dibuat untuk memastikan sebuah konsultasi tentang "pelaksanaan NCICD yang cepat dan efektif" terlaksana dengan lima investor swasta yang potensial dari Indonesia. Mereka menyatakan keprihatinan bahwa pembuatan Garuda Megah dapat menyebabkan runtuhnya pasar pemukiman mewah jika rencana pembangunan pemukiman mewah di kota tepi-laut baru terlalu ambisius..[169]

Satu rintangan dalam eksploitasi bisnis untuk kota tepi-laut, pelabuhan baru dan infrastruktur akan mengancam potensi pendapatan. Oleh karena itu, *Master Plan* NCICD karenanya mengusulkan agar pemerintah Indonesia membuat investasi publik perdana untuk mendorong pihak swasta masuk ke

dalam proyek.[170] ”Dalam rangka untuk menarik sektor swasta agar menanamkan modalnya, sektor publik sendiri harus terlebih dahulu membuat komitmen yang substantif. Ketika investasi publik perdana dilakukan, investasi pihak swasta yang substantif dapat diharapkan.” Investasi swasta akan mengikuti, pun, adalah asumsi yang dibuat.

Dari penjelasan di atas, keseluruhan gambaran yang muncul menunjukkan banyak biaya dan risiko proyek NCICD yang tersembunyi maupun eksplisit diharapkan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Analisis untung-rugi yang dibuat oleh *Master Plan* tidak memasukkan biaya di muka untuk prasyarat yang diperlukan agar proyek NCICD berhasil. Ada risiko bahwa potensi pendapatan untuk pemerintah Indonesia tidak akan terwujud, sementara itu juga mengharapkan jaminan dari pemerintah Indonesia untuk mencegah beberapa risiko bagi investor swasta.

5.3.1. Investor yang kontroversial

Kekhawatiran lainnya adalah bahwa proyek NCICD akan menarik investor dengan rekam jejak yang buruk terkait hak asasi manusia, korupsi dan proyek perusak lingkungan. Salah satu perusahaan yang dikonsultasikan oleh PMU NCICD pada tahun 2013 sebagai potensi pemberi dana adalah Artha Graha Grup. Grup ini menggambarkan dirinya sebagai “sebuah jaringan luas dari perusahaan-perusahaan, kelembagaan maupun individu, baik yang terafiliasi maupun non-afiliasi, yang terikat oleh visi bersama”. Kelompok ini aktif dalam sejumlah industri di seluruh Indonesia, termasuk properti, keuangan, agro-industri, dan industri perhotelan.[171] Artha Graha didirikan oleh pengusaha Indonesia Tomy Winata,[172] yang disebut sebagai pimpinan Jaringan Artha Graha oleh Bloomberg.[173] Artha Graha Grup sudah terlibat dalam proyek reklamasi pesisir di Teluk Jakarta.[174] Tomy Winata terkonfirmasi oleh media Indonesia bahwa ia tertarik untuk terlibat dalam fase selanjutnya dari NCICD.[175]

Winata dikenal di Indonesia sebagai pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan militer.[176] Berdasarkan peneliti George Aditjondro, pada tahun 1990an Winata menggerakkan pendanaan untuk pasukan khusus yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di Indonesia.[177] Surat kabar daring Indonesia, Merdeka, menulis bahwa Winata membangun sekolah asrama untuk tentara.[178] Dalam sebuah wawancara, Winata sendiri menggambarkan militer sebagai mitra.[179] Sampai dengan tahun 2005, sebuah yayasan tentara memiliki 20 persen saham di Bank Artha Graha.[180] Saat ini, mantan jenderal Angkatan Darat Kiky Syahnakri merupakan kepala badan pengawas dari bank tersebut.[181] Di tahun 2003, Syahnakri –bersama dengan militer Indonesia lainnya- didakwa oleh jaksa PBB untuk pelanggaran HAM di Timor Timur, dimana ia merupakan seorang komandan setelah referendum tahun 1999.[182]

Melalui anak perusahaannya, PT Tirta Wahana Bali Internasional, Tomy Winata juga terlibat dalam proyek reklamasi pesisir yang kontroversial di pulau Bali. Pengembang berencana untuk mengganti suatu wilayah laut yang dilindungi di Teluk Benoa menjadi area resor. Nelayan lokal disana pun, tidak hanya di Teluk Jakarta , takut kehilangan sumber kehidupannya.[183]

PMU NCICD juga berkonsultasi dengan perusahaan Indonesia PT Agung Podomoro Land Tbk sebagai investor potensial.[184] Konglomerat ini memiliki anak perusahaan PT Muara Wisesa Samudra, perusahaan yang membangun pulau G di Teluk Jakarta. Ariesman Widjaja, mantan Direktir dari PT Agung Podomoro Land Tbk yang menjadi tersangka kasus korupsi. Dia diduga mencoba menyuap seorang politisi lokal di Jakarta dengan tujuan mengurangi pajak daerah karena untuk pembangunan pulau G.[185]

Kelompok potensial lainnya yang dihubungi[186] untuk potensi investasi adalah Salim Group, yang mengungkapkan keraguan akan kelayakan seluruh rencana NCICD namun demikian menyatakan

minatnya terlibat di waktu yang akan datang. Salim Grup adalah salah satu dari perusahaan terbesar di Indonesia dan merupakan pemilik dari Indofood, yang berhubungan dengan banyak malpraktik di perkebunan kelapa sawit, seperti pelanggaran hak-hak buruh, kerusakan lingkungan dan pembukaan lahan dengan membakar dan penggusuran masyarakat.[187]

Konglomerat bisnis, (pensiunan) militer, birokrat dan politisi masih merupakan suatu struktur kekuasaan informal di Indonesia yang bertahan saat kejatuhan Presiden Soeharto di tahun 1998 yang selama ini melindungi mereka. Lembaga demokrasi dan peradilan yang lemah di Indonesia secara luas dilihat sebagai kegagalan untuk mengendalian jaringan ini.[188] Proyek-proyek infrastruktur dan pemukiman mewah seperti NCICD dapat, dengan melibatkan investasi hingga miliaran, selanjutnya memperkuat kekuasaan informal di Indonesia, dengan mengorbankan kelompok rentan seperti nelayan setempat. Dengan kekuatan dan tidak transparannya pengembang properti serta kepentingan bisnis lainnya yang mendominasi proyek, yang miskin akan semakin terpinggirkan dan didorong keluar Teluk Jakarta.

5.4. MELANGGAR PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Antara tahun 2011 dan 2019, pemerintah Belanda akan menghabiskan total 11,4 juta Euro dari anggaran ODA untuk rancangan dan pembangunan NCICD (dan pendahulunya JCDS). Hal ini terjadi walaupun fakta bahwa proyek ini bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kriteria ODA.

Mengurangi kemiskinan: Dalam Memorandum terbaru kepada OECD, yang ditulis dalam persiapan telaah sejawat kebijakan pembangunan pemerintah Belanda, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Belanda berfokus pada mengurangi kemiskinan.[189] Meskipun demikian, tidak jelas strategi khusus yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Jakarta Utara dalam *Master Plan* NCICD. Proposal NCICD menyatakan bahwa, beserta dengan tawaran perlindungan terhadap banjir, juga "memperkuat usaha perikanan yang ada, sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi".[190] Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan ini, pembangunan tanggul laut dan kota tepi-laut baru akan merusak dan bukannya mendukung masyarakat nelayan setempat. Mereka akan kehilangan wilayah tangkap dan budidaya di Teluk Jakarta dan akan kehilangan akses bebas terhadap laut lepas.

Langkah-langkah yang diajukan untuk masyarakat nelayan dan usaha perikanan dibatasi pada langkah-langkah mitigasi yang ditujukan pada memberikan kompensasi kepada masyarakat pesisir tersebut atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh NCICD. Dua buah pintu air akan dibangun di tanggul laut luar, namun pintu ini dianggap sebagai bukanlah solusi yang ideal untuk nelayan yang setiap hari pergi melaut.[191] *Master Plan* juga mengusulkan untuk merelokasi aktivitas mereka ke bagian ujung dari kota tepi-laut. Namun kasus bisnis NCICD tidak menggambarkan dengan jelas bagaimana ini akan dibiayai. Usulan lain adalah untuk mengembangkan bentuk-bentuk baru budidaya ikan di danau retensi, tetapi ini tidak mungkin jika melihat pencemaran air yang terjadi. Biaya untuk meningkatkan kualitas air, pun, tidak termuat dalam kasus bisnis NCICD.

Pertumbuhan yang inklusif: Dalam memorandum terbaru OECD tentang kebijakan pembangunan, pemerintah Belanda mengklaim bahwa mereka memainkan peran penting dalam memimpin koalisi internasional untukn "tiada yang tertinggal". Dokumen kebijakan menyatakan bahwa instrument kebijakan ODA Belanda "secara khusus dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat yang terpinggirkan (…) dengan meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif". Program pembiayaan Belanda dan proyek yang ditujukan "melawan ketidaksetaraan".[192] Namun NCICD cenderung akan memiliki efek sebaliknya. Masyarakat sipil Indonesia memperkirakan bahwa sepuluh ribu masyarakat pesisir akan kehilangan sumber kehidupannya.[193] Mereka khawatir

bahwa masyarakat pesisir harus bekerja di jenis pekerjaan dengan gaji rendah, sebagai pemulung di tempat pembuangan sampah ataupun menjadi buruh cuci. NCICD dalam hal ini akan berkontribusi terhadap ketidaksetaraan di Jakarta yang sudah meningkat.

Konsorsium bisnis Belanda yang mengembangkan NCICD memperkirakan bahwa wilayah pemukiman penduduk yang baru pada Garuda Megah dank e-17 pulau akan menciptakan pekerjaan baru untuk masyarakat nelayan. Mereka bekerja sebagai perawat, sopir, tukang kebun dan keamanan serta staf pemeliharaan di antara kelompok rumah tangga kelas menengah ke atas yang akan menjadi penduduk pulau-pulau baru ini.[194] Pendekatan "*trickle-down effect*" ini, dimana pendapatan kelompok miskin bergantung pada pengeluaran yang kaya, bertentangan dengan tujuan pembangunan pemerintah Belanda untuk memerangi ketidakadilan. Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda, Lilianne Ploumen, beberapa waktu belakangan bahkan mendeklarasikan bahwa "trickle-down telah mati".[195]

Hak-Hak Perempuan: Kertas kebijakan OECD mengklaim bahwa hak-hak perempuan dan kesetaraan gender menjadi "komponen yang menyatu" dalam kebijakan Belanda.[196] Perempuan dalam usaha perikanan di Jakarta Utara memainkan peranan yang signifikan dalam fase sebelum panen, penangkapan dan paska tangkap. Mereka rata-rata bekerja selama 17 jam sehari, menurut organisasi masyarakat sipil KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), karena perempuan juga harus mengelola rumahtangganya.[197] Lebih lanjut, layanan air bersih dan sanitasi yang buruk menjadikan perempuan mengalami beban ganda, mengingat pembagian peran gender mengharuskan perempuan untuk menyediakan kebutuhan perempuan. Reklamasi pesisir yang sudah berjalan telah mengancam sumber kehidupan mereka. NCICD menjadikannya lebih sulit untuk perempuan memenuhi kebutuhannya.

Hak Asasi Manusia: Perampasan pada masyarakat seperti yang terjadi kepada para nelayan dan masyarakat pesisir dari sumber kehidupannya tidak hanya melanggar tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga hak asasi manusia secara umum. Menghancurkan sumber kehidupan adalah pelanggaran terhadap Kovenan Internasional PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mengakui hak setiap orang untuk bekerja demi kehidupannya.[198] Ini adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan harus dihormati dalam kebijakan pembangunan Belanda.

Konsultasi pemangku kepentingan: Keterlibatan dan menginformasikan kepada pemangku kepentingan adalah prinsip penting dalam kebijakan Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda saat ini.[199] Menteri telah menyatakan bahwa kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dapat memperlemah efek positif potensi proyek yang didukung oleh pemerintah. Menurut situs NCICD, pertemuan untuk konsultasi publik dilakukan di beberapa kota, antara lain Jakarta Bekasi dan Tangerang. Namun, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menegaskan bahwa NCICD dirancang tanpa melibatkan kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, terutama keluarga nelayan setempat. Mereka juga tidak berkonsultasi tentang reklamasi pesisir yang tengah berjalan.

Bab 6

Tantangan pemerintah dalam pengelolaan air di Indonesia

6.1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG TERINTEGRASI DI BELANDA DAN INDONESIA

Proyek air skala besar seperti NCICD menyentuh permukaan isu yang saling terkait: rencana tata ruang, kualitas dan kuantitas air, akses terhadap air dan tanah, dampak terhadap masyarakat lokal dan lingkungan serta dukungan masyarakat sipil. Konsep *Integrated Water Resources Management* (IWRM) [pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi] memberikan jalan bagi pemerintah untuk mengatasi semua permasalahan tersebut.

Suatu prinsip kunci dalam IWRM adalah bahwa pengelolaan air harus berdasarkan pada pendekatan partisipatif di semua tingkatan. Ini mengimplikasikan bahwa keputusan diambil di tingkatan terendah yang layak, dengan konsultasi publik sepenuhnya dan keterlibatan pengguna air setempat dalam skenario rancangan dan seleksi, perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek air. Prinsip kunci lainnya adalah pendekatan pengelolaan yang terintegrasi dan efektif yang menghubungkan pembangunan dengan perlindungan ekosistem alam.

Integrated Water Resources Management (IWRM) [pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi] merupakan dasar dalam pengelolaan sumber daya air di Belanda. Belanda secara internasional dikagumi karena solusi pengelolaan sumber daya airnya dalam skala besar yang inklusif, terintegrasi, dan ramah lingkungan, seperti *Rooms for the Rivers* dan pembangunan Maasvlakte. Dalam *International Water Ambition* [Ssasaran Air di Internasional] (lihat Bab 4), pemerintah Belanda menguraikan prinsip-prinsip pendekatan deltanya yang komprehensif, yaitu yang diperuntukkan bagi "solusi optimal – terutama dalam hal pencegahan – yang melindungi delta di perkotaan dan penduduknya dari ancaman banjir, kekurangan air dan pencemaran air, serta memungkinkan pembangunan ekonomi berkelanjutan."[200] Pendekatan Delta a la Belanda juga berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan inklusivitas: "Otoritas publik, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil bersama penduduk bersama-sama menentukan rancangan, pendekatan, pembiayaan dan kompensasi."[201]

KOTAK 1. PENDEKATAN DELTA KOMPREHENSIF BELANDA

"Pendekatan delta yang komprehensif mencari solusi optimal – terutama di wilayah pencegahan – yang melindungi delta perkotaan dan penduduk mereka dari ancaman banjir, kekurangan air dan pencemaran air, serta memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan delta memperhitungkan sistem air dari delta perkotaan, wilayah sungai yang bermuara ke delta dan ekosistem yang terkait serta air dalam rantai pasokan untuk energi, air minum dan pangan, serta transportasi, ditambah dengan proses-proses yang mengendalikan dan mempengaruhi. Atas dasar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusivitas, pendekatan delta bertujuan untuk mencapai pengelolaan sungai dan pesisir yang berkelanjutan, rantai pasokan air yang lebih efisien dan bersih dengan fokus kuat pada lingkaran arus air dan aliran air limbah, dan infrastruktur yang secara sosioekonomi dan ekologi layak (seperti pembangkit listrik tenaga air, tanggul dan pelabuhan). Otoritas publik, perusahaan, organisasi masyarakat sipil dan penduduk secara bersama-sama menentukan rancangan, pendekatan, pembiayaan dan kompensasi. Dalam hal perairan internasional dan sungai lintas batas, diperlukan diplomasi yang baik untuk pendekatan kolaboratif dalam mengatasi tantangan regional; juga dapat memainkan peran dalam negosiasi ketika terjadi konflik kepentingan. Pendekatan delta yang komprehensif juga terkait dengan teknologi delta, teknologi air dan tata kelola air".

SUMBER: KEMENTERIAN LUAR NEGERI, EKONOMI, SERTA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP BELANDA[202]

Organisasi masyarakat sipil Indonesia mengajukan pertanyaan mengapa prinsip-prinsip tidak diterapkan dalam rancangan proyek NCICD. Konsultasi publik dan dialog tentang pilihan skenario yang memungkinkan tidak menjadi cara yang terstruktur,[203] dengan konsekuensi bahwa kelompok masyarakat sipil dan para ahli tidak yakin bahwa NCICD adalah solusi satu-satunya dan yang terbaik untuk mengatasi ancaman banjir Jakarta. Mereka menyerukan untuk mempertimbangkan alternatif skenario yang lebih murah dalam hal sosial, lingkungan dan biaya sosial, yang umumnya lebih efektif dan melayani publik ketimbang kepentingan privat.[204] Persiapan implementasi Fase B untuk pembangunan tanggul laut luar dan kota tepi-laut terus berlanjut sementara masih belum jelas apakah prasyarat yang diperlukan untuk menghentikan penyedotan air tanah dan penggantian dengan pasokan air yang lebih terjangkau dan dapat diandalkan bisa dipenuhi tepat waktu.

Pada tahun 2012, pengulas *Jakarta Coastal Development Strategy* [Strategi Pembangunan Pertahanan Pesisir] – hasil kerjasama air Belanda-Indonesia dan pendahulu NCICD – telah menyatakan bahwa "tanpa penanganan yang tepat dan memadai persoalan amblasan tanah (…), banyak investasi yang direncanakan untuk pembangunan dan perlindungan Jakarta Utara akan menghamburkan uang saja".[205] Pengulas kemudian merekomendasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang rinci untuk Teluk Jakarta. Sejak saat itu, konteks pengaturan NCICD menjadi lebih kompleks karena perlawanan masyarakat sipil pun semakin meningkat, korupsi dan gugatan hukum terhadap reklamasi yang sedang berjalan. Tiadanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis hingga hari ini menggambarkan bahwa isu-isu sosial dan lingkungan tidak ditangani dengan baik.

6.1.1. Tiadanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang rinci

Sebagaimana telah disebutkan, *Master Plan* NCICD didahului dengan *Jakarta Coastal Development Strategy* [Strategi Pembangunan Pertahanan Pesisir], proyek percontohan yang dilakukan antara tahun 2010 dan 2011 dengan tujuan "memberikan solusi yang realistis untuk pertahanan pesisir untuk masa depan" dan menciptakan "sebuah rencana untuk pengelolaan dan perlindungan pesisir, yang mencakup keseluruhan pantai utara Pulau Jawa".[206] Berdasarkan strategi ini, kinerja kebijakan dan program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperlukan. KLHS harus menjadi dasar dalam penyesuaian untuk meminimalisir potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari *Master Plan* JCDS, yang sekarang merupakan *Master Plan* NCICD.

Dampak yang terkait dengan kerusakan alam lingkungan dan kesehatan, keselamatan dan kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Instrumen KLHS masih agak baru di Indonesia: diperkenalkan pada tahun 2009 dalam UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari KLHS adalah untuk menilai potensi dampak dan risiko lingkungan sebagai dasar untuk penyusunan rencana. JCDS menjelaskan enam langkah untuk kinerja KLHS.[207] Sejauh ini, Both ENDS menilai hanya langkah 1 dari KLHS yang telah dilakukan. Selama misi Both ENDS, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa KLHS belum difinalisasi.[208] Pada tahun 2014, NCICD hanya menerbitkan sebuah kerangka laporan KLHS serta laporan kualitas air, sanitasi, lingkungan, sosial, aspek spasial, analisis bakau, dampak terhadap perikanan dan model aliran hidrodinamika.[209]

Hal ini tidak biasa, karena KLHS dimaksudkan untuk mengembangkan perencanaan dank arena itu harus diintegrasikan dalam proses perencanaan dan bukannya dilakukan setelah finalisasi dan persetujuan *Master Plan*. *Master Plan* NCICD tidak dikembangkan atas dasar KLHS yang utuh, namun hanyalah 'kerangka' untuk KLHS, yang dikembangkan secara parallel dengan *Master Plan*.

Proses KLHS yang utuh bisa mendukung perencanaan NCICD dalam pengembangan dan perbandingan pilihan strategis yang meminimalisir kerusakan lingkungan dan sosial serta keterlibatan pemangku kepentingan – dan khususnya kelompok-kelompok rentan setempat, dalam proses perencanaan.

6.2. TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya air, yang menjadi lebih mendesak karena tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan perluasan ekonomi. Seperti telah dijelaskan dalam Bab 2, masalah yang terlihat di Teluk Jakarta adalah kualitas air yang memburuk, penyedotan air tanah yang berlebihan, banjir karena erosi dan sedimentasi dasar sungai dan degradasi Daerah Aliran Sungai di hulu. Masalah-masalah ini, berpengaruh secara negatif terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat lokal dan pekerja, saling terkait dan memerlukan tindakan oleh otoritas publik. Bagian berikut ini akan menguraikan tantangan khusus yang dihadapi oleh pemerintah terkait hal tersebut.[210]

6.2.1. Kerangka hukum dan kelembagaan

Kerangka kelembagaan dan hukum untuk IWRM menawarkan dasar hukum untuk pendekatan partisipatif, berkelanjutan secara lingkungan dan integratif dalam perencanaan pembangunan. Secara formal, pengaturan air di Indonesia dikenal dalam pendekatan integratif dalam pengelolaan sumber daya air sejak Undang-Undang Pengelolaan Air tahun 1974, yang fokus pada irigasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 adalah undang-undang Sumber Daya Air (SDA) yang terbaru dan komprehensif (lihat Kotak 2). Meskipun ini merupakan UU tentang IWRM pada tingkat hukum, namun dalam pelaksanaannya tidak mengikuti prinsip-prinsip IWRM, di antaranya seperti partisipasi penuh oleh semua pemangku kepentingan dan integrasi antara persoalan air dan pengelolaan lingkungan. Dalam kasus *Master Plan* NCICD, tidak ada kajian akan tantangan dan peluang untuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pendekatan terintegrasi dalam kerangka hukum. Analisis risiko difokuskan pada aspek teknis dan keuangan. Isu lingkungan dan kelembagaan yang ditujukan untuk tingkatan tertentu (lihat juga bagian sebelumnya tentang ketiadaan KLHS). Hal ini bertentangan dengan praktik sektor perairan di Belanda, di mana proyek-proyek besar yang merupakan kepentingan nasional dimulai dengan eksplorasi analisis risiko yang terintegrasi, termasuk aspek kelembagaan dan hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengilustrasikan tantangan pengelolaan air yang dihadapi oleh Indonesia. Undang-Undang memperkenalkan konsep IWRM di Indonesia dan dapat menjadi dasar hukum untuk pengelolaan air yang terkesan lebih inklusif dan diterima secara sosial. Namun, proses implementasinya lambat. Undang-Undang dijabarkan dalam peraturan pemerintah yang terpisah tentang berbagai persoalan air yang berbeda namun saling terkait, yang mana hasilnya tumpang tindih peraturan dan mandat yang menghambat Undang-Undang untuk berlaku efektif. Perumusan peraturan ini masih berlangsung: peraturan tentang pasokan air mulai berlaku pada tahun 2005, sedangkan peraturan tentang kualitas air masih dirumuskan. Tidak ada organisasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kuat yang mewakili seluruh pemangku kepentingan dan memiliki mandat untuk mengkoordinasikan antara lembaga-lembaga pemerintah. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) secara resmi mewakili semua pemangku kepentingan di wilayah DAS. Namun, dalam praktiknya warga negara dan organisasi masyarakat sipil yang memantau masalah lingkungan dan mempedulikan konservasi seringkali tidak dianggap sebagai anggota TKSPDA ini.[211]

Selain itu, UU SDA menghadapi perlawanan sosial yang kuat karena dimensi komersialisasi dan privatisasi yang diperkenalkan dalam UU ini, sedangkan hak dasar semua orang untuk memiliki akses terhadap air bersih dengan harga yang terjangkau tidak disebutkan. Pasal 41 menyatakan

bahwa perusahaan swasta dapat terlibat dalam pengembangan pasokan air, sekalipun begitu tidak hanya UU itu sendiri, peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana tentang pasokan air, menetapkan kondisi-kondisi untuk keterlibatan sektor swasta ini demi memastikan kepentingan publik terlindungi. Ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi Indonesia, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikendalikan oleh negara. Pada 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan UU No. 7 Tahun 2004[212] dan menyatakan berlaku kembali UU No. 11 Tahun 1974 untuk mencegah kekosongan hukum selama masa transisi menuju UU yang baru.[213] Putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi momentum yang tepat untuk meninjau kembali masalah sentralisasi dan partisipasi masyarakat. Namun, proses perumusan kembali yang saat ini sedang berlangsung merupakan proses yang tertutup.[214]

6.2.2. Tumpang tindih mandat, kebijakan dan peraturan

Pengelolaan sumber daya air terhambat oleh berbagai mandat, peraturan dan kebijakan di antara berbagai kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pertanahan Nasional dan kurangnya koordinasi antar lembaga ini. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan menghambat komitmen pemerintah untuk menegakkan rencana tata ruang dan regulasi yang melindungi kelompok lokal dan area konservasi. Seperti kasus di DAS hulu yang rapuh di area Puncak yang diklasifikasikan sebagai hutan lindung dalam dokumen rencana tata ruang. Namun, pada kenyataanya hutan tetap dikonversi untuk rumah peristirahatan ilegal, pariwisata dan industri lainnya.[215] Hal ini dilihat sebagai salah satu penyebab banjir di Jakarta. Pada tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pembongkaran 250 villa ini diperlukan untuk memulihkan fungsi DAS Puncak sebagai kawasan konservasi.[216] Kementerian Pekerjaan Umum kembali menegaskan ini di tahun 2013.[217] Pada tahun yang sama, Kabupaten Bogor mulai menghancurkan sejumlah villa. Namun, lembaga *Forest Watch Indonesia* memastikan bahwa dalam waktu dua tahun berikutnya tidak ada kegiatan restorasi apapun, dan beberapa villa yang dibongkar sedang dalam pembangunan kembali.[218]

Contoh lainnya dari tumpang tindih mandat ini juga dalam kasus konsesi terkait dengan pulau C, D dan G yang disebutkan dalam Bab 2.2. Dalam kasus ini, keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terkoordinasikan dengan baik. Mandat yang tumpang tindih juga mengarah pada kompetisi otoritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini juga terjadi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pemerintah Kota Jakarta terkait dengan penilaian dampak untuk pulau G.[219]

6.2.3. Kurangnya akses terhadap data yang layak dan terpercaya

Solusi pengelolaan yang efektif membutuhkan data kualitas dan kuantitas sumber daya air, pengguna air utama, kondisi tanah dan efek lainnya pada sumber daya air, seperti kondisi cuaca dan perubahan iklim. Lembaga pemerintah yang mengumpulkan dan mengelola data serta informasi terkait sumber daya air, namun data ini biasanya tidak disebarluaskan. Selain itu, ada kendala pada kapasitas dan sumber daya laboratorium air publik. Di Teluk Jakarta, di mana 13 sungai bermuara, kekurangan data tentang pencemaran air dan efeknya terhadap kualitas air, sumber kehidupan dan pekerja adalah kekhawatiran utama. Kekurangan ini membuat sangat sulit memenuhi persayaratan NCICD untuk meningkatkan pengolahan air limbah di Jakarta.

6.2.4. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya air saat ini lemah di Indonesia. Di tahun 2012, Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan aturan dalam penyedotan air tanah, rencana tata ruang dan pengaturan gedung adalah

akar institusionil penyebab banjir di Jakarta dan wilayah sekitarnya.[220] Karena kurangnya pengetahuan dan data ilmiah, kasus dan bukti yang dibawa ke pengadilan seringkali lemah. Kasus-kasus lingkungan seringkali membutuhkan verifikasi ilmiah. Pencemaran oleh industri, misalnya, telah menjadi akar masalah lingkungan yang mendalam, dengan banyak kasus yang tidak terselesaikan.

6.2.5. Kurangnya keterlibatan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air seringkali terbatas pada konsultasi publik di mana orang hanya dapat bereaksi terhadap rencana yang siap dilaksanakan.[221]

Di Teluk Jakarta, nelayan tradisional dan pekerja perikanan skala kecil yang bergantung pada teluk untuk kehidupan mereka tidak dilibatkan dalam rancangan *Master Plan* NCICD. Nelayan tradisional di Muara Angke menyampaikan pada Both ENDS dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia bahwa mereka mendengar ada pertemuan konsultasi yang jauh daru rumah mereka di Universitas Indonesia, yang aman sulit bagi mereka untuk menghadiri. Mereka juga tidak terinformasi tentang rencana pembangunan 17 pulau dan tanggul laut raksasa, dan potensi dampak terhadap sumber kehidupan mereka.[222] Oleh karena kurangnya peluang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, gugatan hukum adalah satu-satunya perangkat hukum yang tersedia bagu masyarakat untuk bersuara dalam pembangunan Teluk Jakarta. Kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan adalah kendala struktural dalam pengelolaan air di Indonesia, yang mengurangi dukungan publik dan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan keputusan serta menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat lokal.

Bab 7
Kesimpulan dan rekomendasi

7.1. RINGKASAN KEKHAWATIRAN KRITIS

Laporan ini menjabarkan kekhawatiran kritis tentang proposal NCICD. Secara ringkas, antara lain:

- Permasalahan amblasan tanah di Jakarta tidak diatasi dalam strategi pertahanan pesisir NCICD. Asumsi di dalam *Master Plan* NCICD bahwa tenggelamnya Jakarta tidak dapat dihentikan segera untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman banjir di waktu yang akan datang. Pada saat yang sama, rencana ini mengidentifikaksi bahwa penghentian proses amblasan tanah merupakan prasyarat penting untuk 'skenario apapun' untuk melindungi kota. Sementara pertanda bahwa prasyarat ini terpenuhi sangat sedikit, *Master Plan* tidak memuat langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini, termasuk tidak memuat langkah-langkah penting dalam rencana pembiayaan. Hal ini menjadikan *Master Plan* tidak menyeluruh dan menimbulkan keraguan serius untuk terus dilakukan.
- NCICD diperkirakan akan menimbulkan biaya sosial yang signifikan dan meningkatkan ketimpangan ekonomi karena mengancam lebih jauh masyarakat nelayan yang terpinggirkan yang hidup di sepanjang pesisir Teluk Jakarta. Masyarakat ini khawatir bahwa pembangunan tanggul laut luar dan reklamasi pesisir adalah bagian dari rencana yang akan menarik mereka keluar dari usahanya secara permanen. Kekhawatiran ini sangat berdasar, mengingat bahwa reklamasi pesisir yang sedang berjalan di Teluk Jakarta telah mengakibatkan kehilangan sumber kehidupan yang signifikan.
- NCICD dapat menciptakan masalah lingkungan yang besar. Jika tanggul laut luar dibangun, ada risiko bahwa penutupan sebagian dari Teluk Jakarta akan menyebabkan danau beracun yang besar. Sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta sangat tercemar. Lampiran dalam tender NCICD oleh Belanda juga menyatakan bahwa pengolahan air limbah di Jakarta merupakan prasyarat untuk keberhasilan NCICD. Sekali lagi, jika hal ini mengatasi amblasan tanah, langkah-langkah untuk mengurangi kontaminasi dan ancaman air limbah tidak terintegrasi dalam rencana NCICD, tidak pula investasi masif yang dibutuhkan dalam rencana keuangannya. Jumlah pasir yang sangat besar yang dibutuhkan, lebih jauh bisa mendorong penambangan pasir ilegal di Indonesia, dengan dampak lingkungan yang negatif; tuduhan penambangan pasir ilegal ditujukan terhadap kapal yang beroperasi dekat dengan Teluk Jakarta untuk proyek reklamasi pesisir yang dimiliki oleh perusahaan pengerukan Belgia, Jan De Nul.
- NCICD menciptakan risiko keuangan yang besar bagi pemerintah Indonesia mengingat dalam skema kerjasama pemerintah-swasta yang akan menjamin adalah negara. Biaya investasi bisa meningkat hingga 40 juta dollar dengan rentang waktu proyek 20 tahun atau lebih, sementara setidaknya 70 persen dari investasi ini diharapkan akan datang dari investor swasta. Sehingga proyek ini membawa risiko keuangan yang tinggi. Hasil investasi dari pemukiman mewah di Garuda Megah, pembangunan pelabuhan dan jalan bebas hambatan harus menutupi biaya realisasi tanggul laut luar. Biaya pembangunan untuk kota tepi-laut baru bisa, bagaimanapun, meningkat secara substansial. Risiko lainnya adalah bahwa pasar pemukiman mewah di Jakarta akan bangkrut. Pemerintah Indonesia tampaknya akan menghadapi risiko keuangan, dan harus membayar biaya yang tak nampak, seperti peningkatan kualitas air dan pasokan air perpipaan.
- NCICD rentan untuk menarik investor yang kontroversial dengan rekam jejak yang buruh terkait hak asasi manusia, korupsi dan proyek yang merusak lingkungan. PMU NCICD telah berkonsultasi dengan dua perusahaan yang pemiliknya terkait erat dengan militer Indonesia dan menjadi tersangka korupsi. Lebih lanjut, mereka juga berhubungan dengan perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan penggusuran masyarakat lokal.
- Proyek NCICD tidak memenuhi kriteria pemerintah Belanda yang menegakkan kebijakan pembangunannya, namun telah menghabiskan sekitar 11,4 juta Euro dari anggaran ODA pada

rancangan dan pengembangan NCICD. Bukannya membantu pembangunan yang inkulsif dan berkelanjutan, proyek ini mengancam sumber kehidupan para nelayan di Teluk Jakarta dan mereka yang bekerja di usaha lainnya yang terkait, sehingga berkontribusi pada peningkatan ketimpangan di Jakarta. Hal ini melanggar beberapa prinsip yang tercantum dalam hukum internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan komitmen pemerintah untuk "mengambil langkah, individu dan melalui bantuan internasional dan kerjasama, khususnya ekonomi dan teknis, untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini", termasuk hak untuk bekerja. Kegagalan dalam melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial secara utuh sebelum merancang suatu proyek infrastruktur yang besar artinya pemerintah tidak mengikuti komitmen internasional.

- Proyek NCICD tidak memenuhi prinsip-prinsip IWRM Belanda tentang konsultasi publik dan partisipasi serta perlindungan ekosistem alam. Kekhawatiran diangkat oleh masyarakat lokal tidak diatasi. Laporan dari masyarakat nelayan bahwa mereka tidak diinformasikan, dikonsultasikan ataupun terlibat dalam pengembangan NCICD. Proyek ini berisiko untuk berkontribusi terhadap eksklusi sosial dan konflik tanpa memastikan partisipasi masyarakat lokal yang sejati. Ini bertentangan dengan *International Water Ambition* pemerintah Belanda dan OECD yang didukung oleh prinsip-prinsip tata kelola air yang baik.

Kekhawatiran yang dijabarkan di atas menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah Belanda mempromosikan proyek ini. Rencana NCICD mengabaikan pilihan yang lebih murah, berkelanjutan dan telah diuji coba untuk mengatasi amblasan tanah. Jelaslah bahwa melindungi Jakarta terhadap banjir semakin mendesak dan memerlukan tindakan segera.
Pemerintah Belanda, dalam dukungannya kepada NCICD tanpa kritik, tidak cukup menyeimbangkan antara kepentingannya mendukung perusahaan Belanda dengan kebijakan pembangunannya yang inklusif dan berkelanjutan. Laporan ini menimbullkan pertanyaan singkat apakah pendekatan parsial saat ini melalui *Master Plan* NCICD ini menawarkan warga Jakarta solusi yang secara sosial, lingkungan dan finansial berkelanjutan.

7.2. REKOMENDASI OLEH MASYARAKAT SIPIL

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan dan pelaksanaan *Master Plan* NCICD serta pemangku kepentingan lokal setuju bahwa mengatasi ancaman banjir harus dimulai dengan mengatasi tantangan ancaman tenggelamnya Jakarta. Penyedotan air tanah, penyebab utama dari amblasan tanah, harus dikurangi. Ini mengimplikasikan bahwa air permukaan harus digunakan untuk pasokan air minum dan menggantikan penggunaan air tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyedia air minum harus meningkatkan kapasitas produksi, yang saat ini hanya mampu memenuhi 33 persen dari kebutuhan rumah tangga dan industri. Pembangunan pengelolaan air yang baru harus dilakukan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan suatu tujuan kebijakan yang menyediakan modal dengan 100 persen cakupan pasokan air perpipaan di tahun 2009. Namun, tujuan kebijakan ini belum realistis, karena tidak ada kebijakan konkrit yang dirumuskan untuk mencapai target tersebut.

Terkait dengan penyediaan air minum, kelompok masyarakat sipil percaya bahwa perlu untuk mengakhiri kontrak dengan operator swasta (Palyja dan Aetra) dan mengikuti keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 2015, sehingga operator penyedia air milik pemerintah kota Jakarta, PAM Jaya dapat memulihkan kendali penuh dan secara bersama-sama mengambil langkah yang diperlukan untuk menjangkau seluruh warga kota sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada penyedotan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Situasi saat ini telah membuktikan bahwa operator swasta merasa tidak ada insentif untuk berinvestasi di

pengolahan air untuk meningkatkan dan memperluas layanan air minum dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta dan industri.

Pengelolaan air sama-sama dalam keadaan serius: 96 persen dari air limbah dibuang ke sungai di hulu tanpa diolah. Konsekuensinya, semua air permukaan, termasuk 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta mengalami pencemaran yang serius. Hanya 2 persen penduduk yang memiliki akses terhadap sistem pembuangan limbah di perkotaan; ini adalah persentase terendah di dunia di antara negara berpendapatan menengah. Selain itu, ini juga adalah masalah kesehatan, misalnya air minum yang tidak aman dan kurangnya sanitasi yang layak berdampak pada kesehatan masyarakat and berkontribusi pada tingginya penyakit akibat kuman yang terbawa air. Mengingat arus air yang mengalir terus menerus ke kota, dan menutup Teluk sebagai konsekuensi dari pembangunan tanggul laut, adalah sebuah keharusan yang mutlak untuk secara drastis memperbaiki pengumpulan dan pengolahan air limbah. Hal ini tidak hanya membutuhkan investasi yang masif tapi juga komitmen politik dan perencanaan jangka panjang.

Mitra lokal telah menginformasi kepada Both ENDS, SOMO dan TNI bahwa para pemangku kepentingan – khususnya masyarakat yang terkena dampak – tidak diinformasikan secara layak; dan bahkan tidak diberikan peluang untuk berdialog. Proses partisipatif yang sejati bisa berkontribusi untuk mitigasi dampak negatif lingkungan dan sosial yang digambarkan dalam laporan ini. Para ilmuwan yang ada di Jakarta dan para ahli yang tidak memiliki kepentingan bisnis dapat berkontribusi untuk mengembangkan solusi yang diinginkan dan dapat diterima secara sosial maupun lingkungan. Membersihkan sungai-sungai di Jakarta, dengan dukungan dari masyarakat internasional, akan menjadi dukungan luar biasa bagi masyarakat nelayan di Jakarta. Hal itu akan memberikan dorongan terhadap kegiatan mereka jika wilayah tangkap yang tersisa di Teluk Jakarta diperbaiki dan daerah yang ditutup kembali dibuka.

7.3. MEREKOMENDASIKAN SEBUAH PENDEKATAN TERPADU KEPADA PEMERINTAH BELANDA DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN NCICD

Dibutuhkan sebuh komitmen yang lebih kuat dari Belanda untuk membantu dalam pencapaian tujuan untuk menghentikan amblasan tanah. Pemerintah Belanda dan sektor perairan harus mengintegrasikan dua prasyarat untuk keberhasilan proyek NCICD – mengakhiri penyedotan air tanah dan memperbaiki pengolahan air limbah – di dalam rencana NCICD itu sendiri.

Persyaratan lebih lanjut untuk keterlibatan Belanda haruslah merealisasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang utuh. Ini haruslah mencakup skenario dimana amblasan tanah dihentikan dan kualitas air ditingkatkan, kemudian membandingkan pendekatan yang berbeda untuk menjamin keamanan banjir Jakarta, dengan dan tanpa proyek reklamasi dan pemukiman mewah. Kajian ini harus mempertimbangkan solusi alternatif, termasuk yang disebut sebagai "pilhan nol". Dalam skenario ini, tanggul laut luar dan kota tepi-laut baru dikeluarkan dari rencana, dan perlindungan terhadap banjir direalisasikan dengan memperkuat tanggul yang telah ada di pesisir, ditambah dengan langkah-langkah untuk menghentikan amblasan tanah. KLHS harus melibatkan kelompok masyarakat setempat yang saat ini terkecualikan dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dan dengan demikian memastikan komitmen Belanda terhadap hak-hak ekonomi dan sosial serta prinsip-prinsip IWRM. Secara umum, menggabungkan antara perlindungan terhadap ancaman banjir dengan visi yang jelas untuk meningkatkan penyediaan air minum untuk semua dan pengolahan limbah (cair), jauh lebih sejalan dengan pendekatan pengelolaan air terpadu yang secara resmi didukung oleh pemerintah Belanda pada tingkat internasional, serta kebijakan pembangunannya sendiri.

Dengan melibatkan masyarakat nelayan dan kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam

proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mungkin akan menemukan cara lain untuk menghindari pembangunan tanggul laut luar yang akan mencegah masyarakat nelayan untuk kehilangan sumber kehidupannya dan lebih terpinggirkan. Dengan pendekatan ini, NCICD tidak lagi bertentangan dengan target kebijakan pembangunan Belanda untuk pertumbuhan yang inklusif.

Dengan mempertimbangkan semua pilihan, para ahli di Belanda, kelompok pengusaha, dan pemerintah Belanda akan melayani masyarakat Jakarta dan Indonesia serta mmpertahankan reputasi Belanda di Indonesia, berikut reputasi Belanda di Internasional sebagai ahli pengelola air yang berkelanjutan. Pimpinan asosiasi perencana Indonesia telah menyatakan keraguannya dalam surat kabar di Indonesia, Kompas tentang niat Belanda di balik proyek NCICD, yang dia sebut sebagai "akal-akalan" dari Belanda untuk menciptakan lapangan usaha baru bagi para ahli mereka.[223] Adalah kuasa pemerintah Belanda untuk meninjau ulang proyek Belanda untuk menolak klaim ini.

---

[1] Pulau C, D, G dan N, Lihat Gambar 2.

[2] Induk Perusahaan PT Muara Wisesa Samudra.

[3] Induk Perusahaan PT Kapuk Naga Indah

[4] Lihat teks Kovenan Hak Ekosob pada http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

[5] Lihat, contoh, Komentar Umum Komite Hak Ekosob No. 12 (1999): Hak atas pangan yang layak (Pasal 11), U.N. doc. E/C.12/1999/5, paragraf 15 ('Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan ukuran bagi Negara untuk memastikan bahwa perusahaan ataupun individu tidak menyingkirkan seseorang dari aksesnya terhadap pangan layak. Kewajiban untuk memenuhi (fasilitasi) berarti bahwa Negara harus pro-aktif terikat dengan aktivitas yang ditujukan untuk memperkuat akses masyarakat dan penggunaan sumber daya untuk memastikan sumber kehidupannya, termasuk keamanan pangan'), https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/12/PDF/G9942012pdf?OpenElement

[6] http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

[7] Lihat Dewan HAM PBB, "Guidelines on Extreme Poverty and Human Rights," [Panduan untuk Kemiskinan Ekstrim dan Hak Asasi Manusia] 2012, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx

[8] Diterbitkan pada September 2016 dan dituliskan dalam konteks tinjauan sejawat Komite Bantuan Pembangunan OECD ke Belanda pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 4 November 2016.

[9] Tinjauan Sejawat Komite Bantuan Pembangunan OEDC Belanda 2017, Memorandum oleh Belanda, September 2016.

[10] Terkait dengan proyek NCICD adalah prinsip keterlibatan para pemangku kepentingan, misalnya, yang penting disorot dalam OECD 2015, "Stakeholder Engagement for Inclusive Water Governance." [Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk Tata Kelola Air yang Inklusif] Untuk publikasi lainnya, lihat http://www.oecd.org/ gov/regional-policy/country-reviews-on-water-governance.htm

[11] Lihat situs web: HLPWater

[12] Badan Penanaman Modal dan Promosi Jakarta, tanpa tanggal, Peluang Penanaman Modal di Jakarta, slide presentasi, http://www.confindustria.it/Aree/NewsPub.nsf/9E898D4189EDE116C1257C0E002FD5E1/$File/JAKARTA.pdf

[13] DHI Water & Environment, Kementerian Lingkungan Hidup/ESP2, "Rapid Environmental Assessment for Coastal Development in Jakarta Bay," [Kajian Lingkungan Singkat untuk Pembangunan Pesisir di Teluk Jakarta] 2011, h. 27-29, http://www.esp3.org/index.php/en/library/papers-and-reports/63-sea-synthesis-report-of-lessons-learned-25

[14] Ibid., h. 32.

[15] Tempo.co, "Reklamasi Teluk Jakarta Ancam Ekosistem Mangrove", 18 April 2016, https://m.tempo.co/read/news/2016/04/18/083763487/reklamasi-teluk-jakarta-ancam-ekosistem-mangrovehttps://m.tempo.co/read/news/2016/04/18/083763487/reklamasi-teluk-jakarta-ancam-ekosistem-mangrove

[16] Tempo.co, "Jakarta Bay Coral Reefs Badly Damaged," [Terumbu Karang di Teluk Jakarta Sangat Rusak] 23 April 2014, http://en.tempo.co/read/news/2014/04/23/206572659/Jakarta-Bay-Coral-Reefs-Badly-Damaged

[17] DHI Water & Environment, ibid.

[18] Taufik R Indra Kesuma, The Jakarta Globe, "Slums in Jakarta: Where Needs of the Poor Mismatch the Needs of the City," 29 Maret 2011, http://jakartaglobe.beritasatu.com/archive/slums-in-jakarta-where-needs-of-the-poor-mismatch-the-needs-of-the-city. Lihat juga Bab 5.2

[19] SHNet, "Reklamasi Teluk Jakarta, Ini Pandangan KNTI" 2 April 2016, http://sinarharapan.net/2016/04/reklamasi-teluk-jakarta-ini-pandangan-knti/

[20] Achmad Syalabi, republika.co.id, "Lengkap, Kronologi Reklamasi Teluk Jakarta" 3 April 2016, http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/05/o51dj4394-lengkap-kronologi-reklamasi-teluk-jakarta-part1

[21] The Jakarta Post, "Developer-driven reclamation leaves public behind," [Reklamasi Dikendalikan Pengembang Masyarakat Tertinggal] 13 Januari 2016, http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/13/developer-driven-reclamation-leaves-public-behind.html

[22] PT. Muara Wisesa Samudra, situs web proyek Pluit Cit, http://pluitcity.com/profile/about-pluit-city

[23] https://www.pinterest.com/pin/351280839659670870/

[24] Berkel J. et al. "Jakarta Bay Recommendation Paper." [Kertas Rekomendasi Teluk Jakarta] Laporan akhir yang disampaikan dalam Program Dukungan Lingkungan Hidup 2 (tidak diterbitkan), 2012, p. 2. Lihat juga DHI Water & Environment, Kementerian Lingkungan Hidup/ESP2, "Rapid Environmental Assessment for Coastal Development in Jakarta Bay," [Kajian Lingkungan Singkat untuk Pembangunan Pesisir di Teluk Jakarta] 2011, h. 27-29, http://www.esp3.org/index.php/en/library/papers-and-reports/63-sea-synthesis-report-of-lessons-learned-25

[25] Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Dampak Sosial Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan, Reklamasi Teluk Jakarta", 19 September 2016.

[26] Wawancara Both ENDS dengan nelayan setempat, Jakarta Utara, 23 April 2016. Nilai tukar rata-rata tahunan untuk tahun 2016 yang digunakan untuk mengkonversi Rupiah ke Euro (0,000068) dan nilai tukar rata-rata tahunan untuk tahun 2012 yang digunakan untuk mengkonversi Dollar AS ke Euro (0,778296), dipublikasikan pada http://www.usforex.com/forex-tools/historical-rate-tools/yearly-average-rates

[27] Transparency International – Netherlands, "Corruptieschandaal rondom baggerproject Jakarta Bay [Skandal Korupsi di sekitar proyek pengerukan di Teluk Jakarta]," 18 April 2016, http://www.transparency.nl/2016/04/jakarta-bay/; Isyana Artharini, "KPK turun tangan, proyek reklamasi Teluk Jakarta terancam," BBC, 4 April 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160403_indonesia_kpk_reklamasi

[28] Ini adalah penjelasan yang diberikan oleh delegasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, selama pertemuan di kantor Both ENDS di Amsterdam pada 6 September 2016.

[29] Tempo.co, "Menteri Siti Sebut Reklamasi Pulau G Belum Bisa Jalan," 24 Oktober 2016, https://m.tempo.co/amphtml/read/ news/2016/10/24/214814543/Menteri-Siti-Sebut-Reklamasi-Pulau- G-Belum-Bisa-Jalan

[30] Lihat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016" dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016.

[31] Indonesia Investments, "Land Reclamation Indonesia: Jakarta's Artificial Islands Cause Controversy," [Reklamasi Pesisir di Indonesia: Pulau-Pulau Buatan di Jakarta Menimbulkan Kontroversi] 13 April 2016, http://www.indonesia-investments.com/nl/news/ todays-headlines/land-reclamation-indonesia-jakarta-s-artificial-islands-cause-controversy/item6704

[32] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, pp. 206-228, http://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/berita_terkini/2016/Putusan_193_G_LH_2016_PTUN_JKT.pdf. Lihat juga: Corry Elyda, Jakarta Post, "PTUN Reclamation verdict doesn't seem to worry city," 2 June 2016, http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/02/ptun-reclamation-verdict-doesn-t-seem-worry-city.html

[33] Agnes Anya, The Jakarta Post, "Developers bite the bullet in Jakarta reclamation," [Pengembang Menelan Pil Pahit di Reklamasi Jakarta] 1 Juni 2016, http://www.thejakartapost.com/news/2016/07/01/developers-bite-the-bullet--in-jakarta-reclamation.html

[34] Heyder Affan, Wartawan BBC Indonesia, "Ditolak nelayan, reklamasi Teluk Jakarta 'jalan terus'," 14 September 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160913_indonesia_reklamasi_jakarta_jalanterus

[35] Kompas.com, "Pemprov DKI Kalahkan Nelayan dalam Banding soal Izin Reklamasi Pulau G," 20 Oktober 2016, http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/20/16092951/pemprov.dki.kalahkan.nelayan.dalam.banding.soal.izin.reklamasi.pulau.g

[36] Nursita Sari,Kompas, "Nelayan Jadi Saksi dalam Sidang Gugatan" 23 Juni 2016, http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/23/17570351/nelayan.teluk.jakarta.akan.jadi.saksi.dalam.sidang.gugatan.reklamasi.pulau.f.i.dan.k

[37] Laporan yang ada sekarang memuat perkiraan yang berbeda. Sebuah laporan yang ditugaskan oleh Kota Rotterdam sebagai bagian dari jaringan Connecting Delta Cities [Kota-kota yang Terhubung dengan Delta], menyimpulkan bahwa 70 persen kebanjiran, lihat Molenaar, A. (City of Rotterdam), Aerts, J. (VU University Amsterdam), Dircke, P (Rotterdam University of Applied Sciences) dan Ikert, M. (C40 initiative), Connecting Delta Cities [Kota-kota yang Terhubung dengan Delta]. Resilent cities and Climate Adaption Strategies [Strategi Adaptasi Iklim dan Daya Lenting Kota], 2013, http://www.deltacities.com/documents/CDC_volume_3_Resilient_Cities_and_Climate_Adaptation_Strategies.pdf, p. 67

[38] Ibid.

[39] Tempo.co, "Banjir Rob Rendam Seluruh Kawasan Pantai Utara Jakarta", 6 Juni 2016, https://m.tempo.co/read/news/2016/06/06/083777275/banjir-rob-rendam-seluruh-kawasan-pantai-utara-jakarta

[40] Molenaar, A., City of Rotterdam, et al., ibid, h. 69.

[41] Kementerian Keuangan Indonesia, Pemerintah Belanda, *Master Plan*. National Capital Integrated Coastal Development [Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara] (selanjutnya disebut *Master Plan* NCICD), 1 Desember 2014, h. 14, http://ncicd.com/wp-content/upn loads/2014/10/MP-final-NCICD-LR.pdf

[42] Dian Dewi Purnamasari, Kompas.com, Jakarta Is Sinking at a Fast Rate. Land Subsidence Demands Concrete and Comprehensive Response, [Jakarta akan Tenggelam dalam Waktu Cepat. Amblasan Tanah Membutuhkan Respon yang Konkrit dan Komprehensif] 18 Maret 2016, http://print.kompas.com/baca/english/2016/03/18/Jakarta-Is-Sinking-at-a-Fast-Rate

[43] *Master Plan* NCICD, h. 25.

[44] Ibid.

[45] Dikutip dalam Deden Rukmana, "The Growth of Jakarta Metropolitan Area and the Sustainability of Urban Development in Indonesia" [Pertumbuhan Area Metropolitan Jakarta dan Keberlanjutan Pembangunan Kota di Indonesia], The International Journal of Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability, Volume 4(1), 2008.

[46] The Jakarta Post , "Land subsidence exacerbates flood risk in North Jakarta [Amblasan Tanah Memperburuk Risiko Banjir di Jakarta Utara]," 6 Juni 2016, http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/06/land-subsidence-exacerbates-flood-risk-north-jakarta.html

[47] Andreas, H., Abidin, H.Z., Gumilar, I., Land Subsidence Measurement in Jakarta [Pengukuran Amblasan Tanah di Jakarta] (slide 41). Presentation at Focus Group Discussion organised by Delatres [Presentasi pada Diskusi Kelompk Terfokus yang diselenggarakan oleh Deltares], 26 Mei 2015, https://www.deltares.nl/en/news/stop-pumping-groundwater-save-sinking-jakarta/. Lihat juga Abidin, H. Z., Andreas, H., Gumilar, I., Gamal, M., Fukuda, Y., Deguchi, T., 2009, Land Subsidence and Urban Development in Jakarta [Amblasan Tanah dan Pembangunan Perkotaan di Jakarta] (Indonesia). 7th FIG Regional Conference: Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment [Konferensi Regional FIG Ke-7: Data Spasial untuk Melayani Masyarakat: Tata Kelola Tanah dan Lingkungan], Building Capacity [Peningkatan Kapasitas], http://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/vietnam/papers/ts06f/ts06f_abidin_etal_3491.pdf.

[48] JMP, "Indonesia: estimates on the use of water sources and sanitation facilities [Indonesia: Perkiraan Pengguanaan Sumber Air dan Fasilitas Sanitasi] (1980 - 2015)," Lembar 8, 2015, http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Indonesia.xls

[49] Nila Ardianie, Kompas, "Water Needs and Land Subsidence in Jakarta" [Kebutuhan Air dan Amblasan Tanah di Jakarta], 22 October 2016.

[50] Irfan Zamzami and Nila Ardhianie, "An end to the struggle? Jakarta residents reclaim their water system [Akhir Perjuangan? Warga Jakarta merebut tata kelola airnya]," dalam: Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina and Olivier Petitjean (eds.), "Our public water future. The global experience with remunicipalisation [Masa Depan Air Publik Kami. Pengalaman di Dunia dengan Remunisipalisasi]," April 2015, Amsterdam,

http://www.municipalservicesproject.org/sites/municipalservicesproject.org/files/publications/Kishimoto-Lobina-Petitjean_Our-Public-Water-Future-Global-Experience-Remunicipalisation_April2015_FINAL.pdf

[51] Ibid, h. 44

[52] Melihat perbandingan antara total area dan penduduk, area di sekitar Jakarta (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, or Jabodetabek) mewakili sekitar 0.34 persen Indonesia (6,392 sq km vs 1,904,569 sq km). Dalam hal populasi, Jabodetabek dihitung 30.091.131 dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 255.461.700, yaitu sebesar 11,78 persen dari jumlah populasi, sumber: Wikipedia.

[53] JMP, 2015, ibid, Lembar 13.

[54] Lihat Deden Rukmana, ibid.

[55] Reformasi 19998 mensyaratkan desentralisasi kekuatan politik, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberi kekuasaan lebih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, serta pemilihan langsung kepala daerah.

[56] Nota Kesepahaman dari tahun 2012, ditandatangani oleh Kementerian Pekerja Umum Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Belanda, merupakan kerangka perjanjian di bidang air, berdasarkan pendekatan terpadu dan fokus pada 3 bidang kerjasama utama (pengelolaan air, air untuk pangan dan ekosistem serta pasokan air dan sanitasi) dan dua isu yang lintas sektoral (tata kelola air dan peningkatan kapasitas, perubahan iklim). Nota Kesepahaman menetapkan Komite Pengarah Bersama, yang akan bertemu setiap dua tahun untuk memutuskan proyek (percontohan) bersama dalam kerjasama (misalnya NCICD), lihat TRAID Wheel, 2015, http://www.traidwheel. nl/local-networks/advisory-platform/Indonesian-Netherlands-Partnership. Di bulan April 2015, Indonesia dan Belanda menandatangani Nota Kesepahaman yang diperbarui, yang mana mereka setuju untuk melanjutkan dan melangkah pada kerjasama mereka yang telah intensif dalam hal pengelolaan air dan menetapkan sebuah kerangka kerja untuk kerja sama ini untuk lima tahun berikutnya, lihat Netherlands Water Partnership [Kerjasama Air Belanda] (NWP) 2016, Majalah, https://www.nwp.nl/sites/default/files/2016magazine_indonesia_webversion2.pdf

[57] Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Jakarta Coastal Development Strategy [Strategi Pembangunan Pesisir Jakarta]. End-of-Project Review [Tinjauan Akhir Proyek]. Final Mission Report [Laporan Akhir Misi], 12 April 2012, http://www.partnersvoorwater.nl/wp-content/uploads/2012/07/FinalMissionReportdefversion.pdf

[58] Meliputi Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV, Grontmij/ SWECO, Deltares dan Ecorys.

[59] Netherlands Water Partnership (NWP), 2016 Magazine, p. 9, https://www.nwp.nl/sites/default/files/2016magazine_indonesia_webversion2.pdf

[60] *Master Plan* NCICD, h. 39.

[61] *Master Plan* NCICD, h. 38.

[62] Situs Web NCICD, http://en.ncicd.com/ncicd/tujuan-ncicd/

[63] *Master Plan* NCICD, h. 35.

[64] Tender NCICD2 Pemerintah Belanda, Layanan terkait Proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara di Indonesia. Bijlage 10 The Netherlands support to NCICD2 [Lampiran 10 Dukungan Belanda untuk NCICD2] (2016-2019), h. 7, https://www.tenderned.nl/tendernedweb/aankondiging/detail/documenten/akid/74bde2e18c26e6ac643dce61061e51ee/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/192777/cvp/join;jsessionid=3B9575A851238138FE3DEC0F12A4CA43.node6

[65] *Master Plan* NCICD, h. 73.

[66] *Master Plan* NCICD, h. 18.

[67] Fabian Januarius Kuwado, Kompas.com, "Reklamasi 17 Pulau Terintegrasi dengan NCICD, Bagaimana Nasib Swasta?," 27 April 2016, http://nasional.kompas.com/read/2016/04/27/22064841/Reklamasi.17.Pulau.Terintegrasi.dengan.NCICD.Bagaimana.Nasib.Swasta

[68] Pada 21 November 2016, Menteri Melanie Schutz van Haegen bertemu di Jakarta dengan organisasi Belanda Both ENDS dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Amrta Institute for Water Literacy, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Solidaritas Perempuan

[69] Situs Web Witteveen+Bos, http://www.witteveenbos.nl/nl/Master Plan-jakarta (accessed 5.12.2016)

[70] *Master Plan* NCICD, h. 59.

[71] *Master Plan* NCICD, h. 47.

[72] *Master Plan* NCICD, h. 49.

[73] "Sumber utama pendanaan adalah dari penjualan tanah. Sebanyak 45% dari total area akan ditutupi dengan bangunan, 55% akan digunakan untuk infrastruktur dan wilayah terbuka hijau serta area rekreasi. Kawasan Pusat Bisnis ini akan mencakup 44% dari area yang dibangun, 8% diperuntukkan bagi perumahan kelas atas, 30% untuk perumahan kelas menengah, dan 17% untuk perumahan kelas bawah.", ibid, h. 63.

[74] Tender NCICD2 Pemerintah Belanda, Lampiran 10, ibid, h. 5

[75] Surat elektronik untu SOMO oleh Witteveen+Bos Indonesia, atas nama Konsorsium NCICD consortium, 5 Desember 2016.

[76] Jawaban surat elektronik oleh Kementerian Luar Negeri Belanda terhadap pertanyaan tertulis yang diajukan SOMO kepada Kedutaan Belanda di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan 14 September 2016.

[77] Surat dari Witteveen+Bos (26 September 2016) dan Royal Haskoning DHV (12 Desember 2016) untuk SOMO.

[78] Netherlands Water Partnership, Berita, Boskalis and Van Oord to construct artificial island off the coast of Jakarta, Indonesia [Boskalis dan Van Oord akan membangun pulau buatan di pesisir Jakarta, Indonesia], 29 Januari 2015, http://www.dutchwatersector.com/news-events/news/12948-boskalis-and-van-oord-to-construct-artificial-island-off-the-coast-of-jakarta.html

[79] Situs Web Van Oord, http://www.vanoord.com/nl/nieuws/2012-opdracht-voor-aanleg-eiland-bij-jakarta

[80] Atradius DSB, Daftar Kontrak yang Diberikan tahun 2015, https://atradiusdutchstatebusiness.nl/documents/ekvpolissen_2015.pdf

[81] Ursula Florene, Rappler.com, "Ketika reklamasi bukan Cuma masalah Jakarta," 28 April 2016, http://www.rappler.com/indonesia/131034-penolakan-tambang-pasir-ilegal-banten; BantenNews, "Kapal Queen of the Netherlands tak miliki Izin Eksploitasi Pasir Laut di Ciwandan," 31 Maret 2016, https://www. bantennews.co.id/kapal-queen-of-the-netherlands-tak-miliki-izin-eksploitasi-pasir-laut-di-ciwandan

[82] Wawancara Both ENDS dengan nelayan selama kunjungan ke Pulau Pari, 24 April 2016.

[83] Majalah Tempo, "Pasir Illegal di Teluk Jakarta," 1-7 Juni 2015; sebuah artikel daring dalam bahasa Inggris diterbitkan di Tempo.co, "Five Islands in Jakarta Bay Gone Due to Illegal Sand Mining" [Lima Pulau di Teluk Jakarta Menghilang Akibat Penambangan Pasir Ilegal], 8 Mei 2015, http://en.tempo.co/read/news/2015/05/08/057664573/Five-Islands-in-Jakarta-Bay-Gone-Due-to-Illegal-Sand-Mining

[84] DutchWaterSector.com, Royal HaskoningDHV wins assignment for Indonesia's largest port extension in Jakarta [Royal HaskoningDHV memenangkan kontrak untuk perluasan pelabuhan terbesar di Indonesia], 16.5.2013, http://www.dutchwatersector.com/news-events/ news/6040-royal-haskoningdhv-wins-assignment-for-indonesia-s-largest-port-extension-in-jakarta.html

[85] Agnes Anya, The Jakarta Post, "Developers bite the bullet in Jakarta reclamation, [Pengembang Menelan Pil Pahit di Reklamasi Jakarta]" 1 Juni 2016, http://www.thejakartapost.com/news/2016/07/01/developers-bite-the-bullet--in-jakarta-reclamation.html

[86] NWP website, "Topsector Water ondersteunt ontwikkeling Port of Jakarta concept," 30 Oktober 2015, https://www.nwp.nl/ nieuws/topsector-water-ondersteunt-ontwikkeling-port-jakarta-concept

[87] Witteveen+Vos & Royal HaskoningDHV, "The development of The Jakarta Port Concept, Pressure Cooker, [Konsep Pembangunan Pelabuhan Jakarta, Kegelisahan]" 26-30 October 2015, Draft Final Report http://files.nwp.nl/extranet/ Indonesieplatform/Nieuwsbrieven/2016-1/PC/Final%20Draft%20Report%20Pressure%20Cooker%20%20v24_11.pdf

[88] DutchWaterSector.com http://www.dutchwatersector.com/our-history/

[89] Panteia, Mei 2015, "De Watersector Exportindex (WEX), 1995-2014," h. 4, https://www.nwp.nl/sites/default/files/wex_2014_def. pdf

[90] Situs Web Pemenerinta Belanda, "Water top sector [sektor perairan unggulan]," https://www.government.nl/topics/water-management/ contents/water-top-sector

[91] Situs Web Programme Partners for Water, http://www. partnersvoorwater.nl/?page_id=62

[92] Pemerintah Belanda/Rijksoverheid, "Convergerende stromen - Internationale Waterambitie," Februari 2016, h. 11, Annex to policy note Kamerstuk 32 605, No. 177, 2015-2016, Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking [Development policy]," https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/beleidsnota-s/2016/02/03/convergerende-stromen- internationale-waterambitie

[93] Internationale Water Ambitie. Brosur, h. 11, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ brochures/2016/02/04/internationale-waterambitie/ro-brochure- wia.pdf

[94] SOMO/Both ENDS, "Dredging in the dark. An analysis of the Dutch dredging industry's failure to identify, prevent, and mitigate adverse impacts in dredging the Suez Canal [Mengeruk dalam Kegelapan. Sebuah Analisis terhadap Kegagalan Industri Pengerukan Belanda dalam Mengidentifikasi, Mencegah dan Mengurangi Dampak yang Merugikan pada Pengerukan Terusan Suez]," Maret 2016, h. 11, https://www.somo.nl/nl/dredging-in-the-dark

[95] Atradius DSB, Daftar Kontrak yang Diberikan di tahun 2015, https://atradiusdutchstatebusiness.nl/documents/ekvpolissen_2015.pdf

[96] Mosi Parlemen (Motie van het lid Visser) Kamerstuk 34 300, No. 20, 2015-2016, Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 [Budget decision on the Deltafonds for the year 2016], https://zoek. officielebekendmakingen.nl/dossier/34300-J/kst-34300-J-20?resul tIndex=9&sorttype=1&sortorder=4

[97] Catatan Kebijakan Kamerstuk 27 625 375, No., Waterbeleid [Water policy], https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/27/exportondersteuning-van-de- watersector

[98] Lihat Situs Web ECA Watch, http://www.eca-watch.org/

[99] SOMO/Both ENDS, "Dredging in the Dark. An analysis of the Dutch dredging industry's failure to identify, prevent, and mitigate adverse impacts in dredging the Suez Canal [Mengeruk dalam Kegelapan. Sebuah Analisis terhadap Kegagalan Industri Pengerukan Belanda dalam Mengidentifikasi, Mencegah dan Mengurangi Dampak yang Merugikan pada Pengerukan Terusan Suez]," Maret 2016, https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Dredging-in-the-Dark.pdf

[100] Ivo van der Linden, "Indonesia-Netherlands Partnership in the field of water and the joint steering committee [Kerjasama Indonesia-Belanda di bidang air dan komite pengarah bersama]," 2015 http://www.traidwheel.nl/local-networks/advisory-platform/ Indonesian-Netherlands-Partnership

[101] Dutch Water sector, "New Garuda shaped master plan gives Jakarta new perspective on

coastal city development [Bentuk Garuda Baru dalam *Master Plan* memberikan Jakarta perspektif baru tentang pembangunan kota pesisir]," 22 November 2013, http://www.dutchwatersector.com/news-events/ news/8608-new-garuda-shaped-master-plan-gives-jakarta-new- perspective-on-coastal-city.html

[102] Pemerintah Belanda, "The Netherlands to assist Indonesia in Coastal Reinforcement and Coastal Development [Belanda mendampingi Indonesia dalam Pemulihan dan Pembangunan Pesisir]," 23 November 2016 https://www.government.nl/latest/ news/2016/11/23/the-netherlands-to-assist-indonesia-in-coastal- reinforcement-and-port-development

[103] Lihat uraian pendekatan baru dalam dokumen kebijakan: "A World to Gain. A New Agenda for Aid, Trade and Investment [Dunia yang akan Diraih. Sebuah Agenda Baru untuk Bantuan, Perdagangan dan Investasi]," April 2013, https://www.government.nl/binaries/government/ documents/reports/2013/04/30/a-world-to-gain/a-world-to-gain- en-1.pdf

[104] Pemerintah Belanda, https://www.government. nl/topics/development-cooperation/contents/the-development- policy-of-the-netherlands/water-management

[105] https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us

[106] Aidenvironment, "Indonesia. Positioning survey for the Dutch Water Sector [Indonesia. Survei Posisi untuk Sektor Perairan Belanda] ," April 2015, http://www.aidenvironment.org/media/uploads/documents/Indonesia_Country_Report_Positioning_Study_Water_OS.pdf

[107] Aidenvironment, "Indonesia. Positioning survey for the Dutch Water Sector [Indonesia. Survei Posisi untuk Sektor Perairan Belanda]," April 2015, http://www.aidenvironment.org/media/ uploads/documents/Indonesia_Country_Report_Positioning_ Study_Water_OS.pdf

[108] Kementerian Luar Negeri Belanda, "HGIS Jaarverslag 2008," https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ jaarverslagen/2009/06/19/jaarverslag-2008-homogenegroep- internationale-samenwerking-hgis/hgis-jaarverslag-2008.pdf

[109] JanJaap Brinkman, "Jakarta Flood Hazard Mapping Framework [Kerangka Kerja Pemetaan Bahaya Banjir Jakarta]," http://www.hkv.nl/upload/publication/Jakarta_Flood_Hazard_Mapping_Framework_MH.pdf

[110] Witteveen+Bos, "Protecting Jakarta against floods [Melindungi Jakarta dari Ancaman Banjir]," 17 January 2013, http://www.witteveenbos.com/en/news/soort/archief/ bericht/50392-protecting-subsiding-jakarta-against-floods/ newspage/3

[111] Angka diambil dari evaluasi program Partners for Water 2. http://www.partnersvoorwater2.nl/rapportages.html

[112] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2011/07/06/nederlandse-experts-helpen-jakarta-in-strijd-tegen-zee

[113] Jawaban surat elektronik oleh Kementerian Luar Negeri Belanda terhadap pertanyaan tertulis SOMO kepada Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, 31 Agustus 2016 dan 14 September 2016.

[114] Lampiran 10, tender NCICD pemerintah Belanda: National Capital Integrated Coastal Development 2 (NCICD2) (2016-2019), Belanda mendukung untuk NCICD2, 2016-2019, Gambaran layanan untuk Konsultasi Umum, Bijlage 10, h. 3, https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/74bde2e18c26e6ac643dce61061e51ee/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigigen/map/a07276e21d21f0aa1f17d8c8878733d0/da/false/cid/47442/cvp/join

[115] Pemerintah Belanda, Berita, "The Netherlands and Indonesia sign maritime collaborative agreement [Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian kolaborasi maritim," 26 April 2016, https://www.government.nl/latest/news/2016/04/26/ the-netherlands-and-indonesia-sign-maritime-collaborative-agreement

116 Pemerintah Belanda/Rijksoverheid, "De Nederlandse Maritiem Strategie 2015-2025," h 18-20. https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/rapporten/2015/01/16/de-nederlandse-maritieme-strategie-2015-2025

117 Nederland Maritiem Land, "Indonesia Maritime Hot Spot," Juli 2015, http://www.maritiemland.nl/maritieme-sector/publicaties/ indonesia-maritime-hotspot/

118 FMO, PT Jakarta Tank Terminal, https://www.fmo.nl/project- details/45312

119 Netherlands Water Partnership , "Topsector water ondersteunt ontwikkeling Port of Jakarta concept," 30 Oktober 2015 https://www.nwp.nl/nieuws/topsector-water-ondersteunt-ontwikkeling-port-jakarta-concept

120 http://files.nwp.nl/extranet/Indonesieplatform/ Nieuwsbrieven/2016-1/PC/Final%20Draft%20Report%20Pressure%20Cooker%20%20v24_11.pdf, h. 11

121 http://www.dutchwatersector.com/news-events/news/15211-port-of-rotterdam-starts-feasibility-study-to-deepen-kuala- tanjung-port.html

[116] Pemerintah Belanda/Rijksoverheid, "De Nederlandse Maritiem Strategie 2015-2025," h 18-20. https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/rapporten/2015/01/16/de-nederlandse-maritieme- strategie-2015-2025

[117] Nederland Maritiem Land, "Indonesia Maritime Hot Spot," Juli 2015, http://www.maritiemland.nl/maritieme-sector/publicaties/indonesia-maritime-hotspot/

[118] FMO, PT Jakarta Tank Terminal, https://www.fmo.nl/project- details/45312

[119] Netherlands Water Partnership , "Topsector water ondersteunt ontwikkeling Port of Jakarta concept," 30 October 2015 https://www.nwp.nl/nieuws/topsector-water-ondersteunt-ontwikkeling-port-jakarta-concept

[120] http://files.nwp.nl/extranet/Indonesieplatform/ Nieuwsbrieven/2016-1/PC/Final%20Draft%20Report%20Pressure%20Cooker%20%20v24_11.pdf, p. 11

[121] http://www.dutchwatersector.com/news-events/news/15211- port-of-rotterdam-starts-feasibility-study-to-deepen-kuala- tanjung-port.html

[122] *Master Plan* NCICD , h. 37.

[123] *Master Plan* NCICD, h. 25.

[124] *Master Plan* NCICD, h. 37.

[125] *Master Plan* NCICD, h. 16.

[126] *Master Plan* NCICD, h. 27.

[127] Misalnya, Pemerintah Provinsi Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan diskusi tentang amblasan tanah di tahun 2015, lihat Deltares, "Stop pumping groundwater to save sinking Jakarta? [Penghentian penyedotan air tanah akan menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam?]" 10 Juni 2015, https://www.deltares.nl/en/news/stop-pumping-groundwater-save-sinking-jakarta/

[128] Kementerian Pekerjaan Umun (PU), "Cipta Karya optimis capai target 100-0-100 2019 [working group optistic about target 100-0-100 in 2019]," 26 Juni 2016, http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/?p=1377

[129] Republika Online, "Ahok inginkan cakupan pelayanan air minum DKI 100 persen". 22 Mei 2015, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/05/22/noqjjb-ahok-ingin-cakupan-pelayanan-air-minum-dki-100-persen

[130] The Jakarta Post, "Editorial: Stop Jakarta sinking [Editorial: Hentikan Jakarta dari Ancaman Tenggelam]" 10 Oktober 2015, http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/10/editorial-stop-jakarta-s-sinking.html

[131] G. Erkes et al, "Sinking Coastal Cities [Kota-Kota Pesisir yang Tenggelam]," Proc. IAHS, 372, 189–198, 2015 p. 196, http://www.proc-iahs.net/372/189/2015/piahs-372-189-2015.pdf; Deltares, "Sinking cities. An integrated approach towards solutions [Kota-Kota yang Tenggelam. Menuju Sebuah Solusi Pendekatan Terpadu]," 2015, https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/09/Sinking-cities.pdf

[132] JanJaap Brinkman, wawancara melalui surat elektronik dengan Jakarta Post, "Editorial Stop Jakarta sinking [Editorial: Hentikan Jakarta dari Ancaman Tenggelam]," 10 Oktober 2015.

[133] Ibid.

[134] Yus Budiyono et al, "River flood risk in Jakarta under scenarios of future change [Risiko Luapan Sungai di Jakarta di bawah Skenario Perubahan Masa Depan]," Natural Hazards and Earth System

Sciences, Maret 2016, h. 759-760, http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/16/757/2016/nhess-16-757-2016.pdf

[135] Ibid, h. 69.

[136] TNI, "Jakarta court cancels world's biggest water privatisation [Pengadilan di Jakarta Membatalkan Privatisasi Air Terbesar]," 25 Maret 2015 https://www.tni.org/en/pressrelease/jakarta-court-cancels-worlds-biggest-water-privatisation-after-18-year-failure

[137] TNI, Jakarta citizens final challenge in the supreme court [Gugatan Terakhir Warga Jakarta di Mahkamah Agung], https://www.tni.org/en/article/jakarta-citizens-final-challenge-in-the-supreme-court

[138] Dukungan Belanda untuk NCICD2 (2016-2019), h 7 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/74bde2e18c26e6ac643dce61061e51ee/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/192777/cvp/join;jsessionid=3B9575A851238138FE3DEC0F12A4CA43.node6

[139] Aidenvironment, "Indonesia. Positioning survey for the Dutch Water Sector [Indonesia. Survei Posisi untuk Sektor Perairan Belanda]," April 2015, h. 50. http://www.aidenvironment.org/media/uploads/documents/Indonesia_Country_Report_Positioning_Study_Water_OS.pdf

[140] DHI, "Jakarta Bay recommendation paper [kertas rekomendasi Teluk Jakarta]," Draf Laporan Akhir, 31 Oktober 2012, h. 64, ibid.

[141] Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, "Joint Letter of Concern on the Government of the Netherlands Support on Reclamation of 17 Artificial Islands and NCICD Project in Jakarta Bay [Surat Bersama Kekhawatiran atas Dukungan Pemerintah Belanda terhadap Reklamasi 17 Pulau Palsu dan Proyek NCICD di Teluk Jakarta]," 28 Oktober 2016.

[142] Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Dampak Sosial Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan, Reklamasi Teluk Jakarta". 19 September 2016.

[143] Kementerian Kelautan dan Perikanan, ibid. Penelitian ini menunjukkan bahwa, jika semua kegiatan penangkapan ikan di Teluk Jakarta dihentikan, total kerugian produksi akan berjumlah sekitar Rp. 766,6 juta. Nilai tukar rata-rata tahunan untuk tahun 2016 yang digunakan untuk mengkonversi Rupiah ke Euro adalah 0,000068.

[144] Wawancara dengan Koos Wieriks di Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda, Den Haag, 21 Juni 2016.

[145] L. Beumer and M. Wienhoven, Masterplan NCICD, Economic Cost Benefit Analyses [Analisis Ekonomi Untung-Rugi], 28 Februari 2014, h. 18, http://docs.ncicd.com/documents/economic-cost-benefit-analysis/

[146] Surat Elektronik kepada SOMO oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam merespon tinjauan komitmen oleh Konsorsium Belanda, 6 Desember 2016.

[147] Puput Tripeni Jeniman & Yuliawati, CNN Indonesia, "Warga Muara Angke sambut baik tertundanya penggusuran," 13 Juli 2016 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160713183104-20-144611/warga-muara-angke-sambut-baik-tertundanya-penggusuran/

[148] Ketimpangan nampak pada Rasio Gini Jakarta sebesar 0,411 di Maret 2016 yang semakin dalam jika dibandingan dengan rasio nasional sebesar 0,397 pada periode yang sama, lihat Badan Pusat Statistik, "Gini Ratio menurut propinsi," https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116. Koefisien Gini menghitung ketimpangan antara nilai-nilai dari frekuensi distribusi (misalnya, tingkat pendapatan), dimana nol mewakili kesetaraan yang sempurna dan 1 mewakili ketimpangan maksumum.

[149] Badan Pusat Statistik, "Jumlah penduduk miskin untuk propinsi," https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219 https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119

[150] Tempo.co, "Phytoplanton Population Explosion Causes Fishes To Die [Ledakan Populasi Fitoplanton Menyebabkan Kematian Ikan]," 3 Desember 2015, http://en.tempo.co/read/news/2015/12/03/206724396/Phytoplankton-Population-Explosion-Causes-Fishes-to-Die-LIPI

[151] Breckwoldt, A., et al., "Uses and management perspectives for the larger Jakarta Bay Area, Indonesia, A review of stressors [Perspektif Penggunaan dan Pengelolaan untuk Area Teluk Jakarta yang Lebih Luas, Indonesia, sebuah Tinjauan untuk stressor]," Marine Pollution Bulletin, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.08.040

[152] Bernardus Djonoputro, quoted in Kompas, "Investasi Belanda untuk Kawasan Terpadu Pesisir Dianggap Hanya "Akal-akalan"", 17 Juni 2015, http://indonesiasatu.kompas.com/read/2015/06/17/154121721/Investasi.Belanda.untuk.Kawasan.Terpadu.Pesisir.Dianggap.Hanya.Akal-akalan

[153] F.X. Suryadi, M.A. Azhari, F.M Marpaung, Sumi Amariene Hamim, "Compartmentalization of Polder System Related to the Giant Sea Wall Construction in Jakarta Area [Kompartementalisasi Sistem Polder Terkait Pembangunan Tanggul Laut di Wilayah Jakarta]," http://89.31.100.18/~iahrpapers/87151.pdf

[154] *Master Plan* NCICD, h. 94.

[155] Ibid.

[156] World Bank, "Project Appraisal Document on Proposed Credit to the Republic of Indonesia for a third water supply and sanitation for low income communities (Pamsjmas) project [Dokumen Penilaian Proyek dalam Usulan Kredit kepada Republik Indonesia untuk pasokan air ketiga dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Pamsjmas)]," 1 Juni 2006, Lampiran 1. Diperoleh pada 7 Maret 2010.

[157] Sita W. Dewi, The Jakarta Post, "Jakarta dreams of proper sewerage system [Mimpi Jakarta untuk Sistem Pembuangan Limbah yang Layak]," 17 February 2014,

http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/17/jakarta-dreams-proper-sewerage-system.html

[158] Medha Basu, GovInsider, "96% of Jakarta has no sewage system, Government plans US$6.8 billion wastewater treatment for the city [96% Jakarta tidak memiliki sistem pembuangan limbah, Pemerintah berniat menanamkan investasi sebesar 6,8 dollar AS untuk pengolahan limbah di kota]," 14 Juli 2016, https://govinsider.asia/inclusive-gov/96-of-jakarta-has-no-sewage-system/

[159] Dukungan Belanda untu NCICD2 (2016-2019), h. 7.

[160] *Master Plan* NCICD, h. 64 and 93.

[161] Vince Beiser, Wired, "The Deadly Global War for Sand [Perang Global yang Mematikan untuk Pasir] ," 26 Maret 2015, https://www.wired.com/2015/03/illegal-sand-mining/

[162] Wawancara Both ENDS dengan nelayan lokal selama kunjungan ke Pulau Pari, 24 April 2016.

[163] Majalah Tempo, "Pasir Illegal di Teluk Jakarta," 1-7 Juni 2015; artikel daring dalam bahasa Inggris diterbitkan di Tempo.co, "Five Islands in Jakarta Bay Gone Due to Illegal Sand Mining [Lima Pulau Menghilang di Teluk Jakarta Akibat Penambangan Pasir Ilegal]," 8 Mei 2015, http://en.tempo.co/read/news/2015/05/08/057664573/Five-Islands-in-Jakarta-Bay-Gone-Due-to-Illegal-Sand-Mining

[164] Jan De Nul press release, "Jan De Nul Group haalt nieuwe projecten binnen in Azië en Australië," 18 March 2013, http://www.jandenul.com/nl/pers/persberichten/jan-de-nul-group-haalt-nieuwe-projecten-binnen-in-azie-en-australie

[165] Kontan.co.id, "Walhi: Pasir reklamasi Jakarta diperoleh ilegal," 27 April 2016, http://nasional.kontan.co.id/news/walhi-pasir-reklamasi-jakarta-diperoleh-ilegal

[166] *Master Plan* NCICD, h. 65.

[167] *Master Plan* NCICD, h. 67.

[168] *Master Plan* NCICD, h. 63.

[169] Wouter de Hamer, Ad Sannen, PMU NCICD, "Report Pre-market sounding, PMU-Doc-131206," 6 Desember 2013, http://docs.ncicd.com/documents/report-pre-market-sounding/

[170] http://ncicd.com/wp-content/uploads/2014/10/MP-final-NCICD-LR.pdf, p 120.

[171] Lihat Situs Web perusahaan di http://arthagraha.net/about-us/

[172] Berbagai media di Indonesia merujuk pada Winata sebagai pemilik dari Artha group, dalam database perusahaan Orbis. Namun, tidak ada catatan tentang Jaringan Arta Graha atau Tomy Winata yang tersedia.

[173] Yoga Rusmana, Bloomberg News, "Tin Exports From Biggest Shipper to Shrink as Smelter Shut [Ekspor Timah dari Pengirim Terbesar Menyusut Seiring dengan Tutupnya Smelter]," 23 Februari

2016, http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-23/refined-bangka-tin-ceases-operations-amid-environmental-concerns

[174] transindonesia.co, "Reklamasi Pantai Untung Podomoro dan Tommy Winata, ," 26 March 2016, http://transindonesia.co/2016/03/reklamasi-pantai-untung-podomoro-dan-tommy-winata/; PMU NCICD dalam laporan Pra-Penjualan NCICD (ibid.) menyatakan bahwa perusahaan "memiliki beberapa konsesi pasir di Selat Sunda dan [merupakan] pemilik dari pulau-pulau di Teluk Jakarta", h. 6.

[175] Detik Finance, "Cerita Tomy Winata yang melirik proyek Giant Seawall", 17 Juli 2016, http://finance.detik.com/read/2014/07/17/125114/2639986/4/cerita-tomy-winata-yang-melirik-proyek-giant-sea-wall-jakarta

[176] Christian Chua, "Chinese big business in Indonesia: the state of capital [Bisnis besar Cina di Indonesia: ibukota negara]." London: Routledge, 2008, h. 172, 175, 181. Peter King, "Corruption ruins everything: Gridlock over Suharto's legacy in Indonesia (Part 1) ["Korupsi menghancurkan segalanya: Kemacetan atas Warisan Soeharto di Indonesia (Bagian 1)]," h. 13, www.apijf.org/--Peter-King/2679/article.pdf

[177] George Aditjondro, "Financing Human Rights Violations in Indon & E.T [Membiayai Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia & E.T]," 20 November 2000, https://groups.google.com/forum/#!topic/misc.activism.progressive/5UPOG56Z4Hs

[178] Rahmadian Fadillah, Merdeka.com, "Kisah Winata bangun asrama Kopassus di Cimanggis," 25 September 2014, https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-tommy-winata-bangun-asrama-kopassus-di-cimanggis.html

[179] BeritaSatu.com, "Tomy Winata: Hubungan dengan Militer Normal Saja," 20 April 2013, http://www.beritasatu.com/ekonomi/109145-tomy-winata-hubungan-dengan-militer-normal-saja.html

[180] Detik-News, "Penjualan Saham TNI di Bank Artha Graha dipertanyakan DPR," 8 September 2005, http://news.detik.com/berita/437794/penjualan-saham-tni-di-bank-artha-graha-dipertanyakan-dpr

[181] Situs Web Bank Artha Graha, Dewan Komisaris http://www.arthagraha.com/main/statics/dewan-komisaris/3

[182] The Guardian, "UN indicts general for East Timor Crimes [PBB Mendakwa Jenderal untuk Kejahatan terhadap Timor Timur]," 25 Februari 2003, https://www.theguardian.com/world/2003/feb/25/indonesia.unitednations

[183] Tempo.co, "Soal Reklamasi Teluk Benoa, Gubernur Bali Tak Mau Disalahkan," 22 Juni 2016, https://m.tempo.co/read/news/2016/06/22/058782285/soal-reklamasi-teluk-benoa-gubernur-bali-tak-mau-disalahkan; Johnny Langenheim, "Battle for Bali: campaigners fight back against unchecked development [Pertarungan Bali: pengkampanye menyerang balik pembangunan bermasalah]," The Guardian, 22 Oktober 2014, https://www.theguardian.com/environment/the-coral-triangle/2014/oct/22/battle-for-bali-campaigners-fight-back-against-unchecked-development

[184] PMU NCICD, ibid.

[185] Megapolitan, "Ahok: Kalau Benar, PT APL Khianati Saya Juga, ," 1 April 2016, http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/01/20313201/Ahok.Kalau.Benar.PT.APL.Khianati

[186] PMU NCICD, ibid, h. 13-14.

[187] Ibid., see also Aidenvironment, "Palmoil Sustainability Assessment of Indofood Agriresources [Penilaian Sawit Berkelanjutan atas sumber agri Indofood]," September 2015, https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/14786/attachments/original/1442856231/Full_Report_Palm_Oil_Sustainability_Assessment_of_Indofood_Agri_Resources.pdf?1442856231; Rainforest Action Network, Oppuk, International Labor Rights Forum, "The Human Cost of Conflict Palm Oil [Kerugian Manusia terhadap Konflik Sawit]," Juni 2016, https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668; Rainforest Action Network, Regnskogfonde, "A loophole the size of Indonesia [Sebuah Celah Ukuran di Indonesia]," September 2015, https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/14786/attachments/original/1442970152/RAN_Loophole_The_Size_of_Indonesia.pdf?1442970152

[188] Lihat, misalnya, Azyumardi Azra, "Koneksi, Kolusi and Nepotism: Culturally embedded? The Indonesian experience of combatting negative wasta ["Koneksi, Kolusi dan Nepotisme: Budaya yang mengakar? Pengalaman Indonesia dalam memerangi wasta negatif]" dalam Mohamed Ramady (ed.), "The political economy of Wasta: the use and abuse of social and capital networking [Ekonomi politik Wasta: penggunaan dan penyalahgunaan jaringan modal dan sosial]," Springer, London, 2016, pp. 161-172.

[189] OEDC DAC Tinjauan Sejawat Belanda 2017, Memorandum oleh Belanda, September 2016, h. 20.

[190] *Master Plan* NCICD, h. 13.

[191] *Master Plan* NCICD, h. 77.

[192] OEDC DAC Tinjauan Sejawat Belanda 2017, Memorandum oleh Belanda, September 2016, h. 20.

[193] Surat dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk Perdana Menteri Rutte.

[194] Surat elektronik kepada SOMO oleh Witteveen+Bos Indonesia, atas nama Konsorsium NCICD, 5 Desember 2016.

[195] Lilianne Ploumen berbicara pada Konferensi tentang Ketimpangan 'Leaving No One Behind' ['Tiada yang Tertinggal'], diselenggarakan oleh Overseas Development Institute, London, 8 Februari 2016. https://www.government.nl/documents/speeches/2016/02/08/speech-by-minister-ploumen-at-the-conference-on-inequality-hosted-by-the-overseas-development-institute

[196] OEDC DAC Tinjauan Sejawat Belanda 2017, Memorandum oleh Belanda, September 2016, h. 24.

[197] KIARA, "Pembangunan untuk siapa," 2009.

[198] Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia, "Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

[199] Ministerie van Buitenlandse Zaken [Kementerian Luar Negeri], "Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen. [A world to gain: A New Agenda for Aid, Trade and Investment]," 5 April 2016, h. 37-38.

[200] Kementerian Luar Negeri, Economic Affairs and Infrastructure and the Environment, "Converging Streams – An international Water Ambition. Dutch framework for cooperation [Menyatukan Arus – Sebuah Target Air Internasional]," 11 April 2016, h. 7, http://www.waterinternationaal.nl/files/documents/iwa_rapportvorm_en.pdf

[201] Ibid., h. 8.

[202] Ibid., h. 7-8.

[203] *Master Plan* NCICD menyebutkan beberapa pertemuan konsultasi. Nelayan setempat di Muara Angke mendengar salah satu pertemuan konsultasi yang dilakukan di Universitas Indonesia.

[204] Safrin La Batu. The Jakarta Post, "NCICD doing more harm than good, scientist claim [NCICD lebih banyak membahayakan ketimbang menguntungkan, klaim ilmuwan]," 27 Juni 2016 http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/27/ncicd-doing-more-harm-good-scientists-claim.html Evi Mariani, The Jakarta Post, "Cheaper solution for subsidence offered [Solusi yang lebih murah ditawarkan]," 20 Mei 2016, http://www.thejakartapost.com/news/2016/05/20/cheaper-solution-subsidence-offered.html; Kompas, "Hati-hati dengan keputusan NCICD [Careful with NCICD]," 29 September 2016 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/29/18000041/hati-hati.putuskan.ncicd.belum.ada.kajian.komprehensif.soal.dampak.menyeluruh

[205] Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, "Jakarta Coastal Development Strategy [Strategi Pembangunan Pertahanan Pesisir]. End-of-Project Review [Tinjauan Akhir Proyek]. Final Mission Report [Laporan Misi]," 12 April 2012, h. 21, http://www.partnersvoorwater.nl/wp-content/uploads/2012/07/FinalMissionReportdefversion.pdf.

206 Ibid, h. 3.

[207] Kementerian Pekerjaan Umum/Tim Banjir Jakarta Indonesia – Belanda, "JCDS – Aturan-main, 30 September 2011, h. 32; art 2.4.1.

[208] Wawancara Both ENDS dengan Heru Waluyo Koesworo, Direktur, Kendali Pencemaran Pesisir dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 27 April 2016.

[209] Witteveen+Bos, Grontmij, Ecorys, Kuiper Compagnons, Triple A and Deltares, "NCICD SEA Building Block report [Laporan Kerangka Kajian Lingkungan Hidup Strategis NCICD]," 8 September 2015, Reports NCICD C5.1 - NCICD C5.7.

[210] Paragraf ini diadaptasi dari Bab 3 "Involving communities in Indonesia: Promoting Community Participation in Integrated Water Resources Management [Melibatkan masyarakat di Indonesia: Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu]". 2016. Both ENDS dan IndoWater CoP. Lihat: http://www.bothends.org/nl/Publicaties/document/160/Involving-communities-in-Indonesia-Promoting-Community-Participation-in-Integrated-Water-Resources-Management

[211] Both ENDS, "Involving communities in Indonesia. Promoting Community Participation in Integrated Water Resources Management (IWRM) [Melibatkan masyarakat di Indonesia: Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu]," April 2016, http://www.bothends.org/uploaded_files/document/3def_IndoWaterCoP_digitaal.pdf

[212] Wawancara Both ENDS dengan Bart Teeuwen, ahli hukum dan kelembagaan sumber daya air. September 2016.

[213] Lihat Water Governance Centre, Maret 2016, "Building blocks for good water governance [Membangun Kerangka untuk Tata Kelola Air yang Baik]," http://watergovernance.s3.amazonaws.com/files/P085-01-16-006-eindpubBB.pdf, p. 50.

[214] Wawancara Both ENDS dengan Bart Teeuwen, ibid.

[215] Wawancara dengan Professor Ernan Rustiadi, Institut Pertanian Bogor "Water For all: participatory river basin management in Indonesia [Air untuk Semua: pengelolaan DAS yang partisipatif di Indonesia," 2015. Lihat https://youtu.be/zBQX72Lleks

[216] Jakarta Post, "Govt to tear down 250 illegal villas in Puncak [Pemerintah menghancurkan 250 villa ilegal di Puncak]," 4 Maret 2009, http://www.thejakartapost.com/news/2009/03/04/govt-tear-down-250-illegal-villas-puncak.html

[217] The Jakarta Post, "Ministry to tear down 300 villas in Puncak [Kementerian menghancurkan 300 villa di Puncak]," 11 November 2013, http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/11/ministry-tear-down-300-villas-puncak.html

[218] Indra Budiari, The Jakarta Post, "Bogor fails to keep promises on Puncak preservation: Watchdog [Bogor gagal menepati janjinya untuk menjaga Puncak: Pengamat]," 27 April 2015, http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/27/bogor-fails-keep-promises-puncak-preservation-watchdog.html

[219] 219 The Jakarta Post, "Ahok squares up to Susi [Ahok membantah Susi]," 19 September 2015, http://www.thejakartapost.com/news/2015/09/19/ahok-squares-susi.html

[220] Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, "Jakarta Coastal Development Strategy [Strategi Pembangunan Pertahanan Pesisir]. End-of-Project Review [Tinjauan Akhir Proyek]. Final Mission Report [Laporan Misi]," 12 April 2012, h.10, Art. 45, http://www.partnersvoorwater.nl/wp-content/uploads/2012/07/FinalMissionReportdefversion.pdf

[221] Both ENDS, "Involving communities in Indonesia. Promoting Community Participation in Integrated Water Resources Management (IWRM) [Melibatkan masyarakat di Indonesia:

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu]," April 2016, http://www.bothends.org/uploaded_files/document/3def_IndoWaterCoP_digitaal.pdf

[222] Both ENDS mengunjungi nelayan di Muara Angke bersama dengan KNTI pada April 2016.

[223] Kompas.com, "Investasi Belanda untuk Kawasan Terpadu Pesisir Dianggap Hanya 'Akal-akalan'" 17 Juni 2015, http://indonesiasatu.kompas.com/read/2015/06/17/154121721/Investasi.Belanda.untuk.Kawasan.Terpadu.Pesisir.Dianggap.Hanya.Akal-akalan